

## KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017, Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan adalah unit Eselon I dari Kementerian Keuangan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Informasi yang disajikan di dalamnya telah disusun sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pemakai laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/ pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Disamping itu laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Jakarta, 17 April 2018  
Sekretaris Direktorat Jenderal,



<sup>m</sup> Rukijo  
NIP 19670210 199310 1 001 *sbu*

## DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iv
Daftar Grafik	vi
<b>Laporan Keuangan Pokok</b>	
Ringkasan Laporan Keuangan	1
Pernyataan Tanggung Jawab	4
I. Laporan Realisasi Anggaran	5
II. Neraca	6
III. Laporan Operasional	7
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	8
V. Catatan atas Laporan Keuangan	9
A. Penjelasan Umum	9
A.1. Dasar Hukum	9
A.2. Profil dan Kebijakan Teknis Ditjen Perimbangan Keuangan	11
A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan	11
A.4. Basis Akuntansi	12
A.5. Dasar Pengukuran	12
A.6. Kebijakan Akuntansi	12
B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	18
B.1. Pendapatan Negara dan Hibah	18
B.2. Belanja Negara	23
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	32
C.1. Aset	33
C.2. Kewajiban Jangka Pendek	40
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional	40
D.1. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	40
D.2. Beban Pegawai	40
D.3. Beban Persediaan	41
D.4. Beban Barang dan Jasa	41
D.5. Beban Pemeliharaan	42
D.6. Beban Perjalanan Dinas	42

D.7. Beban Penyusutan dan Amortisasi	43
D.8. Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	43
D.9. Kegiatan Non Operasional	44
E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas	44
E.1. Ekuitas Awal	44
E.2. Surplus (Defisit) LO	44
E.3. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan	45
E.4. Transaksi Antar Entitas	45
E.5. Ekuitas Akhir	46
<b>Laporan Keuangan Pendukung</b>	
Lampiran 1 Rincian Nilai Peroleh, Ak. Penyusutan dan Nilai Buku	47
Lampiran 2 Laporan Keuangan berdasarkan E-Rekon&LK	49
Lampiran 3 Berita Acara Rekonsiliasi	60
Lampiran 4 Laporan BMN	63

## DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2017 dan TA 2016	1
Tabel 2 : Ringkasan Neraca 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016	2
Tabel 3 : Penentuan Kualitas Piutang	17
Tabel 4 : Masa Manfaat Aset Tetap	18
Tabel 5 : Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Tahun Anggaran 2017	18
Tabel 6 : Perbandingan Realisasi PNBPN Tahun Anggaran 2017 dan 31 Desember 2016	19
Tabel 7 : Perbandingan Realisasi Belanja TA 2017 dan 31 Desember 2016	24
Tabel 8 : Perbandingan Pagu dan Realisasi Belanja TA 2012- 2017	24
Tabel 9 : Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja TA 2017	25
Tabel 10 : Realisasi Belanja Per Kegiatan TA 2017	26
Tabel 11 : Realisasi Belanja Pegawai TA 2017	26
Tabel 12 : Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai TA 2017 dan 31 Desember 2016	27
Tabel 13 : Perbandingan Pagu dan Realisasi Belanja Pegawai TA 2012 – 2017	27
Tabel 14 : Realisasi Belanja Barang TA 2017	28
Tabel 15 : Perbandingan Realisasi Belanja Barang TA 2017 dan TA 2016	28
Tabel 16 : Perbandingan Realisasi Belanja Barang TA 2012 – 2017	29
Tabel 17 : Realisasi Belanja Modal TA 2017	30
Tabel 18 : Perbandingan Realisasi Modal TA 2017 dan TA 2016	30
Tabel 19 : Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2012-2016 dan TA 2017	31
Tabel 20 : Perbandingan Realisasi Pengembalian Belanja Modal TA 2017 dan 2016	32
Tabel 21 : Perbandingan Neraca 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016	32
Tabel 22 : Perbandingan Nilai Aset 31 Desember TA 2017 dan 31 Desember 2016	33
Tabel 23 : Rincian Aset per 31 Desember TA 2017 dan 31 Desember 2016	33
Tabel 24 : Data Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	34
Tabel 25 : Rincian Persediaan Per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016	35
Tabel 26 : Komposisi Aset Tetap Per Jenis Aset Daftar Perbandingan Aset Tetap Antara Neraca dan SIMAK-BMN per 31 Desember	36
Tabel 27 : 2017	36
Tabel 28 : Perbandingan Posisi Peralatan dan Mesin	36
Tabel 29 : Mutasi / Perubahan Peralatan dan Mesin	37
Tabel 30 : Perbandingan Posisi Aset Tetap Lainnya	37
Tabel 31 : Mutasi / Perubahan Aset Tetap Lainnya	37
Tabel 32 : Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	38
Tabel 33 : Perbandingan Aset Tak Berwujud Per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016	38
Tabel 34 : Perbandingan Posisi Aset Lain-Lain TA 2017 dan 2016	39
Tabel 35 : Mutasi/ Perubahan Aset Lain-lain Daftar Perbandingan Aset Lain-Lain Antara Neraca dan SIMAK-BMN per 31 Desember	39
Tabel 36 : 2017	39
Tabel 37 : Perbandingan Utang Kepada Pihak Ketiga	40
Tabel 38 : Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak TA 2017 dan TA 2016	40
Tabel 39 : Rincian Beban Pegawai 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016	41

Tabel 40	:	Rincian Beban Persediaan TA 2017 dan 31 Desember 2016	41
Tabel 41	:	Rincian Beban Jasa TA 2017 dan 31 Desember 2016	42
Tabel 42	:	Rincian Beban Pemeliharaan TA 2017 dan 31 Desember 2016	42
Tabel 43	:	Rincian Beban Perjalanan Dinas TA 2017 dan 31 Desember 2016	43
Tabel 44	:	Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi TA 2017 dan TA 2016	43
Tabel 45	:	Rincian Kegiatan Non Operasional TA 2017 dan 31 Desember 2016	44
Tabel 46	:	Perbandingan Nilai Ekuitas Awal	44
Tabel 47	:	Perbandingan Surplus/Defisit LO	45
Tabel 48	:	Rincian Nilai Transaksi Antar Ekuitas	46
Tabel 49	:	Perbandingan Nilai Ekuitas Akhir Tahun Anggaran	46

## DAFTAR GRAFIK

	Hal
Grafik 1 : Perbandingan Realisasi Belanja TA 2017 dan 31 Desember 2016	24
Grafik 2 : Perbandingan Persentase Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2012-2017	25
Grafik 3 : Komposisi Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja Tahun Anggaran 2017	25
Grafik 4 : Komposisi Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2017	27
Grafik 5 : Perbandingan Persentase Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2012 – 2017	27
Grafik 6 : Komposisi Realisasi Belanja Barang TA 2017	29
Grafik 7 : Perbandingan Persentase Realisasi Belanja Barang TA 2012- 2017 dan TA 2017	29
Grafik 8 : Komposisi Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2017	31
Grafik 9 : Perbandingan Persentase Realisasi Belanja Modal TA 2012-2017	31
Grafik 10 : Komposisi Aset Tetap	37

# RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN



**KEMENTERIAN KEUANGAN**  
REPUBLIK INDONESIA

## RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Berdasarkan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat pasal 28 ayat (3), Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal, dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Tahun Anggaran 2017 (*Unaudited*) ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

### 1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2017 menggambarkan perbandingan antara Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) TA 2017 dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan dan belanja selama periode 1 Januari s.d 31 Desember 2017.

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah pada Tahun Anggaran 2017 merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp1.727.983.827,00.

Realisasi Belanja Negara pada Tahun Anggaran 2017 adalah sebesar Rp109.881.084.178,00 atau mencapai 85,17 persen dari anggaran sebesar Rp129.015.096.000,00. Jumlah realisasi Belanja tersebut semuanya berasal dari realisasi Belanja Rupiah Murni.

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2017 dan 31 Desember 2016 dapat disajikan sebagai berikut:

**Tabel 1**  
**Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran TA 2017 dan 2016**  
(dalam rupiah)

Uraian	TA 2017		TA 2016	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
Pendapatan Negara dan Hibah	0	1.727.983.827	0	594.159.891
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>0</b>	<b>1.727.983.827</b>	<b>0</b>	<b>594.159.891</b>
Belanja Pegawai	34.632.363.000	28.676.039.218	30.303.861.000	28.618.679.974
Belanja Barang	73.087.438.000	61.653.759.915	88.434.043.000	55.410.492.619
Belanja Modal	21.295.295.000	19.551.285.045	7.340.536.000	6.622.520.406
<b>Belanja Transaksi Kas</b>	<b>129.015.096.000</b>	<b>109.881.084.178</b>	<b>126.078.440.000</b>	<b>90.651.692.999</b>
Belanja Barang Non Kas	0	0	0	0
<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>129.015.096.000</b>	<b>109.881.084.178</b>	<b>126.078.440.000</b>	<b>90.651.692.999</b>



## 2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016.

Neraca yang disajikan adalah hasil dari proses Sistem Akuntansi Instansi, sebagaimana yang diwajibkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Nilai Aset per 31 Desember 2017 dicatat dan disajikan sebesar Rp24.312.444.535,00 yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp2.258.890.806,00 Aset Tetap sebesar Rp21.838.093.144,00 dan Aset Lainnya sebesar Rp215.460.585,00.

Nilai Kewajiban seluruhnya tersaji sebesar Rp56.899.227,00 yang merupakan Kewajiban Jangka Pendek. Nilai Ekuitas disajikan sebesar Rp24.255.545.398,00.

Ringkasan Neraca per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 dapat disajikan sebagai berikut:

**Tabel 2**  
**Ringkasan Neraca per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016**

Dalam rupiah

Uraian	31-Des-17	31-Des-16	Kenaikan/ (Penurunan)
<b>Aset</b>	<b>24.312.444.535</b>	<b>18.373.292.305</b>	5.939.152.230
Aset Lancar	2.258.890.806	2.122.903.063	135.987.743
Aset Tetap	21.838.093.144	16.024.314.817	5.813.778.327
Aset Lainnya	215.460.585	226.074.425	-10.613.840
<b>Kewajiban</b>	<b>56.899.227</b>	<b>89.239.524</b>	-32.340.297
Kewajiban Jangka Pendek	56.899.227	89.239.524	-32.340.297
<b>Ekuitas</b>	<b>24.255.545.308</b>	<b>18.284.052.781</b>	5.971.492.527
Ekuitas	24.255.545.308	18.284.052.781	5.971.492.527

## 3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, surplus/defisit LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar.

Pendapatan-LO untuk periode Tahun Anggaran 2017 adalah sebesar Rp88.401.206,00, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp107.629.562.841,00 sehingga terdapat defisit dari kegiatan operasional sebesar Rp(107.541.161.635,00). Kegiatan Non Operasional dan Pos-pos Luar Biasa surplus sebesar Rp1.545.700.665,00 sehingga entitas mengalami Defisit sebesar Rp(105.995.460.970,00).

## 4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2017 adalah sebesar Rp18.284.052.781,00 dikurangi Defisit-LO sebesar Rp(105.995.460.970,00) kemudian ditambah Transaksi antar entitas sebesar Rp111.966.953.497,00 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp24.255.545.308,00.

## 5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2017, Pendapatan Negara dan Belanja Negara diakui berdasarkan basis kas, yaitu diakui pada saat kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas negara.

Dalam penyajian Neraca untuk periode per tanggal 31 Desember 2017, nilai Aset, Kewajiban, dan Ekuitas diakui berdasarkan basis akrual, yaitu diakui pada saat diperolehnya hak atas dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas negara

# PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB



**KEMENTERIAN KEUANGAN**  
REPUBLIK INDONESIA

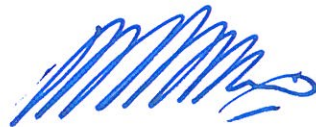
## PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

### PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB DIREKTUR JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Tahun Anggaran 2017 (*Audited*) yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jakarta, 17 April 2018  
Direktur Jenderal,



Boediarso Teguh Widodo  
NIP 19580823 198210 1 001

# LAPORAN REALISASI ANGGARAN



**KEMENTERIAN KEUANGAN**  
REPUBLIK INDONESIA

## I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN  
LAPORAN REALISASI ANGGARAN  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN  
31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	Tahun Anggaran 2017			31 Desember 2016
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
<b>PENDAPATAN</b>	<b>B.1</b>				
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1.1	0	1.727.983.827	0,00%	594.159.891
Hibah	B.1.2				0
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>			<b>1.727.983.827</b>	0,00%	<b>594.159.891</b>
<b>BELANJA</b>					
<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>B.2</b>				
Belanja Pegawai	B.2.1	34.632.363.000	28.676.039.218	82,80%	28.618.679.974
Belanja Barang	B.2.2	73.087.438.000	61.653.759.915	84,36%	55.410.492.619
<b>Jumlah Belanja Operasi</b>		<b>107.719.801.000</b>	<b>90.329.799.133</b>	<b>83,86%</b>	<b>84.029.172.593</b>
<b>BELANJA MODAL</b>	<b>B.3</b>				
Belanja Tanah	B.3.1				0
Belanja Peralatan dan Mesin	B.3.2	12.774.772.000	12.831.909.121	100,45%	1.834.888.221
Belanja Gedung dan Bangunan	B.3.3	0	0	0,00%	0
Belanja Modal Lainnya	B.3.4	8.520.523.000	6.719.375.924	78,86%	4.787.632.185
<b>Jumlah Belanja Modal</b>		<b>21.295.295.000</b>	<b>19.551.285.045</b>	<b>91,81%</b>	<b>6.622.520.406</b>
<b>JUMLAH BELANJA</b>		<b>129.015.096.000</b>	<b>109.881.084.178</b>	<b>85,17%</b>	<b>90.651.692.999</b>

Jakarta, 17 April 2018  
Sekretaris Direktorat Jenderal,



Rukijo  
NIP 19670210 199310 1 001 sbn

# NERACA



**KEMENTERIAN KEUANGAN**  
REPUBLIK INDONESIA

## II. NERACA

### DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN NERACA

per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016

(Dalam Rupiah)

URAIAN	Catatan	31 Desember 2017	31 Desember 2016
<b>ASET</b>			
<b>ASET LANCAR</b>			
Kas di Bendahara pengeluaran	C.1	0	0
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.2	0	44.754
Piutang Bukan Pajak	C.3	50.733.906	52.552.088
Penyisihan Piutang tak Tertagih Bukan Pajak	C.4	(50.733.906)	(52.552.088)
Piutang Bukan Pajak (Netto)	C.5	0	0
Persediaan	C.6	2.258.890.806	2.122.858.309
<b>Jumlah Aset Lancar</b>		<b>2.258.890.806</b>	<b>2.122.903.063</b>
<b>ASET TETAP</b>			
Peralatan dan mesin	C.7	93.840.931.062	60.263.306.055
Jalan, Irigasi dan Jaringan		990.851.337	0
Aset Tetap Lainnya	C.9	789.445.090	5.586.982.947
Konstruksi dalam Pengerjaan	C.10	0	49.896.000
Akumulasi Penyusutan	C.11	(73.783.134.345)	(49.875.870.185)
<b>Jumlah Aset Tetap</b>		<b>21.838.093.144</b>	<b>16.024.314.817</b>
<b>ASET LAINNYA</b>			
Aset tak Berwujud	C.12	1.858.698.385	1.782.670.785
Aset Lain-Lain	C.13	1.934.248.104	3.887.372.050
Akumulasi penyusutan dan Amortisasi	C.14	(3.577.485.904)	(5.443.968.410)
<b>Jumlah Aset Lainnya</b>		<b>215.460.585</b>	<b>226.074.425</b>
<b>JUMLAH ASET</b>		<b>24.312.444.535</b>	<b>18.373.292.305</b>
<b>KEWAJIBAN</b>			
<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>			
Utang Kepada Pihak Ketiga	C.15	56.899.227	89.239.524
Uang Muka dari KPPN	C.16	0	0
Utang Jangka Pendek Lainnya	C.17	0	0
<b>Jumlah Kewajiban Jangka Pendek</b>		<b>56.899.227</b>	<b>89.239.524</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>		<b>56.899.227</b>	<b>89.239.524</b>
<b>EKUITAS</b>			
Ekuitas	C.18	24.255.545.308	18.284.052.781
<b>JUMLAH EKUITAS</b>		<b>24.255.545.308</b>	<b>18.284.052.781</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>		<b>24.312.444.535</b>	<b>18.373.292.305</b>

Jakarta, April 2018  
Sekretaris Direktorat Jenderal,

  
M. Rukijo

NIP 19670210 199310 1 001 sbw



# LAPORAN OPERASIONAL



**KEMENTERIAN KEUANGAN**  
REPUBLIK INDONESIA

### III. LAPORAN OPERASIONAL

DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN  
LAPORAN OPERASIONAL  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN  
31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016

(Dalam Rupiah)

URAIAN	Catatan	31-Des-17	31-Des-16
<b>KEGIATAN OPERASIONAL</b>			
<b>PENDAPATAN OPERASIONAL</b>	<b>D.1</b>		
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1.1	88.401.206	5.417.734
Pendapatan Hibah	D.1.2		
<b>Jumlah Pendapatan Operasional</b>		<b>88.401.206</b>	<b>5.417.734</b>
<b>BEBAN OPERASIONAL</b>	<b>D.2</b>		
Beban Pegawai	D.2.1	28.650.967.351	28.700.651.068
Beban Persediaan	D.2.2	2.153.428.740	1.609.495.401
Beban Barang dan Jasa	D.2.3	31.409.600.897	28.749.332.804
Beban Pemeliharaan	D.2.4	10.717.190.548	8.345.501.415
Beban Perjalanan Dinas	D.2.5	28.482.307.846	23.451.440.738
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.2.6	6.217.885.641	6.842.807.728
Beban Penyisihan Utang Tak Tertagih	D.2.7	(1.818.182)	0
Beban Lain-Lain	D.2.8	0	0
<b>Jumlah Beban Operasional</b>		<b>107.629.562.841</b>	<b>97.699.229.154</b>
<b>SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL</b>		<b>(107.541.161.635)</b>	<b>(97.693.811.420)</b>
<b>KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>	<b>D.3</b>		
<b>Surplus/Defisit Dari Pelepasan Aset Non Lancar</b>	<b>D.3.1</b>		
Pendapatan Pelepasan Aset Non lancar	D.3.1.1	1.486.828.263	436.651.000
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	D.3.1.2	476.000	33.802.035
<b>Jumlah Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar</b>		<b>1.486.352.263</b>	<b>402.848.965</b>
<b>Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya</b>	<b>D.3.2.</b>		
Pendapatan Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.3.2.1	143.654.182	205.147.226
Beban Dari kegiatan Non Operasional Lainnya	D.3.2.2	84.305.780	7.784.745
<b>Jumlah Surplus/Defisit dari kegiatan Non Operasional Lainnya</b>		<b>59.348.402</b>	<b>197.362.481</b>
<b>SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>		<b>1.545.700.665</b>	<b>600.211.446</b>
<b>POS LUAR BIASA</b>	<b>D.4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Beban Luar Biasa	D.4.1	0	0
<b>SURPLUS/DEFISIT LO</b>		<b>(105.995.460.970)</b>	<b>(97.093.599.974)</b>

Jakarta, April 2018  
Sekretaris Direktorat Jenderal,



M. Rukijo

NIP 19670210 199310 1 001 sbn

# LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS



**KEMENTERIAN KEUANGAN**  
REPUBLIK INDONESIA

## IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN  
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN  
31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016

(Dalam Rupiah)

URAIAN	Catatan	PERIODE	
		30 September 2017	31 Desember 2016
1	2	3	4
EKUITAS AWAL	E.1	18.284.052.781	30.876.963.071
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(105.995.460.970)	(97.093.599.974)
DAMPAK PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	E.3	0	0
KOREKSI YANG MENAMBAH/ MENGURANGI EKUITAS	E.4	0	312.909.849
Penyesuaian Nilai Aset	E.4.1	0	0
Koreksi Nilai Persediaan	E.4.2	0	0
Selisih Revaluasi aset Tetap	E.4.3	0	0
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	E.4.4	0	312.909.849
Koreksi lain-Lain	E.4.5	0	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.5	111.966.953.497	84.187.779.835
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS		5.971.492.527	(12.592.910.290)
<b>EKUITAS AKHIR</b>	<b>E.4.6</b>	<b>24.255.545.308</b>	<b>18.284.052.781</b>

Jakarta, April 2018  
Sekretaris Direktorat Jenderal,



M. Rukijo

NIP 19670210 199310 1 001 sbn

# CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN



**KEMENTERIAN KEUANGAN**  
REPUBLIK INDONESIA

## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

### A. PENJELASAN UMUM

#### Dasar Hukum

#### A.1. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 255/PMK.09/2015 tentang Standar Reviu Atas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang tata cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90/PMK.06/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247/PMK.06/2014 tentang Perubahan Ke Dua atas PMK 1/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.06/2014 tentang Tata cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 271/PMK.05/2014 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Hibah;

16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.05/2014 tentang Rekening Milik Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja;
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.05/2016 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis Akrual pada Pemerintah Pusat;
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas PMK Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;
19. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 53/KMK.06/2012 tentang Penerapan Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat;
20. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat;
21. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-40/PB/2006 tentang Pedoman Akuntansi Persediaan;
22. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-44/PB/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;
23. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-69/PB/2006 tentang Pedoman Koreksi Kesalahan Laporan Keuangan;
24. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-02/PB/2007 tentang Pedoman Penatausahaan Dan Akuntansi Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak;
25. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-62/PB/2009 tentang Tata cara Penyajian Informasi Pendapatan dan Belanja Secara Akrual pada Laporan Keuangan;
26. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-85/PB/2011 tentang Penatausahaan Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga;
27. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-25/PB/2012 tentang Penatausahaan Penerimaan Negara Melalui Modul Penerimaan Negara;
28. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-8/PB/2012 tentang Tata Cara Penyelesaian Data Suspen Penerimaan;
29. Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-187/PB/2017 tentang Kodifikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar;
30. Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-658/PB/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-617/PB/2017 tentang Pemutakhiran Kodifikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar.

## A.2. PROFIL DAN KEBIJAKAN TEKNIS DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN

### *Rencana Strategis*

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan daerah;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
- c. Penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
- d. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan daerah;
- e. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal.

Pembentukan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan merupakan upaya penataan hubungan keuangan antara pusat dan daerah seiring dengan perkembangan dinamis yang terkait dengan keuangan pusat dan daerah. Adapun rencana strategis Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan disajikan dalam matriks rencana strategis dalam lampiran.

## A.3. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

### *Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan*

Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2017 (*Unaudited*) ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasional keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN).

SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.



#### A.4 BASIS AKUNTANSI

*Basis  
Akuntansi*

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menerapkan basis Akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis Kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.

#### A.5 DASAR PENGUKURAN

*Dasar  
Pengukuran*

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan DJPK dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut.

Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang Rupiah.

Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi dahulu dan dinyatakan dalam mata uang Rupiah.

#### A.6. KEBIJAKAN AKUNTANSI

*Kebijakan  
Akuntansi*

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2017 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh DJPK yang merupakan entitas pelaporan. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan adalah sebagai berikut:

##### a. Kebijakan Akuntansi atas Pendapatan-LRA

*Kebijakan  
Akuntansi atas  
Pendapatan-  
LRA*

Pendapatan adalah semua penerimaan Kas Umum Negara (KUN) yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

Pendapatan diakui pada saat kas diterima pada KUN. Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan *azas bruto*, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

*Kebijakan  
Akuntansi atas  
Pendapatan-  
LO*

Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

**b. Kebijakan Akuntansi atas Pendapatan-LO**

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada DJPK adalah sebagai berikut:

- Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
- Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan.

Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

**c. Kebijakan Akuntansi atas Belanja**

Belanja adalah semua pengeluaran KUN yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah pusat. Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.

Khusus pengeluaran melalui Bendahara Pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas laporan Keuangan.

**d. Kebijakan Akuntansi atas Beban**

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

**e. Kebijakan Akuntansi atas Aset**

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi/sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk sumber daya alam

*Kebijakan  
Akuntansi atas  
Belanja*

*Kebijakan  
Akuntansi atas  
Beban*

*Kebijakan  
Akuntansi atas  
Aset*

seperti hutan, kekayaan di dasar laut dan kandungan pertambangan.

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, dan Aset Lainnya:

### 1. Aset Lancar

#### *Aset Lancar*

Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset Lancar ini terdiri dari Kas, Piutang, dan Persediaan.

Kas disajikan dalam Neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan dalam Neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.

Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihan atau yang dipersamakan, yang diharapkan diterima pengembaliannya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan dan disajikan sebagai Bagian Lancar Piutang.

Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai bagian lancar TPA/TGR.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan dicatat di neraca berdasarkan:

- 1) Harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian.
- 2) Harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri.

Harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.

### 2. Aset Tetap

#### *Aset Tetap*

Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun.

Nilai Aset Tetap disajikan pada neraca berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.

Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:

- 1) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- 2) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- 3) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

Pemerintah melakukan penilaian kembali (revaluasi) berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara. Revaluasi dilakukan terhadap aset tetap berupa Tanah, Gedung dan Bangunan, serta Jalan, Jaringan, dan Irigasi berupa Jalan Jembatan dan Bangunan Air pada Kementerian Negara/Lembaga sesuai kodefikasi Barang Milik Negara yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2015. Termasuk dalam ruang lingkup objek revaluasi adalah aset tetap pada Kementerian/Lembaga yang sedang dilaksanakan pemanfaatan. Pelaksanaan penilaian dalam rangka revaluasi dilakukan dengan pendekatan data pasar, pendekatan biaya, dan/atau pendekatan pendapatan oleh Penilai Pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan. Revaluasi dilakukan pada tahun 2017 dan 2018. Berdasarkan pertimbangan efisiensi anggaran dan waktu penyelesaian, pelaksanaan penilaian dilakukan dengan survei lapangan untuk objek penilaian berupa Tanah dan tanpa survei lapangan untuk objek penilaian selain Tanah.

Nilai aset tetap hasil penilaian kembali menjadi nilai perolehan baru dan nilai akumulasi penyusutannya adalah nol. Dalam hal nilai aset tetap hasil revaluasi lebih tinggi dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai penambah ekuitas pada Laporan Keuangan. Namun, apabila nilai aset tetap hasil revaluasi lebih rendah dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai pengurang ekuitas pada Laporan Keuangan.

Aset tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan zaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-lain pada pos Aset Lainnya.

Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN.

### 3. Piutang Jangka panjang

*Piutang  
Jangka  
Panjang*

Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Termasuk dalam Piutang Jangka Panjang adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun.

TPA menggambarkan jumlah yang diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.

TP adalah tagihan yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian negara/daerah.

TGR adalah suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri atau bukan pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun

tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.

*Aset Lainnya*

#### 4. Aset Lainnya

Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud dan Aset Lain-lain.

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Aset Tak Berwujud meliputi *software* komputer; lisensi dan *franchise*; hak cipta (*copyright*), paten, *goodwill*, dan hak lainnya; hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang.

Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah.

*Kebijakan  
Akuntansi atas  
Kewajiban*

#### f. Kebijakan Akuntansi atas Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.

Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang.

##### a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu Kewajiban diklasifikasikan sebagai Kewajiban Jangka Pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, Utang Bunga (*accrued interest*) dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

##### b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

*Kebijakan  
Akuntansi atas  
Ekuitas*

#### g. Kebijakan Akuntansi atas Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara Aset dengan Kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

*Kebijakan  
Akuntansi atas  
Penyisihan  
Piutang Tidak  
tertagih*

#### h. Kebijakan Akuntansi atas Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan penentuan kualitas piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo dan perkembangan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah.

Kualitas piutang didasarkan pada kondisi masing-masing piutang pada tanggal pelaporan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 69/PMK.06/2014

tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara.

Penentuan Kualitas Piutang disajikan pada Tabel 3 berikut ini:

**Tabel 3**  
**Penentuan Kualitas Piutang**

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan;	0.5%
Kurang lancar	Dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan;	10%
Diragukan	Dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan; atau 2. Piutang telah diserahkan pengurusannya kepada Panitia Urusan Piutang Negara/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.	100%

*Kebijakan  
Akuntansi atas  
Penyusutan  
Aset Tetap*

**i. Kebijakan Akuntansi atas Penyusutan Aset Tetap**

Penyusutan Aset Tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu Aset Tetap. Kebijakan penyusutan Aset Tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.06/2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90/PMK.06/2014 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.

Penyusutan Aset Tetap tidak dilakukan terhadap :

- a. Tanah
- b. Konstruksi dalam pengerjaan (KDP)
- c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada pengelola barang untuk dilakukan penghapusan.

Penghitungan dan pencatatan penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.

Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama masa manfaat.

Masa manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum Tabel Masa Manfaat Aset Tetap disajikan pada Tabel 4 berikut ini:

Tabel 4

Tabel Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Irigasi dan Jaringan	5 s.d. 40 tahun
Aset Tetap lainnya (alat musik modern)	4 tahun

Implementasi  
Akuntansi  
Berbasis  
Akrual  
Pertama Kali

#### j. Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual Pertama Kali

Mulai tahun 2015 Pemerintah mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual sesuai dengan amanat PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Implementasi tersebut memberikan pengaruh pada beberapa hal dalam penyajian laporan keuangan. Pertama, Pos-pos ekuitas dana pada neraca per 31 Desember 2014 yang berbasis *cash toward accrual* direklasifikasi menjadi ekuitas sesuai dengan akuntansi berbasis akrual. Kedua, keterbandingan penyajian akun-akun tahun berjalan dengan tahun sebelumnya dalam Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas tidak dapat dipenuhi. Hal ini diakibatkan oleh penyusunan dan penyajian akuntansi berbasis akrual pertama kali mulai dilaksanakan tahun 2015.

### B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

#### B.1. PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH

Realisasi PNB  
Rp1.727.983.827,00

Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Tahun Anggaran 2017 adalah sebesar Rp1.727.983.827,00. DJPK tidak menetapkan target dalam APBN Tahun Anggaran 2017. Apabila dibandingkan dengan realisasi 31 Desember 2016 sebesar Rp594.159.891,00, realisasi PNB Tahun Anggaran 2017 mengalami kenaikan sebesar Rp1.133.823.936,00 atau 190,83 persen. Penerimaan terbesar adalah berasal dari Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya sebesar Rp1.486.828.263,00.

PNBP pada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan berasal dari PNB Lainnya. Besarnya realisasi PNB Tahun Anggaran 2017 dapat dilihat dalam tabel 5 berikut.

Tabel 5

Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Tahun Anggaran 2017  
(dalam rupiah)

Uraian	Estimasi	Realisasi	%
Pendapatan Penjualan Lainnya	0	1.150.000	0
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	1.486.828.263	0
Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	0	285.140	0
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Pusat TAYL	0	30.982.380	0
Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL	0	61.641.564	0
Penerimaan Kembali Belanja Modal TAYL	0	58.267.478	0
Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	88.829.002	0
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>1.727.983.827</b>	<b>0</b>

Perbandingan realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak untuk periode s.d. 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 dapat dilihat pada tabel 6 berikut.

**Tabel 6**  
**Perbandingan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak**  
**Tahun Anggaran 2017 dan 31 Desember 2016**

Uraian	31-Des-17	31-Des-16	Kenaikan / (Penurunan)	%
Pendapatan Penjualan Lainnya	1.150.000	-	1.150.000	0,00%
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	1.486.828.263	436.651.000	1.050.177.263	240,51%
Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	285.140	21.482	263.658	0,00%
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Pusat TAYL	30.982.380	96.604.986	(65.622.606)	-67,93%
Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL	61.641.564	51.780.925	9.860.639	19,04%
Penerimaan Kembali Belanja Modal TAYL	58.267.478	-	58.267.478	0,00%
Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	88.829.002	5.351.498	83.477.504	
Pendapatan Pelunasan Piutang Non Bendahara	0	3.750.000	(3.750.000)	0,00%
<b>Total</b>	<b>1.727.983.827</b>	<b>594.159.891</b>	<b>1.133.823.936</b>	<b>190,83%</b>

Tidak terdapat pengembalian pendapatan selama TA 2017.

#### B.1.1 Pendapatan Penjualan Lainnya

*Pendapatan Penjualan  
Lainnya Rp1.150.000,00*

Pendapatan Penjualan Lainnya adalah pendapatan dari penjualan yang tidak termasuk ke dalam kelompok pendapatan yang lain.

Sampai dengan 31 Desember 2017, Pendapatan Penjualan Lainnya sebesar Rp1.150.000,00 berasal dari penjualan dokumen nonarsip sesuai dengan Keputusan Dirjen Perimbangan Keuangan nomor KEP-17/PK/2017 tanggal 19 Mei 2017 tentang Pemusnahan Bahan Non Arsip pada DJPK.

#### B.1.2 Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya

*Pendapatan dari  
Pemindahtanganan BMN  
Lainnya  
Rp1.486.828.263,00*

Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya adalah PNPB Lainnya yang berasal dari penghapusan Barang Milik Negara dengan tindak lanjut penjualan setelah mendapatkan persetujuan dari Biro Perlengkapan Setjen selaku pengelola BMN di lingkungan Kemenkeu dan persetujuan Kepala KPKNL atas nama Menkeu selaku Pengguna Barang.

Sampai dengan 31 Desember 2017, pendapatan dari pemindahtanganan BMN sebagai berikut :

- Rp20.200.000,00 yang berasal dari hasil lelang penjualan BMN rusak berat pada tanggal 20 Juni 2017 dengan nomor NTPN F314D7AV94790KU9;
- Rp52.345.678,00 yang berasal dari hasil lelang penjualan BMN rusak berat pada tanggal 20 Juni 2017 dengan nomor NTPN097040CQNK5P2AHP;
- Rp55.555.000,00 yang berasal dari hasil lelang penjualan BMN rusak berat pada tanggal 20 Juni 2017 dengan nomor NTPN0C5E20CORCAV7JHP;
- Rp63.150.000,00 yang berasal dari hasil lelang penjualan BMN rusak berat pada tanggal 20 Juni 2017 dengan nomor NTPN242E80CQ7T8GU4HP;



- e. Rp58.500.000,00 yang berasal dari hasil lelang penjualan BMN rusak berat pada tanggal 20 Juni 2017 dengan nomor NTPN576CB0D0CLO7A8HP;
- f. Rp60.100.000,00 yang berasal dari hasil lelang penjualan BMN rusak berat pada tanggal 20 Juni 2017 dengan nomor NTPN5BE8E0D104VP3JHP;
- g. Rp65.575.000,00 yang berasal dari hasil lelang penjualan BMN rusak berat pada tanggal 20 Juni 2017 dengan nomor NTPN85EE50CVROQS6UHP;
- h. Rp46.789.999,00 yang berasal dari hasil lelang penjualan BMN rusak berat pada tanggal 20 Juni 2017 dengan nomor NTPN86C880D2M983ATHP;
- i. Rp607.063.887,00 yang berasal dari hasil lelang penjualan BMN rusak berat pada tanggal 20 Juni 2017 dengan nomor NTPN86E6D0DKLC5VQLHP;
- j. Rp64.667.000,00 yang berasal dari hasil lelang penjualan BMN rusak berat pada tanggal 20 Juni 2017 dengan nomor NTPN94C790CV19AOIRHP;
- k. Rp56.750.000,00 yang berasal dari hasil lelang penjualan BMN rusak berat pada tanggal 20 Juni 2017 dengan nomor NTPNA1EF80CVCTRMA3HP;
- l. Rp58.100.000,00 yang berasal dari hasil lelang penjualan BMN rusak berat pada tanggal 20 Juni 2017 dengan nomor NTPNC945F0D1HAF4UMHP;
- m. Rp68.177.000,00 yang berasal dari hasil lelang penjualan BMN rusak berat pada tanggal 20 Juni 2017 dengan nomor NTPN1AF311S4PKPTR8R9;
- n. Rp64.100.000,00 yang berasal dari hasil lelang penjualan BMN rusak berat pada tanggal 20 Juni 2017 dengan nomor NTPN99C851S5JHLVVR9;
- o. Rp61.777.700,00 yang berasal dari hasil lelang penjualan BMN rusak berat pada tanggal 20 Juni 2017 dengan nomor NTPNA56DF1S7GC4RA2R9;
- p. Rp63.777.000,00 yang berasal dari hasil lelang penjualan BMN rusak berat pada tanggal 20 Juni 2017 dengan nomor NTPNF4E9C1SAU37JFJR9;
- q. Rp20.199.999,00 yang berasal dari hasil lelang penjualan BMN rusak berat pada tanggal 20 Juni 2017 dengan nomor NTPN6EFCA64NIGAMKLD9.

### B.1.3 Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)

*Pendapatan Jasa  
Lembaga Keuangan  
(Jasa Giro)  
Rp285.140,00*

Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan atau Jasa Giro adalah PNB yang diperoleh dari jasa atas penempatan uang pada lembaga keuangan.

Sampai dengan 31 Desember 2017, Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro) sebesar Rp285.140,00 adalah berasal dari pendapatan bagi hasil dari bank umum.

### B.1.4 Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Pusat Tahun Anggaran Yang Lalu

*Penerimaan Kembali  
Belanja Pegawai Pusat  
TAYL Rp30.982.380,00*

Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL adalah PNB Lainnya yang berasal dari pembayaran kembali atas kelebihan bayar belanja pegawai yang telah diterima oleh pegawai pada tahun anggaran yang lalu.

Sampai dengan 31 Desember 2017, Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL sebesar **Rp30.982.380,00** yang berasal dari pengembalian belanja pegawai dengan rincian sebagai berikut:

1. Pengembalian senilai **Rp734.310,00**, yang terdiri atas pengembalian kelebihan tunjangan jabatan karena TMT Tugas Belajar a.n. Muhammad Hijrah sebesar Rp355.000,00 dan pengembalian kelebihan tunjangan istri a.n. Roni sebesar Rp379.310,00, dengan dokumen SPM/SP2D sebagai berikut:
  - SPM : 1/PK.13/2017 tanggal 3 Januari 2017;
  - SP2D : 170191503000098 tanggal 3 Januari 2017.
2. Pengembalian senilai **Rp717.872,00**, yang terdiri atas pengembalian kelebihan tunjangan istri a.n. Imam Joedono sebesar Rp338.562,00 dan pengembalian kelebihan tunjangan istri a.n. Roni sebesar Rp379.310,00, dengan dokumen SPM/SP2D sebagai berikut:
  - SPM : 3/PK.13/2017 tanggal 12 Januari 2017;
  - SP2D : 170191503000145 tanggal 1 Februari 2017.
3. Pengembalian senilai **Rp1.077.446,00**, yang terdiri atas pengembalian kelebihan tunjangan istri a.n. Imam Joedono sebesar Rp338.562,00, pengembalian kelebihan tunjangan istri a.n. Roni sebesar Rp379.310,00, dan pengembalian kelebihan tunjangan istri a.n. Heru Hermawan sebesar Rp359.574,00, dengan dokumen SPM/SP2D dukung sebagai berikut:
  - SPM : 62/PK.13/2017 tanggal 14 Februari 2017;
  - SP2D : 170191503000264 tanggal 1 Maret 2017.
4. Penerimaan kembali belanja pegawai senilai **Rp1.077.446,00**, yang terdiri atas pengembalian kelebihan tunjangan istri a.n. Imam Joedono sebesar Rp338.562,00, pengembalian kelebihan tunjangan istri a.n. Roni sebesar Rp379.310,00, dan pengembalian kelebihan tunjangan istri a.n. Heru Hermawan sebesar Rp359.574,00, dengan dokumen SPM/SP2D sebagai berikut:
  - SPM : 203/PK.13/2017 tanggal 13 Maret 2017;
  - SP2D : 170191503000407 tanggal 3 April 2017.
5. Penerimaan penerimaan kembali atas pengembalian tunjangan istri a.n. nama Imam Joedono sebesar **Rp23.022.222,00**, melalui SSPB dengan NTPN 3AAC35AIQM7S16Q8 tanggal 20 April 2017.
6. Penerimaan kembali belanja pegawai senilai **Rp1.077.446,00**, yang terdiri atas pengembalian kelebihan tunjangan istri a.n. Imam Joedono sebesar Rp338.562,00, pengembalian kelebihan tunjangan istri a.n. Roni sebesar Rp379.310,00, dan pengembalian kelebihan tunjangan istri a.n. Heru Hermawan sebesar Rp359.574,00, dengan dokumen SPM/SP2D sebagai berikut:
  - SPM : 383/PK.13/2017 tanggal 11 April 2017;
  - SP2D : 170191503000485 tanggal 2 Mei 2017.
7. Pengembalian senilai **Rp738.884,00**, yang terdiri atas pengembalian kelebihan tunjangan istri a.n. Roni sebesar Rp379.310,00, dan pengembalian kelebihan tunjangan istri a.n. Heru Hermawan sebesar Rp359.574,00, dokumen SPM/SP2D sebagai berikut:
  - SPM : 674/PK.13/2017 tanggal 12 Mei 2017;
  - SP2D :170191503000634 tanggal 2 Juni 2017.

8. Pengembalian senilai **Rp738.884,00**, yang terdiri atas pengembalian kelebihan tunjangan istri a.n. Roni sebesar Rp379.310,00, dan pengembalian kelebihan tunjangan istri a.n. Heru Hermawan sebesar Rp359.574,00, dokumen SPM/SP2D sebagai berikut:
  - SPM : 869/PK.13/2017 tanggal 12 Juni 2017;
  - SP2D :170191503000853 tanggal 3 Juli 2017.
9. Pengembalian senilai **Rp359.574,00**, yang terdiri atas pengembalian kelebihan tunjangan istri a.n. Heru Hermawan sebesar Rp359.574,00, dokumen SPM/SP2D sebagai berikut:
  - SPM : 1072/PK.13/2017 tanggal 11 Juli 2017;
  - SP2D :170191503001338 tanggal 1 Agustus 2017.
10. Pengembalian senilai **Rp359.574,00**, yang terdiri atas pengembalian kelebihan tunjangan istri a.n. Heru Hermawan sebesar Rp359.574,00, dokumen SPM/SP2D sebagai berikut:
  - SPM : 1395/PK.13/2017 tanggal 14 Agustus 2017;
  - SP2D :170191503001559 tanggal 4 September 2017.
11. Pengembalian senilai **Rp359.574,00**, yang terdiri atas pengembalian kelebihan tunjangan istri a.n. Heru Hermawan sebesar Rp359.574,00, dokumen SPM/SP2D sebagai berikut:
  - SPM : 1719/PK.13/2017 tanggal 12 September 2017;
  - SP2D :170191503001615 tanggal 2 Oktober 2017.
12. Pengembalian senilai **Rp359.574,00**, yang terdiri atas pengembalian kelebihan tunjangan istri a.n. Heru Hermawan sebesar Rp359.574,00, dokumen SPM/SP2D sebagai berikut:
  - SPM : 2150/PK.13/2017 tanggal 12 Oktober 2017;
  - SP2D :170191503001798 tanggal 1 November 2017.
13. Pengembalian senilai **Rp359.574,00**, yang terdiri atas pengembalian kelebihan tunjangan istri a.n. Heru Hermawan sebesar Rp359.574,00, dokumen SPM/SP2D sebagai berikut:
  - SPM : 2535/PK.13/2017 tanggal 13 November 2017;
  - SP2D : 170191503002008 tanggal 4 Desember 2017.

#### B.1.5 Penerimaan Kembali Belanja Barang Pusat Tahun Anggaran Yang Lalu

*Penerimaan Kembali  
Belanja Barang TAYL  
Rp61.641.564,00*

Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL adalah PNBP Lainnya yang diakibatkan oleh pembayaran kembali atas kelebihan bayar belanja barang yang telah dibelanjakan pada tahun anggaran yang lalu.

Sampai dengan 31 Desember 2017, Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL sebesar **Rp61.641.564,00** berasal dari penerimaan kembali atas berbagai akun belanja dengan penerimaan kembali paling besar adalah sebesar **Rp9.668.500,00**.

#### B.1.6 Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu

*Penerimaan Kembali  
Belanja Modal TAYL  
Rp58.267.478,00*

Penerimaan Kembali Belanja Modal TAYL adalah PNBP Lainnya yang diakibatkan oleh pembayaran kembali atas kelebihan bayar belanja modal yang telah dibelanjakan pada tahun anggaran yang lalu.

Sampai dengan 31 Desember 2017, Penerimaan Kembali Belanja Modal TAYL sebesar **Rp58.267.478,00** berasal dari penerimaan kembali atas transaksi berikut.

- a. Penerimaan kembali **Rp3.669.120,00** berasal dari pengembalian belanja modal atas belanja tahun 2016 akibat adanya duplikasi perhitungan material

- PT Barindo Prima Agung, disetor ke kas negara pada tanggal 6 Desember 2017 dengan nomor NTPN 5743B7BVEH3J5OJ8;
- b. Penerimaan kembali Rp2.252.000,00 berasal dari pengembalian belanja modal atas belanja tahun 2016 akibat adanya kelebihan pembayaran kepada PT Barindo Prima Agung, disetor ke kas negara pada tanggal 6 Desember 2017 dengan nomor NTPN B8E627C0HEMCEBGJ8; dan
  - c. Penerimaan kembali Rp52.346.358,00 berasal dari pengembalian belanja modal atas belanja tahun 2016 akibat adanya kekurangan volume atas pekerjaan yang dilakukan PT Barindo Prima Agung, disetor ke kas negara pada tanggal 27 Desember 2017 dengan nomor NTPN 2408E3Q2S6N6UOLO.

### B.1.7 Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah

Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah adalah penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari setoran rekanan pemerintah, berupa denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan pemerintah.

*Pendapatan Denda  
Keterlambatan  
Penyelesaian  
Pekerjaan  
Pemerintah  
Rp88.829.002*

Sampai dengan 31 Desember 2017, Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah sebesar Rp88.829.002,00 berasal dari transaksi sebagai berikut:

- a. Sebesar Rp1.818.182,00 adalah berasal dari pelunasan piutang dari PT Aek atas piutang PNBPN yang sudah dilimpahkan penagihannya ke PUPN dan telah macet 100% serta telah disisihkan 100%. Pendapatan tersebut telah disetorkan pada tanggal 14 Februari 2017 dengan nomor NTPN BB2CF364F24NKI39;
- b. Sebesar Rp244.752,00 adalah berasal dari denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan kontrak pembayaran komputer kepada CV Berkah Cahaya Abadi, dipotong sesuai SPM dengan nomor 2055/PK.13/2017 tanggal 10 Oktober 2017 dan nomor SP2D 170191303020644 tanggal 12 Oktober 2017;
- c. Sebesar Rp75.345.633,00 adalah berasal dari denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan termin ke IV Renovasi Ruang Kerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, dipotong sesuai SPM dengan nomor 2753/PK.13/2017 tanggal 4 Desember 2017 dan nomor 170191304020008 tanggal 5 Desember 2017; dan
- d. Sebesar Rp11.420.435 adalah berasal dari denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan termin ke IV pengadaan barang meubelair lantai 10 s.d 12 Gedung Radius Prawiro, dipotong sesuai SPM dengan nomor 3284/PK.13/2017 tanggal 21 Desember 2017 dan nomor 170191301075521 tanggal 27 Desember 2017.

### B.2. BELANJA NEGARA

*Realisasi belanja  
Rp109.881.084.178,00*

Realisasi Belanja Direktorat Jenderal Perimbangan Tahun Anggaran 2017 adalah sebesar Rp109.881.084.178,00 atau 85,17 persen dari pagu belanja dalam DIPA sebesar Rp129.015.096.000,00 setelah dikurangi pengembalian belanja sebesar Rp520.412.551,00.

Realisasi belanja Tahun Anggaran 2017 mengalami kenaikan sebesar Rp19.229.391.179,00 atau 21,21 persen dari realisasi belanja 31 Desember 2016 sebesar Rp90.651.692.999,00.

Persentase realisasi belanja terhadap pagu belanja Tahun Anggaran 2017 mengalami kenaikan dari 71,90 persen di 31 Desember 2016 menjadi 85,17 persen di Tahun Anggaran 2017.

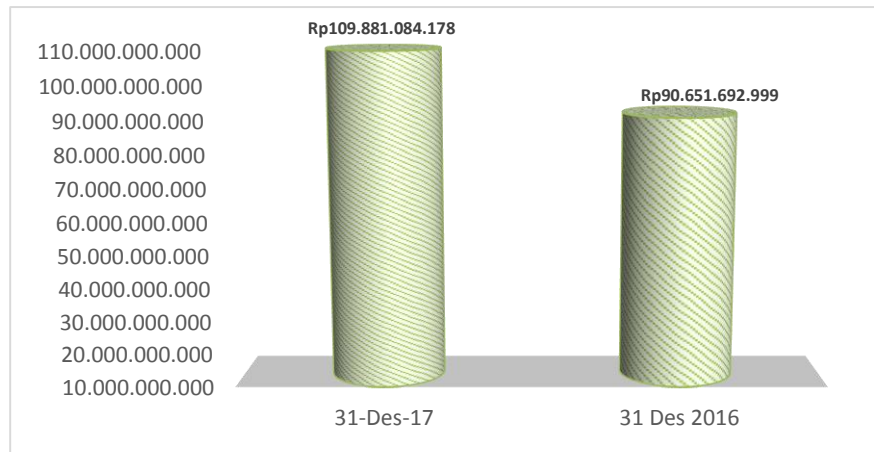
Belanja dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip penghematan dan efisiensi, namun tetap menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Kerja Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Belanja Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menurut jenis belanja meliputi belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal.

Perbandingan antara realisasi Tahun Anggaran 2017 dan 31 Desember TA 2016 dapat dilihat pada Tabel 7 dan Grafik 1 berikut.

**Tabel 7**  
**Perbandingan Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2017 dan 31 Desember 2016**  
(dalam rupiah)

Uraian	31-Des-17	31-Des-16	Kenaikan/Penurunan	%
Realisasi Belanja	109.881.084.178	90.651.692.999	19.229.391.179	21,21%
<b>Total</b>	<b>109.881.084.178</b>	<b>90.651.692.999</b>	<b>19.229.391.179</b>	<b>21,21%</b>

**Grafik 1**  
**Perbandingan Realisasi Belanja TA 2017 dan 31 Desember 2016**  
(dalam rupiah)



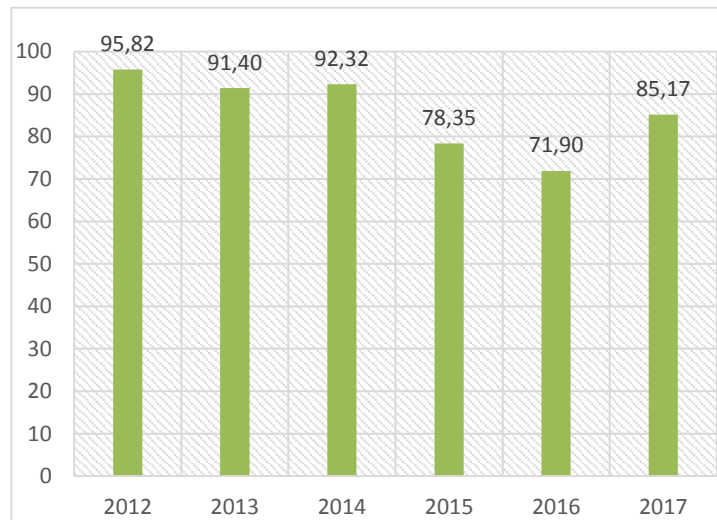
Perkembangan pagu, realisasi, dan persentase realisasi belanja TA 2012 sampai dengan 2016 dan Tahun Anggaran 2017 dapat dilihat pada Tabel 8 dan grafik 2 berikut:

**Tabel 8**  
**Perbandingan Pagu dan Realisasi Belanja TA 2012–2017**  
(dalam rupiah)

Tahun	Pagu	Realisasi (Rp)	%
<b>2012</b>	117.463.308.000	112.558.982.775	95,82%
<b>2013</b>	121.738.090.000	111.265.447.424	91,40%
<b>2014</b>	107.299.994.000	72.417.132.539	92,32%
<b>2015</b>	165.163.319.000	129.413.591.230	78,35%
<b>2016</b>	126.078.440.000	90.651.692.999	71,90%
<b>2017</b>	129.015.096.000	109.881.084.178	85,17%

Grafik 2

Perbandingan Persentase Realisasi Belanja TA 2012-2017



Realisasi Belanja menurut jenis belanja disajikan pada tabel 9 berikut.

Tabel 9

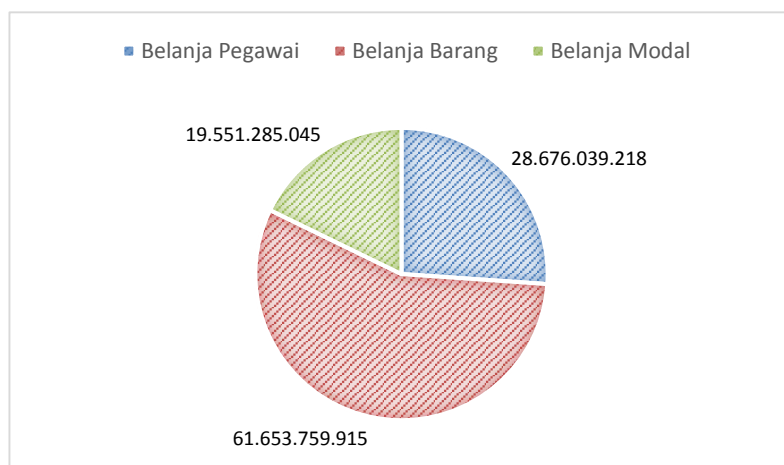
Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja Tahun Anggaran 2017  
(dalam rupiah)

Uraian	Pagu	Realisasi	%
Belanja Pegawai	34.632.363.000	28.676.039.218	82,80%
Belanja Barang	73.087.438.000	61.653.759.915	84,36%
Belanja Modal	21.295.295.000	19.551.285.045	91,81%
<b>Total</b>	<b>129.015.096.000</b>	<b>109.881.084.178</b>	<b>85,17%</b>

Komposisi Belanja berdasarkan jenis belanja untuk TA 2017 sebagaimana tampak pada tabel 8 dan dapat digambarkan pada grafik 3 berikut:

Grafik 3

Komposisi Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja Tahun Anggaran 2017



Realisasi belanja Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan per kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2017 disajikan dalam tabel 10 berikut:

Tabel 10

Realisasi Belanja Per Kegiatan Tahun Anggaran 2017

KODE	URAIAN KEGIATAN	PAGU	REALISASI	%
1687	Perumusan Kebijakan, Bimbingan Teknis, dan Pengelolaan Transfer ke Daerah	7.860.222.000	6.928.863.222	88,15%
1688	Perumusan Kebijakan, Pemantauan dan Evaluasi di Bidang Pendanaan Daerah dan Ekonomi Daerah, serta Pengembangan Sistem Informasi Keuangan Daerah	4.688.042.000	4.246.498.642	90,58%
1689	Perumusan Kebijakan, Bimbingan Teknis, Monitoring dan Evaluasi di Bidang PDRD	8.234.057.000	6.365.730.923	77,31%
1690	Perumusan Kebijakan, Bimbingan Teknis, Monitoring dan Evaluasi di Bidang Pembiayaan dan Kapasitas Daerah	14.415.728.000	10.609.201.714	73,59%
1691	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan	93.817.047.000	81.730.789.677	87,12%
<b>TOTAL</b>		<b>129.015.096.000</b>	<b>109.881.084.178</b>	<b>85,17%</b>

**B.2.1. Belanja Pegawai**

Realisasi Belanja  
Pegawai  
Rp28.676.039.218,00

Belanja Pegawai adalah belanja kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2017 meliputi: Belanja Gaji dan Tunjangan PNS dan Belanja Lembur.

Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2017 adalah sebesar Rp28.676.039.218,00 atau 82,80 persen dari pagu yang ditetapkan dalam DIPA TA 2017 sebesar Rp34.632.363.000. Apabila dibandingkan dengan realisasi 31 Desember 2016, realisasi Belanja Pegawai 31 Desember 2017 mengalami kenaikan sebesar Rp57.359.244,00 atau 0,20 persen.

Rincian Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2017 dapat dilihat pada tabel 11 berikut.

Tabel 11

Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2017  
(dalam rupiah)

Uraian	Pagu	Realisasi	%
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	33.123.854.000	27.923.043.218	84,30%
Belanja Lembur	1.508.509.000	752.996.000	49,92%
<b>Total</b>	<b>34.632.363.000</b>	<b>28.676.039.218</b>	<b>82,80%</b>

Perbandingan antara realisasi belanja pegawai 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 dapat dilihat pada Tabel 12 berikut.

Tabel 12

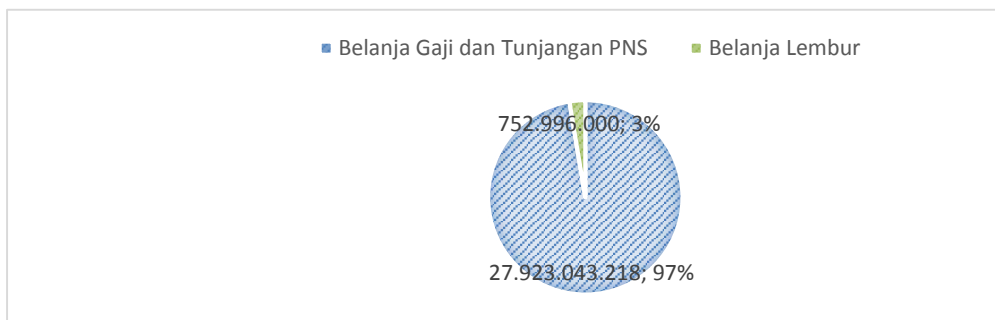
Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai TA 2017 dan 31 Desember 2016  
(dalam rupiah)

Uraian	31-Des-17	31-Des-16	Kenaikan / Penurunan	%
Belanja Gaji dan Tunjangan PN	27.995.514.989	26.874.734.214	1.120.780.775	4,17%
Belanja Lembur	752.996.000	1.767.367.000	(1.014.371.000)	-57,39%
<b>Jumlah Belanja Bruto</b>	<b>28.748.510.989</b>	<b>28.642.101.214</b>	<b>106.409.775</b>	<b>0,37%</b>
Pengembalian Belanja	72.471.771	23.421.240	49.050.531	209,43%
<b>Jumlah Belanja Netto</b>	<b>28.676.039.218</b>	<b>28.618.679.974</b>	<b>57.359.244</b>	<b>0,20%</b>

Komposisi Belanja Pegawai TA 2017 dapat digambarkan dalam Grafik 4 berikut.

Grafik 4

Komposisi Realisasi Belanja Pegawai TA 2017



Perbandingan persentase realisasi belanja pegawai 31 Desember TA 2012 sampai dengan TA 2017 dapat dilihat pada Tabel 13 dan grafik 5 berikut:

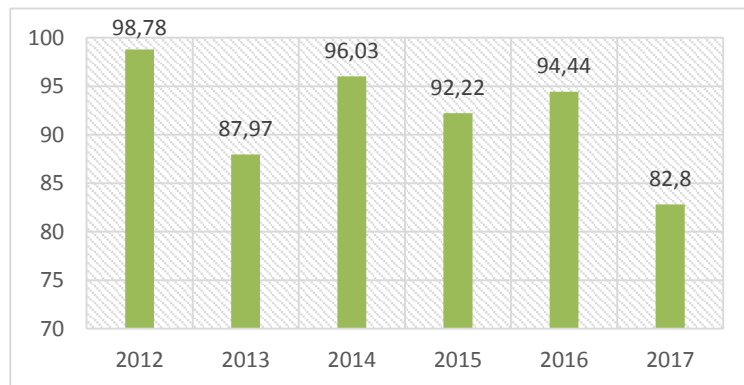
Tabel 13

Perbandingan Pagu dan Realisasi Belanja Pegawai TA 2012 – 2017  
(dalam rupiah)

Tahun	Pagu	Realisasi (Rp)	%
2012	21.986.792.000	21.717.789.216	98,78%
2013	26.471.459.000	23.287.897.850	87,97%
2014	25.549.693.000	24.534.563.500	96,03%
2015	29.226.711.000	26.953.010.980	92,22%
2016	30.303.861.000	28.618.679.974	94,44%
2017	34.632.363.000	28.676.039.218	82,80%

Grafik 5

Perbandingan Persentase Realisasi Belanja Pegawai TA 2012 – 2017





Realisasi Belanja  
Barang  
Rp61.653.759.915,00

### B.2.2. Belanja Barang

Belanja Barang adalah pengeluaran untuk menampung pembelian barang dan jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan, dan pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat dan belanja perjalanan.

Realisasi Belanja Barang Tahun Anggaran 2017 adalah sebesar Rp61.653.759.915,00 yang berarti 84,36 persen dari pagu yang ditetapkan dalam DIPA TA 2017 sebesar Rp73.087.438.000,00.

Apabila dibandingkan dengan 31 Desember 2016, realisasi Belanja Barang Tahun Anggaran 2017 mengalami kenaikan sebesar Rp6.243.267.296,00 atau 11,27 persen.

Rincian Belanja Barang TA 2017 adalah sebagai berikut:

**Tabel 14**  
Realisasi Belanja Barang Tahun Anggaran 2017  
(dalam rupiah)

Uraian	Pagu	Realisasi	%
Belanja Barang Operasional	3.582.411.000	3.361.946.229	93,85%
Belanja Barang Non Operasional	15.191.839.000	10.254.683.081	67,50%
Belanja Barang Persediaan	2.343.907.000	2.343.905.237	100,00%
Belanja Jasa	7.670.049.000	6.514.895.432	84,94%
Belanja Pemeliharaan	11.214.818.000	10.696.022.090	95,37%
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	33.084.414.000	28.482.307.846	86,09%
<b>Total</b>	<b>73.087.438.000</b>	<b>61.653.759.915</b>	<b>84,36%</b>

Perbandingan antara realisasi Belanja Barang TA 2017 dan TA 2016 dapat dilihat pada Tabel 15.

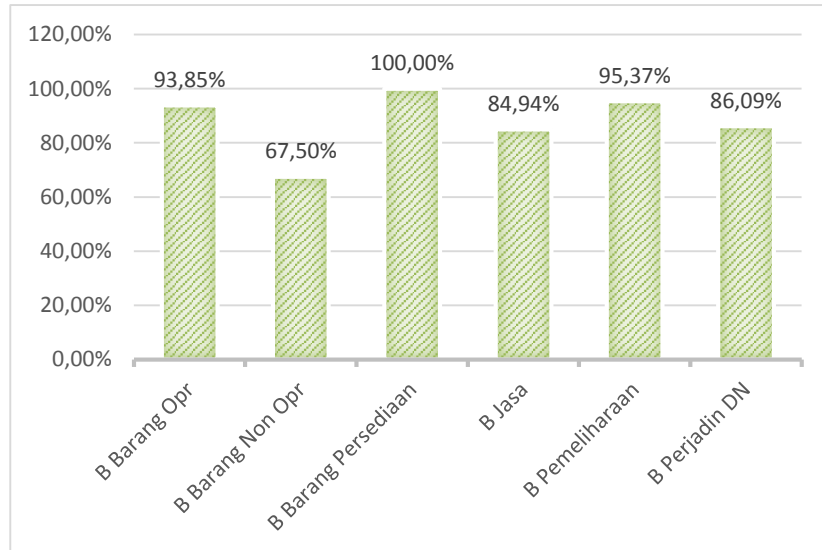
**Tabel 15**  
Perbandingan Realisasi Belanja Barang TA 2017 dan 2016  
(dalam rupiah)

Uraian	31-Des-17	31-Des-16	Kenaikan / (Penurunan)	%
Belanja Barang Operasional	3.362.516.229	2.818.761.501	543.754.728	19,29%
Belanja Barang Non Operasional	10.258.259.381	13.234.923.317	(2.976.663.936)	-22,49%
Belanja Barang Persediaan	2.343.905.237	1.202.003.240	1.141.901.997	95,00%
Belanja Jasa	6.515.180.432	6.494.287.515	20.892.917	0,32%
Belanja Pemeliharaan	10.696.022.090	8.239.246.308	2.456.775.782	29,82%
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	28.925.817.326	23.956.795.341	4.969.021.985	20,74%
<b>Jumlah Belanja Bruto</b>	<b>62.101.700.695</b>	<b>55.946.017.222</b>	<b>6.155.683.473</b>	<b>11,00%</b>
Pengembalian Belanja	447.940.780	535.524.603	(87.583.823)	-16,35%
<b>Jumlah Belanja Netto</b>	<b>61.653.759.915</b>	<b>55.410.492.619</b>	<b>6.243.267.296</b>	<b>11,27%</b>

Komposisi Belanja Barang TA 2017 dapat digambarkan dalam grafik 6.

Grafik 6

Komposisi Realisasi Belanja Barang TA 2017



Perbandingan persentase realisasi belanja barang pada TA 2012 sampai dengan TA 2016 dan TA 2017 dapat dilihat pada Tabel 16 dan grafik 7 berikut:

Tabel 16

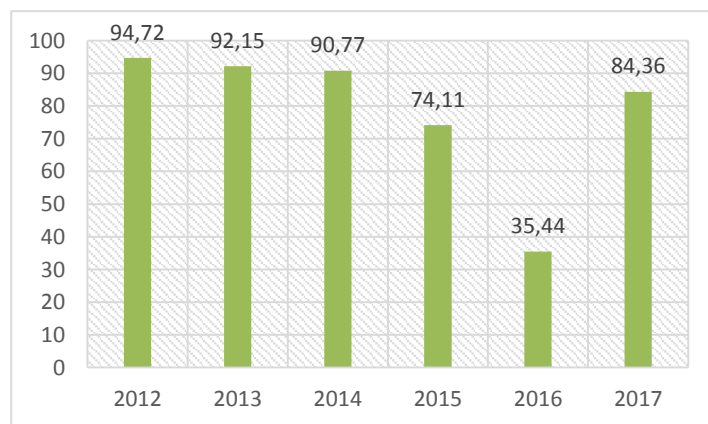
Perbandingan Realisasi Belanja Barang TA 2012–2017

(dalam rupiah)

Tahun	Pagu	Realisasi (Rp)	%
2012	77.326.004.000	73.246.535.455	94,72%
2013	84.642.068.000	77.997.690.157	92,15%
2014	48.877.295.000	44.364.533.066	90,77%
2015	119.249.206.000	88.375.513.725	74,11%
2016	88.434.043.000	55.410.492.619	62,66%
2017	73.087.438.000	61.653.759.915	84,36%

Grafik 7

Perbandingan Persentase Realisasi Belanja Barang TA 2012-2016 dan TA 2017



### B.2.3. Belanja Modal

Realisasi Belanja  
Modal  
Rp19.551.285.045,00

Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Untuk mengetahui apakah suatu belanja dapat dimasukkan sebagai Belanja Modal atau tidak, maka perlu diketahui definisi aset tetap atau aset lainnya dan kriteria kapitalisasi aset tetap.

Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2017 adalah sebesar Rp19.551.285.045,00 atau 91,81 persen dari pagu yang ditetapkan dalam DIPA TA 2017 sebesar Rp21.295.295.000,00. Apabila dibandingkan dengan 31 Desember 2016, realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2017 mengalami kenaikan sebesar Rp12.928.764.039,00 atau 1,95 persen.

Kenaikan realisasi Belanja Modal disebabkan karena terjadinya realisasi Belanja Modal lainnya atas pekerjaan renovasi Gedung Radius Prawiro milik Setjen Kemenkeu serta belanja modal peralatan dan mesin berupa peralatan fasilitas perkantoran, peralatan pengolah data dan komunikasi serta kendaraan operasional jabatan roda-4 sejumlah 5 unit. Rincian Realisasi Belanja Modal TA 2017 adalah sebagai berikut:

Tabel 17

**Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2017**  
(dalam rupiah)

Uraian	Pagu	Realisasi	%
Belanja Modal Peralatan & Mesin	14.186.080.000	12.831.909.121	90,45%
Bel. Modal Gedung & Bangunan	0	0	0,00%
Belanja Modal Lainnya	7.109.215.000	6.719.375.924	94,52%
<b>Total</b>	<b>21.295.295.000</b>	<b>19.551.285.045</b>	<b>91,81%</b>

Perbandingan antara realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2017 dan 2016 dapat dilihat pada tabel 18 berikut.

Tabel 18

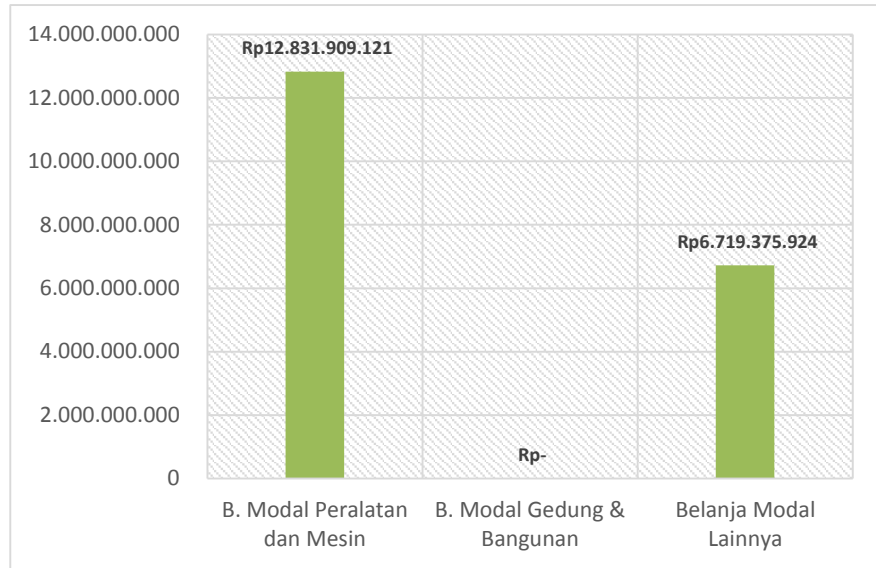
**Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2017 dan 2016**  
(dalam rupiah)

Uraian	31-Des-17	31-Des-16	Kenaikan / (Penurunan)	%
B. Modal Peralatan dan Mesin	12.831.909.121	1.834.888.221	10.997.020.900	5,99%
B. Modal Gedung & Bangunan	0	0	0	0,00%
Belanja Modal Lainnya	6.719.375.924	4.787.632.185	1.931.743.739	0,40%
<b>Jumlah Belanja Bruto</b>	<b>19.551.285.045</b>	<b>6.622.520.406</b>	<b>12.928.764.639</b>	<b>1,95%</b>
Pengembalian Belanja	0	0	0	0,00%
<b>Jumlah Belanja Netto</b>	<b>19.551.285.045</b>	<b>6.622.520.406</b>	<b>12.928.764.639</b>	<b>1,95%</b>

Komposisi Belanja Modal TA 2017 dapat digambarkan dalam grafik 8.

Grafik 8

Komposisi Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2017



Perbandingan persentase realisasi belanja modal TA 2012 sampai dengan TA 2017 dapat dilihat pada Tabel 19 dan grafik 9 berikut:

Tabel 19

Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2012-2016 dan TA 2017  
(dalam rupiah)

Tahun	Pagu	Realisasi (Rp)	%
2012	18.150.512.000	17.594.658.104	96,94%
2013	10.624.563.000	9.979.859.417	93,93%
2014	4.016.543.000	3.518.035.973	87,59%
2015	16.687.402.000	14.085.066.525	84,41%
2016	1.515.066.000	6.622.520.406	90,22%
2017	21.295.295.000	19.551.285.045	91,81%

Grafik 9

Perbandingan Persentase Realisasi Belanja Modal TA 2012-2017



#### B.2.4. Pengembalian Belanja Negara

*Pengembalian  
Belanja Negara  
Rp520.412.551,00*

Pengembalian Belanja adalah penerimaan kembali dari kelebihan pembayaran yang telah dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran yang menjadi hak negara dan harus disetor ke Kas Umum Negara. Pengembalian Belanja tersebut tidak boleh digunakan untuk keperluan apapun dengan alasan apapun dan harus disetor ke Kas Negara pada bulan berkenaan.

Pengembalian Belanja berasal dari ketiga jenis belanja yaitu Belanja Pegawai, Belanja Barang, dan Belanja Modal. Pengembalian Belanja dibukukan sesuai dengan akun belanjanya.

Realisasi Pengembalian Belanja per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 yaitu sebesar Rp520.412.551,00 dan Rp558.945.843,00. Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar Rp38.533.292,00.

**Tabel 20**  
**Perbandingan Realisasi Pengembalian Belanja TA 2017 dan 2016**  
**(Dalam Rupiah)**

Akun	Uraian Pengembalian	31-Des-17	31-Des-16	Selisih
5111	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	72.471.771,00	20.842.990,00	51.628.781,00
5122	Belanja Uang Lembur	0,00	2.578.250,00	(2.578.250,00)
<b>Jumlah Pengembalian Belanja Pegawai</b>		<b>72.471.771,00</b>	<b>23.421.240,00</b>	<b>49.050.531,00</b>
5211	Belanja Honor Operasional	570.000,00	810.000,00	(240.000,00)
5212	Belanja Barang Non Opr	3.576.300,00	29.360.000,00	(25.783.700,00)
5218	Belanja Persediaan	0,00	0,00	0,00
5221	Belanja Jasa	285.000,00	0,00	285.000,00
5231	Belanja Pemeliharaan	0,00	0,00	0,00
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri	443.509.480,00	505.354.603,00	(61.845.123,00)
<b>Jumlah pengembalian Belanja Barang</b>		<b>447.940.780,00</b>	<b>535.524.603,00</b>	<b>(87.583.823,00)</b>
5321	Belanja Modal Peralatan dan	0,00	0,00	0,00
5361	Belanja Modal Lainnya	0,00	0,00	0,00
<b>Jumlah Pengembalian Belanja Modal</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total</b>		<b>520.412.551</b>	<b>558.945.843</b>	<b>(38.533.292,00)</b>

#### C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

*Perbandingan  
Neraca TA 2017  
dan TA 2016*

Neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai Aset, Kewajiban, dan Ekuitas Dana pada tanggal tertentu. Perbandingan Neraca Per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 disajikan pada Tabel 21 berikut ini:

**Tabel 21**  
**Perbandingan Neraca TA 2017 dan TA 2016**  
**(Dalam Rupiah)**

Perkiraan	31-Des-17	31-Des-16	Kenaikan/ (Penurunan)
Aset	24.312.444.535	18.373.292.305	5.939.152.230
Kewajiban	56.899.227	89.239.524	(32.340.297)
Ekuitas	24.255.545.308	18.284.052.781	5.971.492.527

Penjelasan setiap pos-pos dalam Neraca sebagai berikut:

### C.1 ASET

Aset

Rp24.312.444.535,00

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan darimana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh serta dapat diukur dalam satuan uang.

Nilai Aset per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 masing-masing sebesar Rp24.312.444.535,00 dan Rp18.373.292.305,00 mengalami kenaikan sebesar Rp5.939.152.230,00 atau 32,32 persen.

Tabel 22

#### Perbandingan Nilai Aset 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016

(Dalam Rupiah)

Per 31 Des 2017	Per 31 Des 2016	Kenaikan/Penurunan	Persen
24.312.444.535,00	18.373.292.305,00	5.939.152.230,00	32,32%

Rincian Aset per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 disajikan pada Tabel 23 berikut ini:

Tabel 23

#### Rincian Aset per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016

(Dalam Rupiah)

Perkiraan	31-Des-17	31-Des-16	Kenaikan /(Penurunan)	%
Aset Lancar	2.258.890.806	2.122.903.063	135.987.743	6,41%
Aset Tetap	21.838.093.144	16.024.314.817	5.813.778.327	36,28%
Aset Lainnya	215.460.585	226.074.425	(10.613.840)	-4,69%
<b>Jumlah Aset</b>	<b>24.312.444.535</b>	<b>18.373.292.305</b>	<b>5.939.152.230</b>	<b>32,32%</b>

#### C.1.1 ASET LANCAR

##### C.1.1.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di

Bendahara

Pengeluaran

Rp0,00

Kas di Bendahara Pengeluaran adalah uang muka kerja dari KPPN yang diberikan kepada Satuan Kerja berupa uang persediaan untuk melaksanakan aktivitasnya sebelum pengeluaran yang dilakukan dipertanggungjawabkan. Kas di Bendahara Pengeluaran dipertanggungjawabkan pada akhir periode akuntansi.

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

##### C.1.1.2 Kas Lainnya dan Setara Kas

Kas Lainnya

dan Setara Kas

Rp0,00

Berdasarkan Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan No. S-4280/PB/2009 tanggal 28 Juli 2009 perihal Pengungkapan Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran, terdapat aturan mengenai perlakuan akuntansi jika terdapat Kas yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran selain Uang Persediaan. Kas tersebut dimasukkan sebagai Kas Lainnya dan Setara Kas. Kas Lainnya dan Setara Kas diantaranya berasal dari 1) Jasa giro yang belum disetor ke Kas Negara; 2) Pungutan Pajak yang belum disetor ke Kas Negara; 3) Dana Hibah langsung yang ditampung dalam rekening Bendahara Pengeluaran; 4) Pengembalian Belanja yang belum disetor ke Kas Negara, dan 5) Dana pada Rekening Bendahara Pengeluaran yang berasal dari SPM-LS untuk keperluan seperti Honor dan SPD yang belum dibayarkan.

Kas Lainnya dan Setara Kas (Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran) merupakan kas yang dikuasai, dikelola, dan dibawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa uang selain Uang Persediaan (UP) yang belum dipertanggungjawabkan atau disetorkan ke Kas Negara.

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp44.754,00.

### C.1.1.3 Piutang Bukan Pajak

*Piutang Bukan Pajak*  
*Rp50.733.906,00*

Piutang Bukan Pajak adalah piutang yang timbul dari pungutan pendapatan Negara selain Pajak.

Nilai Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 masing-masing sebesar Rp50.733.906,00 dan Rp52.552.088,00 merupakan piutang yang berasal dari pendapatan negara bukan pajak yang belum dilunasi sampai dengan tanggal neraca, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 24

Data Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

Klasifikasi Piutang	Debitor	Saldo Awal	Perubahan (+/-)	Saldo Akhir 31 Des 2017	Pegolongan				Nilai Agunan Barang Sitaan
					Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	
PNBP	PT Aek Sibundong Nauli	41.603.288	1.818.182	39.785.106	-	-	-	39.785.106	-
	PT Sanjaya Wiratama	10.948.800	-	10.948.800	-	-	-	10.948.800	-
Jumlah Total		52.552.088	1.818.182	50.733.906	-	-	-	50.733.906	-
Penyisihan Piutang Takterttagih								50.733.906	

Penyelesaian piutang bukan pajak yang telah diserahkan kepada Biro Perencanaan dan Keuangan Kemenkeu untuk diteruskan kepada PUPN/DJKN melalui surat Nomor S-161/MK.1/2014 tanggal 24 Februari 2014.

Pada tanggal 14 Februari 2017, telah diterima pelunasan piutang PT Aek Sibundong sebesar Rp1.818.182,00 dengan NTPN nomor BB2CF364F24NKI39.

Penyetoran pelunasan piutang PT Aek Sibundong Nauli tersebut menggunakan kode akun Pendapatan Piutang TGR (423921), sedangkan piutang dimaksud sebelumnya dicatat sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak. Untuk itu, dalam rangka pengungkapan yang memadai, telah dilakukan koreksi akun pendapatan melalui KPPN ke akun Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya (423129).

### C.1.1.4. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Bukan Pajak

*Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Bukan Pajak*  
*Rp50.733.906,00*

Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Bukan Pajak per tanggal 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 masing-masing sebesar Rp50.733.906,00 dan Rp52.552.088,00 yang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Piutang Bukan Pajak yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang.

Penurunan nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih Tahun Anggaran 2017 dibanding Tahun Anggaran 2016 terjadi karena adanya koreksi atas nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih sebesar nilai pelunasan piutang PT Aek Sibundong Nauli. Koreksi ini dilakukan karena nilai Akumulasi Penyisihan dan Beban Penyisihan atas piutang PT Aek Sibundong Nauli telah diakui sepenuhnya pada periode pelaporan sebelumnya.

Koreksi atas Penyisihan Piutang Tak Tertagih dilakukan dengan mendebit akun Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang PNB (116211) dan mengkredit akun Beban penyisihan (594211) sebesar Rp1.818.182,00 melalui menu Jurnal Umum di aplikasi SAIBA.

#### C.1.1.5. Persediaan

Persediaan  
Rp2.258.890.806,00

Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Aset Lancar berupa Persediaan menggunakan data yang berasal dari hasil pencatatan mutasi masuk dan mutasi keluar pada aplikasi persediaan per 31 Desember 2017.

Jumlah Persediaan per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 masing-masing sebesar Rp2.258.890.806,00 dan Rp2.122.858.309.

Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Rincian saldo persediaan per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 per jenis persediaan dapat dilihat pada tabel 25 berikut.

Tabel 25

Rincian Persediaan Per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016

Akun	Uraian	31-Des-17	31 Des 2016	Kenaikan/ Penurunan
117111	Barang Konsumsi	2.203.056.576	2.107.158.071	95.898.505
117113	Bahan untuk Pemeliharaan	55.834.230	15.700.283	40.133.947
<b>Total</b>		<b>2.258.890.806</b>	<b>2.122.858.354</b>	<b>136.032.452</b>

Terdapat nilai persediaan yang belum diregister sebesar Rp1.806. Hal tersebut timbul karena pembulatan nilai persediaan. Untuk menormalisasi nilai tersebut, telah dilakukan koreksi atas nilai tersebut ke penyesuaian Nilai Persediaan.

#### C.1.2. ASET TETAP

Aset Tetap  
Rp21.838.093.144,00

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Jumlah Aset Tetap per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 masing-masing sebesar Rp21.838.093.144,00 dan Rp16.024.314.817,00 yang merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas.

Rincian aset tetap menurut jenis aset tetap dapat dilihat pada tabel 26 dan grafik 10 berikut.



Tabel 26

Komposisi Aset Tetap Per Jenis Aset

No.	Uraian	31-Des-17	31-Des-16	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Peralatan dan Mesin	93.840.931.062	60.263.306.055	33.577.625.007	55,72%
2	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	990.851.337	0	4.857.111.500	100,00%
3	Aset Tetap Lainnya	789.445.090	5.586.982.947	(4.797.537.857)	-85,87%
4	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0	49.896.000	(49.896.000)	-100,00%
5	Akumulasi Penyusutan	(73.783.134.345)	(49.875.870.185)	(23.907.264.160)	47,93%
<b>Jumlah</b>		<b>21.838.093.144</b>	<b>16.024.314.817</b>	<b>5.813.778.327</b>	<b>36,28%</b>

Posisi aset tetap pada neraca dibandingkan dengan posisi aset tetap pada SIMAK-BMN dapat dilihat pada tabel 27 berikut:

Tabel 27

Daftar Perbandingan Aset Tetap Antara Neraca dan SIMAK-BMN per 31 Desember 2017

No	Uraian	Neraca	SIMAK	Kenaikan/ (Penurunan)
1	Peralatan dan Mesin	93.840.931.062	93.840.931.062	-
2	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	990.851.337	990.851.337	-
3	Aset Tetap Lainnya	789.445.090	789.445.090	-
4	Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	-	-
5	Akumulasi Penyusutan	(73.783.134.345)	(73.783.134.345)	-
<b>Jumlah</b>		<b>21.838.093.144</b>	<b>21.838.093.144</b>	<b>-</b>

Grafik 10

Komposisi Aset Tetap



C.1.2.1. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan Mesin  
Rp93.840.931.062,00

Jumlah Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 masing-masing sebesar Rp93.840.931.062,00 dan Rp60.263.306.055,00. Dengan demikian terjadi kenaikan sebesar Rp33.577.625.007,00 atau 55,72 persen.

Tabel 28

Perbandingan Posisi Peralatan dan Mesin

Uraian	31-Des-17	31-Des-16	Kenaikan / Penurunan	%
Peralatan dan Mesin	93.840.931.062	60.263.306.055	33.577.625.007	55,72
<b>Jumlah</b>	<b>93.840.931.062</b>	<b>60.263.306.055</b>	<b>(33.577.625.007)</b>	<b>(55,72)</b>

Mutasi/perubahan Peralatan dan Mesin dapat disajikan pada tabel 29 berikut.

Tabel 29

Mutasi / Perubahan Peralatan dan Mesin

<b>Saldo Awal 31 Desember 2016</b>	<b>60.263.306.055</b>
<b>Mutasi Tambah</b>	<b>37.838.612.131</b>
Pembelian	12.255.026.318
Transfer Masuk	25.006.703.010
Pengembangan Nilai Aset	576.882.803
<b>Mutasi Kurang</b>	<b>4.260.987.124</b>
Penghentian Aset dari Penggunaan	4.260.987.124
<b>Saldo 31 Desember 2017</b>	<b>93.840.931.062</b>
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2017	73.440.302.129
<b>Nilai Buku per 31 Desember 2017</b>	<b>20.400.628.933</b>

Mutasi tambah Peralatan dan Mesin berupa pembelian berasal dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin sampai dengan 31 Desember 2017 dan transfer masuk sejumlah 16 Unit P.C dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan sesuai dengan BAST-24/PB.1/2017 tanggal 14 Februari 2017.

**C.1.2.2. Aset Tetap Lainnya**

*Aset Tetap Lainnya  
Rp789.445.090,00*

Jumlah Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 masing-masing sebesar Rp789.445.090,00 dan Rp5.586.982.947,00 yang merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Dengan demikian, bila dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2016, aset tetap lainnya tahun 2017 telah mengalami penurunan sebesar Rp4.797.537,00 atau minus 86 persen.

Tabel 30

Perbandingan Posisi Aset Tetap Lainnya

Uraian	31-Des-17	31-Des-16	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Aset Tetap Lainnya	789.445.090	5.586.982.947	-4.797.537.857	-86%
<b>Jumlah</b>	<b>789.445.090</b>	<b>5.586.982.947</b>	<b>-4.797.537.857</b>	<b>-86%</b>

Mutasi/perubahan Aset Tetap Lainnya disajikan pada tabel 31 berikut.

Tabel 31

Mutasi/Perubahan Aset Tetap Lainnya

<b>Saldo Awal per 31 Desember 2016</b>	<b>5.586.982.947</b>
<b>Mutasi Tambah</b>	<b>6.693.244.324</b>
Pembelian	59.573.643
Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	6.633.670.681
<b>Mutasi Keluar</b>	<b>11.490.782.181</b>
Transfer Keluar	11.432.514.703
Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas	58.267.478
<b>Saldo Akhir 31 Desember 2017</b>	<b>789.445.090</b>

**C.1.2.3. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap**

*Akumulasi  
Penyusutan Aset  
Tetap  
Rp-73.783.134.345,00*

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing Rp-73.783.134.345,00 dan Rp-49.875.870.185,00. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan

penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP).

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2017 tersaji sebagai berikut:

Tabel 32

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1.	Peralatan dan Mesin	93.840.931.062	73.440.302.129	20.400.628.933
2.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	990.851.337	342.832.216	648.019.121

**C.1.3. ASET LAINNYA**

Aset Lainnya  
Rp215.460.585,00

Jumlah Aset Lainnya Per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 masing-masing sebesar Rp215.460.585,00 dan Rp226.074.425,00.

**C.1.3.1. Aset Tak Berwujud**

Aset Tak Berwujud  
Rp1.858.698.385,00

Jumlah Aset Tak Berwujud Per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 masing-masing sebesar Rp1.858.698.385,00 dan Rp1.782.670.785,00.

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Aset Tak Berwujud pada DJPK berupa *software* yang digunakan untuk menunjang operasional kantor.

Tabel 33

Perbandingan Aset Tak Berwujud Per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016

Uraian	31-Des-17	31 Des 2016	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Software	1.718.988.485	1.642.960.885	76.027.600	4,63
Lisensi	139.709.900	139.709.900	0	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>1.858.698.385</b>	<b>1.782.670.785</b>	<b>76.027.600</b>	<b>4,26</b>

Ada kenaikan senilai Rp76.027.600,00 karena adanya pembelian aset tak berwujud berupa 2 unit *software*.

**C.1.3.2. Aset Lain-lain**

Aset Lain-lain  
Rp1.934.248.104,00

Jumlah Aset Lain-lain Per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 masing-masing sebesar Rp1.934.248.104,00 dan Rp3.887.372.050,00 yang merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional DJPK serta dalam proses penghapusan dari BMN.

Aset lain-lain berupa aset tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan.

Tabel 34

Perbandingan Posisi Aset Lain-Lain TA 2017 dan 2016

Uraian	31-Des-17	31 Des 2016	Kenaikan/ (Penurunan)
Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	1.510.449.080	3.887.372.050	(2.376.922.970)
Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan	423.799.024	0	423.799.024
<b>TOTAL</b>	<b>1.934.248.104</b>	<b>3.887.372.050</b>	<b>(1.953.123.946)</b>

Mutasi/perubahan Aset Lain-lain disajikan pada tabel berikut :

Tabel 35

Mutasi/Perubahan Aset Lain-lain

<b>Saldo Awal per 31 Desember 2016</b>	<b>3.887.372.050</b>
<b>Mutasi Tambah</b>	<b>2.206.550.259</b>
Penghentian aset tetap pemerintah	2.206.550.259
<b>Mutasi Kurang</b>	<b>4.159.674.205</b>
Usulan Barang Rusak Berat ke Pengelola (BMN yang Dihentikan)	4.159.674.205
<b>Saldo Akhir</b>	<b>1.934.248.104</b>
Akumulasi Penyusutan	1.934.248.104
<b>Nilai Buku Per 31 Desember 2017</b>	<b>0</b>

Terdapat mutasi tambah berupa penghentian aset tetap pemerintah sebesar Rp2.206.550.259,- yang terdiri dari 70 unit barang rusak berat sesuai dengan Surat Keterangan Sekretaris Ditjen Perimbangan Keuangan nomor KET-4/PK.1/2017 tanggal 18 April 2017 dan 285 unit peralatan dan mesin sesuai dengan KET-5/PK.1/2017 tanggal 10 Oktober 2017.

Transaksi Usulan Barang Rusak Berat ke Pengelola (BMN yang dihentikan) dengan nilai sebesar Rp4.159.674.205,00 tersebut merupakan penghapusan atas 458 unit peralatan dan mesin (yang telah dihentikan) kondisi rusak berat yang telah disetujui penghapusannya melalui surat Kepala Biro Perlengkapan nomor S-895/SJ.7/2017 tanggal 9 Mei 2017 dan telah dihapuskan sesuai dengan Surat Keputusan Sekretaris Ditjen Perimbangan Keuangan nomor **KEP-19/PK.1/2017** tanggal 7 Agustus 2017 serta Usulan Barang Rusak Berat ke Pengelola (BMN yang dihentikan) sejumlah **283 unit** peralatan mesin berdasarkan Surat Kepala Biro Perlengkapan nomor **S-1965/SJ.7/2017** tanggal 21 November 2017.

Tabel 36

Daftar Perbandingan Aset Lain-lain Antara  
Neraca dan SIMAK-BMN per 31 Desember 2017

Uraian	SAIBA	SIMAK	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	1.510.449.080	1.510.449.080	0	0,00
Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan	423.799.024	423.799.024	0	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>1.934.248.104</b>	<b>1.934.248.104</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

## C.2. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

### C.2.1 Utang Kepada Pihak Ketiga

*Utang Kepada  
Pihak Ketiga  
Rp56.899.227,00*

Jumlah Utang Kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 masing-masing sebesar Rp56.899.227,00 dan Rp89.239.524,00. Saldo tersebut merupakan saldo kewajiban kepada pegawai pada Tahun Anggaran 2017 yang belum dibayarkan.

Tabel 37

Perbandingan Utang Kepada Pihak Ketiga

31-Des-17	31-Des-16	Kenaikan/(Penurunan)
56.899.227	89.239.524	(32.340.297)

## D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

### D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

*Pendapatan  
PNBP  
Rp88.401.206,00*

Jumlah Pendapatan PNBP untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp88.401.206,00 dan Rp5.417.734,00. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp82.983.472,00. Rincian PNBP disajikan pada tabel 38 di bawah ini.

Tabel 38

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak TA 2017 dan TA 2016

Uraian	31-Des-17	31-Des-16	NAIK (TURUN)
Pendapatan Penjualan Lainnya	1.150.000	0	1.150.000
Pendapatan Denda Keterlambatan Pekerjaan Pemerintah	87.010.820	5.351.498	81.659.322
Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan	240.386	66.236	174.150
<b>Jumlah</b>	<b>88.401.206</b>	<b>5.417.734</b>	<b>82.983.472</b>

Pendapatan Operasional berasal dari Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya yang berasal dari Pendapatan Penjualan Lainnya, Pendapatan Denda Keterlambatan Pekerjaan Pemerintah dan Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro).

### D.2 Beban Pegawai

*Beban Pegawai  
Rp28.650.967.351,00*

Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Jumlah Beban Pegawai pada 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp28.650.967.351,00 dan Rp28.700.651.068,00. Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar Rp106.582.944,00 atau 37 persen.

Tabel 39

Rincian Beban Pegawai 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016

Uraian Jenis Beban	31-Des-17	31-Des-16	NAIK (TURUN) %
Beban Gaji Pokok PNS	19.717.192.580	19.199.044.900	2,70%
Beban Pembulatan Gaji PNS	289.923	265.906	9,03%
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	1.400.688.730	1.387.890.634	0,92%
Beban Tunj. Anak PNS	428.205.474	421.427.320	1,61%
Beban Tunj. Struktural PNS	1.344.175.000	1.381.731.966	-2,72%
Beban Tunj. Fungsional PNS	398.160.000	43.680.000	811,54%
Beban Tunj. PPh PNS	70.870.305	211.456.272	-66,48%
Beban Tunj. Beras PNS	1.103.825.640	1.076.836.320	2,51%
Beban Uang Makan PNS	2.772.434.811	2.563.069.000	8,17%
Beban Tunj. Umum PNS	659.358.888	650.460.000	1,37%
Beban Uang Lembur	755.586.000	1.764.788.750	-57,19%
<b>Jumlah</b>	<b>28.650.787.351</b>	<b>28.700.651.068</b>	<b>-0,17%</b>

### D.3 Beban Persediaan

*Beban Persediaan*  
*Rp2.153.428.740,00*

Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan.

Jumlah Beban Persediaan pada Tahun Anggaran 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp2.153.428.740,00 dan Rp1.609.495.410,00. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp543.933.330,00 atau 33,80 persen.

Tabel 40

Rincian Beban Persediaan Tahun Anggaran 2017 dan 31 Desember 2016

Uraian Jenis Beban	31-Des-17	31-Des-16	NAIK (TURUN)%
Beban Persediaan Konsumsi	2.153.428.740	1.609.495.410	33,80%
<b>Jumlah</b>	<b>2.153.428.740</b>	<b>1.609.495.410</b>	<b>33,80%</b>

### D.4 Beban Barang dan Jasa

*Beban Barang dan  
Jasa*  
*Rp31.409.600.897,00*

Beban Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas.

Jumlah Beban Jasa pada Tahun Anggaran 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp31.409.600.897,00 dan Rp28.749.332.804,00. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp2.660.268.093,00 atau 9,25 persen.

Rincian Beban Jasa untuk Tahun Anggaran 2017 dan Tahun Anggaran 2016 adalah sebagai berikut:

Tabel 41

Rincian Beban Jasa Tahun Anggaran 2017 dan 31 Desember 2016

Uraian Jenis Beban	31-Dec-17	31-Dec-16	NAIK (TURUN)%
Beban Keperluan Perkantoran	817,412,944	695,277,701	100%
Beban Pengiriman Surat Dinas dan Pos Pusat	596,792,100	367,261,500	62.50%
Beban Honor Operasional Satker	748,600,000	590,840,000	26.70%
Beban Barang Operasional Lainnya	1,199,141,185	1,164,572,300	2.97%
Beban Bahan	6,144,471,885	8,634,564,617	-28.84%
Beban Honor Output Kegiatan	3,758,547,500	3,216,161,300	16.86%
Beban Barang Non Operasional Lainnya	351,663,696	126,131,120	178.81%
Beban Langganan Telepon	89,321,722	110,432,215	-19.12%
Beban Jasa Konsultan	11,686,344,585	7,596,118,321	53.85%
Beban Sewa	1,332,448,295	864,943,395	54.05%
Beban Jasa Profesi	3,212,736,961	3,829,160,000	-16.10%
Beban Jasa Lainnya	1,472,120,024	1,553,870,335	-5.26%
<b>Jumlah</b>	<b>31,409,600,897</b>	<b>28,749,332,804</b>	<b>9.25%</b>

#### D.5. Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan  
Rp10.717.190.548,00

Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal .

Beban Pemeliharaan Tahun Anggaran 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp10.717.190.548,00 dan Rp8.345.501.415,00. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp2.371.689.133,00 atau 28,42 persen.

Rincian beban pemeliharaan Tahun Anggaran 2017 dan Tahun Anggaran 2016 adalah sebagai berikut:

Tabel 42

Rincian Beban Pemeliharaan Tahun Anggaran 2017 dan 31 Desember 2016

Uraian Jenis Beban	31-Dec-17	31-Dec-16	NAIK (TURUN)%
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	7,292,265,140	5,902,916,913	23.54%
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1,771,990,125	2,088,635,735	-15.16%
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1,379,052,825	49,000,000	2714.39%
Beban Pemeliharaan Lainnya	252,714,000	198,693,660	100.00%
Beban Persediaan Bahan Untuk Pemeliharaan	21,168,458	106,255,107	-80.08%
<b>Jumlah</b>	<b>10,717,190,548</b>	<b>8,345,501,415</b>	<b>28.42%</b>

#### D.6. Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan  
Dinas  
Rp28.482.307.846,00

Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan.

Beban Perjalanan Dinas Tahun Anggaran 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp28.482.307.846,00 dan Rp23.451.440.738,00. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp5.030.867.108,00 atau 21,45 persen.

Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk Tahun Anggaran 2017 dan Tahun Anggaran 2016 adalah sebagai berikut:

Tabel 43

Rincian Beban Perjalanan Dinas Tahun Anggaran 2017 dan 31 Desember 2016

Uraian Jenis Beban	31-Dec-17	31-Dec-16	NAIK (TURUN)%
Beban Perjalanan Biasa	10,825,452,069	12,607,769,881	-14.14%
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	492,370,000	257,136,000	91.48%
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	10,140,939,900	8,828,283,000	14.87%
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	7,023,545,877	1,758,251,857	299.46%
<b>Jumlah</b>	<b>28,482,307,846</b>	<b>23,451,440,738</b>	<b>21.45%</b>

### D.7 Beban Penyusutan dan Amortisasi

*Beban Penyusutan dan Amortisasi*  
*Rp6.217.885.641,00*

Beban Penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud.

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Tahun Anggaran 2017 dan Tahun Anggaran 2016 adalah masing-masing sebesar Rp6.217.885.641,00 dan Rp6.842.807.728,00. Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar Rp1.468.289.149,00 atau 21,46 persen.

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Tahun Anggaran 2017 dan Tahun Anggaran 2016 adalah sebagai berikut:

Tabel 44

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun Anggaran 2017 dan TA 2016

URAIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	TA 2017	31-Dec-16	NAIK (TURUN)%
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	6.117.076.312	6.737.933.568	-9,21%
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	-	-	-
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, Jaringan	14.643.889	-	-
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	-	-	-
<b>Jumlah Penyusutan</b>	<b>6.131.720.201</b>	<b>6.737.933.568</b>	<b>-9,00%</b>
Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud	86.071.940	100.415.990	-
Beban Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Kegiatan Operasional	93.500	4.458.170	-
<b>Jumlah Amortisasi</b>	<b>86.165.440</b>	<b>104.874.160</b>	<b>-17,84%</b>
<b>Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi</b>	<b>6.217.885.641</b>	<b>6.842.807.728</b>	<b>-9,13%</b>

### D.8 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

*Beban Penyisihan Piutang*  
*Rp-1.818.182,00*

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih adalah beban penyisihan piutang PNBK, yang timbul dari koreksi atas penerimaan pelunasan kembali piutang PT Aek Sibundong sebesar Rp1.818.182,00. Koreksi tersebut dilakukan untuk menormalisasi nilai akumulasi penyisihan piutang tak tertagih yang telah diakui pada periode sebelumnya.

Akibat koreksi tersebut, saldo Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih menjadi minus dan hal tersebut dibolehkan berdasarkan Peraturan Dirjen Perbendaharaan nomor PER-43/PB/2015 tentang Pedoman Akuntansi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/ Lembaga.



Surplus /Defisit  
dari Kegiatan Non  
Operasional  
Rp1.545.700.665,  
00

### D.9 Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas.

Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Tahun Anggaran 2017 dan Tahun Anggaran 2016 adalah sebagai berikut:

Tabel 45

#### Rincian Kegiatan Non Operasional Tahun Anggaran 2017 dan Tahun Anggaran 2016

Uraian	TA 2017	TA 2016
<b>Kegiatan Non Operasional</b>		
<b>Surplus/Defisit Dari Pelepasan Aset Non Lancar</b>		
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	1,486,828,263	436,651,000
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	476,000	33,802,035
<b>Jumlah Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar</b>	<b>1,486,352,263</b>	<b>402,848,965</b>
<b>Surplus/(Defisit) Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya</b>		
Pendapatan Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	143,654,182	205,147,226
Beban Dari kegiatan Non Operasional Lainnya	84,305,780	7,784,745
<b>Jumlah Surplus/Defisit dari kegiatan Non Operasional Lainnya</b>	<b>59,348,402</b>	<b>197,362,481</b>
<b>Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya</b>	<b>1,545,700,665</b>	<b>600,211,446</b>

Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar sebesar Rp1.486.828.263,00 berasal dari hasil lelang penjualan BMN rusak berat pada tanggal 20 Juni 2017 dengan nomor NTPN F314D7AV94790KU9.

Beban Pelepasan Aset non Lancar sebesar Rp476.000,00 berasal dari penghapusan 458 unit peralatan dan mesin dengan nilai sisa buku sebesar Rp.0,-

Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya sebesar Rp143.654.182,00 berasal dari Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL sebesar Rp30.982.380,00, Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL sebesar Rp61.641.564,00, dan Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan sebesar Rp51.030.625,00 .

### E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

#### E.1 Ekuitas Awal

Ekuitas Awal  
Rp18.284.052.781,00

Nilai ekuitas pada tanggal 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp18.284.052.781,00 dan Rp30.876.963.071,00. Nilai ekuitas awal berasal dari nilai ekuitas akhir pada 31 Desember 2016.

Tabel 46

#### Perbandingan Nilai Ekuitas Awal

Per 31 Des 2017	Per 31 Des 2016	Kenaikan/Penurunan
18.284.052.781,00	30.876.963.071,00	(12.592.910.290,00)

#### E.2 Surplus (Defisit) LO

Defisit LO  
Rp-  
105.995.460.970,00

Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, sampai dengan pos luar biasa.

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp-105.995.460.970,00 dan Rp-97.093.599.974,00.

Tabel 47  
Perbandingan Surplus/Defisit LO

Per 31 Des 2017	Per 31 Des 2016	Kenaikan/Penurunan
-105,995,460,970.00	-97,093,599,974.00	-8,901,860,996

*Dampak Kumulatif  
Perubahan  
Kebijakan  
Akuntansi/  
Kesalahan  
Rp 0,00*

### E.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

*Penyesuaian Nilai  
Aset Rp0,00*

#### E.3.1 Penyesuaian Nilai Aset

Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir. Tidak ada Penyesuaian Nilai Aset untuk periode 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016.

*Koreksi Nilai  
Persediaan Rp0,00*

#### E.3.2 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi tambah atas nilai persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp0 dan Rp0

*Selisih Revaluasi  
Aset Tetap Rp0,00*

#### E.3.3 Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

*Koreksi Aset Tetap  
Non Revaluasi  
Rp0,00*

#### E.3.4 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016. adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp312.909.849,00. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

*Koreksi Lain-Lain  
Rp0,00*

#### E.3.5 Koreksi Lain-Lain

Koreksi Lain-lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0. Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang.

*Transaksi Antar  
Ekuitas  
Rp111.966.953.497,00*

### E.4 Transaksi Antar Entitas

Transaksi antar Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp111.966.953.497,00 dan Rp84.187.779.835,00.

Tabel 48

Rincian Nilai Transaksi Antar Ekuitas

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Diterima dari Entitas Lain	-1,727,983,827
Ditagihkan ke Entitas Lain	109,881,084,178
Transfer Masuk	3,961,023,264
Transfer Keluar	-11,432,514,703
Pengesahan Hibah Langsung	11,285,344,585
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	0
<b>Jumlah</b>	<b>111,966,953,497</b>

Pengesahan Hibah Langsung senilai total Rp11.285.344.585,00 dapat dirinci sebagai berikut:

1. Proyek TRANSFORMASI dari GIZ nomor register hibah 23H15VSG dengan BAST pada Februari 2017 senilai Rp1.919.287.246;
2. Proyek KOMPAK dari Pemerintah Australia dengan nomor register hibah 2VBMBK3A dengan BAST pada April 2017 senilai Rp1.955.367.804 dan pada Desember 2017 senilai Rp6.170.295.303; dan
3. Proyek TRAMPIL dari ADB dengan nomor register 2ACMEWZA dengan BAST pada November 2017 senilai Rp1.240.394.232.

**E.5 Ekuitas Akhir**

*Ekuitas Akhir*  
*Rp24.255.545.308,00*

Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp24.255.545.308,00 dan Rp18.284.052.781,00

Tabel 49

Perbandingan Nilai Ekuitas Akhir Tahun Anggaran

Per 31 Des 2017	Per 31 Des 2016	Kenaikan/Penurunan
24,255,545,308.00	18,284,052,781.00	5,971,492,527.00

# LAPORAN KEUANGAN PENDUKUNG



**KEMENTERIAN KEUANGAN**  
REPUBLIK INDONESIA

**RINCIAN NILAI PEROLEHAN, AKUMULASI PENYUSUTAN,  
DAN NILAI BUKU**

**PERHITUNGAN AKUMULASI PENYUSUTAN  
PERALATAN DAN MESIN**

Kode	Uraian	Nilai	Penyusutan	Nilai Buku
3.01.03	Alat Bantu	10.028.989.647	8.301.598.167	1.727.391.480
3.02.01	Alat Angkutan Darat Bermotor	11.872.715.500	4.366.261.987	7.506.453.513
3.02.02	Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	35.241.000	29.741.000	5.500.000
3.03.02	Alat Bengkel Tak Bermesin	20.390.730	5.853.219	14.537.511
3.03.03	Alat Ukur	45.000.000	27.000.000	18.000.000
3.05.01	Alat Kantor	11.216.483.801	9.508.120.031	1.708.363.770
3.05.02	Alat Rumah Tangga	20.549.106.763	17.037.882.887	3.511.223.876
3.06.01	Alat Studio	1.512.809.557	1.108.062.674	404.746.883
3.06.02	Alat Komunikasi	276.335.705	145.759.248	130.576.457
3.06.03	Peralatan Pemancar	46.860.000	4.686.000	42.174.000
3.06.04	Peralatan Komunikasi Navigasi	7.700.000	769.998	6.930.002
3.07.01	Alat Kedokteran	5.934.500	1.780.350	4.154.150
3.08.01	Unit Alat Laboratorium	20.470.000	20.470.000	0
3.10.01	Komputer Unit	10.268.389.977	8.183.706.157	2.084.683.820
3.10.02	Peralatan Komputer	25.686.622.782	23.192.974.912	2.493.647.870
3.15.04	Alat Kerja Penerbangan	1.918.450.400	1.246.992.760	671.457.640
3.17.01	Unit Peralatan Proses/Produksi	377.535.800	306.747.839	70.787.961
	<b>Jumlah</b>	<b>93.889.036.162</b>	<b>73.488.407.229</b>	<b>20.400.628.933</b>

### PERHITUNGAN AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP YANG TIDAK DIGUNAKAN DALAM OPERASIONAL PEMERINTAH

No	Jenis Aset Tetap	Masa Manfaat	Nilai Bruto	Akumulasi Penyusutan s.d 31 Des 2017	Nilai Buku per 31 Des 2017
3.01.03	Alat Bantu	7	-	-	-
3.02.01	Alat Angkutan Darat Bermotor	7	3.359.006.060	3.359.006.060	-
3.02.02	Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	2	-	-	-
3.03.03	Alat Ukur	5	-	-	-
3.05.01	Alat Kantor	5	325.369.174	325.369.174	-
3.05.02	Alat Rumah Tangga	5	110.344.050	110.344.050	-
3.06.01	Alat Studio	5	219.940.356	219.940.356	-
3.06.02	Alat Komunikasi	5	19.571.200	19.571.200	-
3.10.01	Komputer Unit	4	578.532.832	578.532.832	-
3.10.02	Peralatan Komputer	4	232.972.368	232.972.368	-
<b>Jumlah</b>			<b>4.845.736.040</b>	<b>4.845.736.040</b>	<b>-</b>

### PERHITUNGAN AMORTISASI ASET TAKBERWUJUD

No	Jenis Aset tetap	Masa Manfaat	Nilai Bruto	Amortisasi s.d 31 Des 2017	Nilai Buku per 31 Des 2017
162151	Software				
8.01.01.01.001	Software Komputer		1.642.960.885	1.565.460.885	77.500.000
162161	Lisensi				
8.01.01.01.002	Lisensi		139.709.900	41.912.970	97.796.930
166162	Aset Takberwujud Tidak Digunakan				
8.01.01.01.001	Software		423.799.024	423.799.024	-
<b>Jumlah</b>			<b>2.206.469.809</b>	<b>2.031.172.879</b>	<b>175.296.930</b>

## LAPORAN KEUANGAN EREKON & LK

### NERACA PERCOBAAN AKRUAL

NERACA PERCOBAAN  
TINGKAT SATUAN KERJA  
PER DESEMBER 2017  
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN  
UNIT ORGANISASI : 06 DITJEN PERIMBANGAN KEUANGAN  
WILAYAH/PROVINSI : 0100 DKI JAKARTA  
SATUAN KERJA : 440941 DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN

Tgl. Cetak 20/04/2018 9:23 AM  
lap\_neraca\_percobaan\_akrual\_satker

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBIT	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	111611	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0
0.0	111613	Kas di Bendahara Pengeluaran TUP	0	0
0.0	111821	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	0	0
0.0	115211	Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak	50,733,906	0
0.0	116211	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang PNBP	0	50,733,906
0.0	117111	Barang Konsumsi	2,203,056,576	0
0.0	117113	Bahan untuk Pemeliharaan	55,834,230	0
0.0	117911	Persediaan yang Belum Diregister	0	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	93,840,931,062	0
0.0	132211	Peralatan dan Mesin Belum Diregister	0	0
0.0	134113	Jaringan	990,851,337	0
0.0	135111	Aset Tetap Renovasi	0	0
0.0	135121	Aset Tetap Lainnya	789,445,090	0
0.0	136111	Konstruksi Dalam pengerjaan	0	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	73,440,302,129
0.0	137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	0	342,832,216
0.0	162151	Software	1,718,988,485	0
0.0	162161	Lisensi	139,709,900	0
0.0	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	1,510,449,080	0
0.0	166113	Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan	423,799,024	0
0.0	166411	Aset Lainnya yang Belum Diregister	0	0
0.0	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	0	1,510,449,080
0.0	169315	Akumulasi Amortisasi Software	0	1,594,339,335
0.0	169316	Akumulasi Amortisasi Lisensi	0	48,898,465
0.0	169318	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan	0	423,799,024
0.0	212111	Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar	0	56,899,227
0.0	212112	Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	0	0
0.0	212191	Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya	0	0
0.0	219511	Uang Muka dari KPPN	0	0
0.0	219961	Utang Pajak Bendahara Pengeluaran yang Belum Disetor	0	0
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	109,881,084,178
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	1,727,983,827	0
0.0	313211	Transfer Keluar	11,432,514,703	0
0.0	313221	Transfer Masuk	0	3,961,023,264
0.0	391111	Ekuitas	0	18,284,052,781
0.0	391131	Pengesahan Hibah Langsung	0	11,285,344,585
3.0	423119	Pendapatan Penjualan Lainnya	0	1,150,000
3.0	423129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	1,486,828,263

NERACA PERCOBAAN  
TINGKAT SATUAN KERJA  
PER DESEMBER 2017  
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN  
UNIT ORGANISASI : 06 DITJEN PERIMBANGAN KEUANGAN  
WILAYAH/PROVINSI : 0100 DKI JAKARTA  
SATUAN KERJA : 440941 DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN

Tgl. Cetak 20/04/2018 9:23 AM  
lap\_neraca\_percobaan\_akrual\_satker

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBIT	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	423221	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	0	240,386
3.0	423752	Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	87,010,820
3.0	423951	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	30,982,380
3.0	423952	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	61,641,564
3.0	491511	Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	0	51,030,238
3.0	511111	Beban Gaji Pokok PNS	19,726,200,380	0
3.1	511111	Pengembalian Beban Gaji Pokok PNS	0	9,007,800
3.0	511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	291,787	0
3.1	511119	Pengembalian Beban Pembulatan Gaji PNS	0	1,864
3.0	511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	1,401,245,330	0
3.1	511121	Pengembalian Beban Tunj. Suami/Istri PNS	0	556,600
3.0	511122	Beban Tunj. Anak PNS	428,428,114	0
3.1	511122	Pengembalian Beban Tunj. Anak PNS	0	222,640
3.0	511123	Beban Tunj. Struktural PNS	1,384,530,000	0
3.1	511123	Pengembalian Beban Tunj. Struktural PNS	0	40,355,000
3.0	511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	398,160,000	0
3.0	511125	Beban Tunj. PPh PNS	70,872,060	0
3.1	511125	Pengembalian Beban Tunj. PPh PNS	0	1,755
3.0	511126	Beban Tunj. Beras PNS	1,103,825,640	0
3.0	511129	Beban Uang Makan PNS	2,772,434,811	0
3.0	511151	Beban Tunjangan Umum PNS	681,865,000	0
3.1	511151	Pengembalian Beban Tunjangan Umum PNS	0	22,326,112
3.0	512211	Beban Uang Lembur	755,586,000	0
3.0	521111	Beban Keperluan Perkantoran	817,412,944	0
3.0	521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	596,792,100	0
3.0	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	749,170,000	0
3.1	521115	Pengembalian Beban Honor Operasional Satuan Kerja	0	570,000
3.0	521119	Beban Barang Operasional Lainnya	1,199,141,185	0
3.0	521211	Beban Bahan	6,147,335,685	0
3.1	521211	Pengembalian Beban Bahan	0	2,863,800
3.0	521213	Beban Honor Output Kegiatan	3,759,260,000	0
3.1	521213	Pengembalian Beban Honor Output Kegiatan	0	712,500
3.0	521219	Beban Barang Non Operasional Lainnya	351,663,696	0
3.0	522112	Beban Langganan Telepon	89,321,722	0
3.0	522131	Beban Jasa Konsultan	11,686,344,585	0
3.0	522141	Beban Sewa	1,332,448,295	0
3.0	522151	Beban Jasa Profesi	3,213,021,961	0
3.1	522151	Pengembalian Beban Jasa Profesi	0	285,000



NERACA PERCOBAAN  
TINGKAT SATUAN KERJA  
PER DESEMBER 2017  
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN  
UNIT ORGANISASI : 06 DITJEN PERIMBANGAN KEUANGAN  
WILAYAH/PROVINSI : 0100 DKI JAKARTA  
SATUAN KERJA : 440941 DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN

Tgl. Cetak 20/04/2018 9:23 AM  
lap\_neraca\_percobaan\_akrual\_satker

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	522191	Beban Jasa Lainnya	1,472,120,024	0
3.0	523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	7,292,265,140	0
3.0	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1,771,990,125	0
3.0	523129	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1,379,052,825	0
3.0	523199	Beban Pemeliharaan Lainnya	252,714,000	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Biasa	11,052,384,995	0
3.1	524111	Pengembalian Beban Perjalanan Biasa	0	226,932,926
3.0	524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	492,370,000	0
3.0	524114	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	10,144,092,400	0
3.1	524114	Pengembalian Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	0	3,152,500
3.0	524119	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	7,236,969,931	0
3.1	524119	Pengembalian Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	0	213,424,054
3.0	591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	6,117,076,312	0
3.0	591313	Beban Penyusutan Jaringan	14,643,889	0
3.0	592115	Beban Amortisasi Software	72,100,950	0
3.0	592116	Beban Amortisasi Lisensi	13,970,990	0
3.0	592222	Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	93,500	0
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	2,153,428,740	0
3.0	593113	Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	21,168,458	0
3.0	593311	Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	84,305,780	0
3.0	594211	Beban Penyisihan Piutang PNB	0	1,818,182
3.0	596111	Beban Kerugian Pelepasan Aset	476,000	0
<b>JUMLAH</b>			<b>223,120,872,574</b>	<b>223,120,872,574</b>

## NERACA PERCOBAAN KAS

NERACA PERCOBAAN  
TINGKAT SATUAN KERJA  
PER DESEMBER 2017  
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN  
UNIT ORGANISASI : 06 DITJEN PERIMBANGAN KEUANGAN  
WILAYAH/PROVINSI : 0100 DKI JAKARTA  
SATUAN KERJA : 440941 DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN

Tgl. Cetak 20/04/2018 9:19 AM  
lap\_neraca\_percobaan\_kas\_satker

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	115612	Piutang dari KPPN	19,134,011,822	0
0.0	219711	Utang Kepada KUN	1,727,983,827	0
2.0	511111	Allotment Belanja Gaji Pokok PNS	0	23,587,353,000
2.0	511119	Allotment Belanja Pembulatan Gaji PNS	0	296,000
2.0	511121	Allotment Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	0	1,631,597,000
2.0	511122	Allotment Belanja Tunj. Anak PNS	0	456,794,000
2.0	511123	Allotment Belanja Tunj. Struktural PNS	0	1,451,258,000
2.0	511124	Allotment Belanja Tunj. Fungsional PNS	0	403,050,000
2.0	511125	Allotment Belanja Tunj. PPh PNS	0	123,862,000
2.0	511126	Allotment Belanja Tunj. Beras PNS	0	1,407,439,000
2.0	511129	Allotment Belanja Uang Makan PNS	0	3,225,185,000
2.0	511151	Allotment Belanja Tunjangan Umum PNS	0	837,020,000
2.0	512211	Allotment Belanja Uang Lembur	0	1,508,509,000
2.0	521111	Allotment Belanja Keperluan Perkantoran	0	885,130,000
2.0	521114	Allotment Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	0	614,181,000
2.0	521115	Allotment Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	0	765,480,000
2.0	521119	Allotment Belanja Barang Operasional Lainnya	0	1,317,620,000
2.0	521211	Allotment Belanja Bahan	0	10,792,134,000
2.0	521213	Allotment Belanja Honor Output Kegiatan	0	4,008,920,000
2.0	521219	Allotment Belanja Barang Non Operasional Lainnya	0	390,785,000
2.0	521811	Allotment Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	0	2,343,907,000
2.0	522112	Allotment Belanja Langganan Telepon	0	104,040,000
2.0	522131	Allotment Belanja Jasa Konsultan	0	411,300,000
2.0	522141	Allotment Belanja Sewa	0	1,527,290,000
2.0	522151	Allotment Belanja Jasa Profesi	0	3,890,500,000
2.0	522191	Allotment Belanja Jasa Lainnya	0	1,736,919,000
2.0	523111	Allotment Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0	7,438,620,000
2.0	523121	Allotment Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	0	1,948,367,000
2.0	523129	Allotment Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	1,575,094,000
2.0	523199	Allotment Belanja Pemeliharaan Lainnya	0	252,737,000
2.0	524111	Allotment Belanja Perjalanan Biasa	0	13,324,114,000
2.0	524113	Allotment Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	0	499,266,000
2.0	524114	Allotment Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	0	11,414,920,000
2.0	524119	Allotment Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	0	7,846,114,000
2.0	532111	Allotment Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	14,186,080,000
2.0	536111	Allotment Belanja Modal Lainnya	0	136,528,000
2.0	536121	Allotment Belanja Penambahan Nilai Aset Tetap Lainnya dan/atau Aset Lainnya	0	6,972,687,000
3.0	423119	Pendapatan Penjualan Lainnya	0	1,150,000

NERACA PERCOBAAN  
TINGKAT SATUAN KERJA  
PER DESEMBER 2017  
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN  
UNIT ORGANISASI : 06 DITJEN PERIMBANGAN KEUANGAN  
WILAYAH/PROVINSI : 0100 DKI JAKARTA  
SATUAN KERJA : 440941 DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN

Tgl. Cetak 20/04/2018 9:19 AM  
lap\_neraca\_percobaan\_kas\_satker

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	423129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	1,486,828,263
3.0	423221	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	0	285,140
3.0	423752	Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	88,829,002
3.0	423951	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	30,982,380
3.0	423952	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	61,641,564
3.0	423953	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	0	58,267,478
3.0	511111	Belanja Gaji Pokok PNS	19,746,248,700	0
3.1	511111	Pengembalian Belanja Gaji Pokok PNS	0	9,007,800
3.0	511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	292,792	0
3.1	511119	Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PNS	0	1,864
3.0	511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	1,402,563,480	0
3.1	511121	Pengembalian Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	0	556,800
3.0	511122	Belanja Tunj. Anak PNS	428,758,656	0
3.1	511122	Pengembalian Belanja Tunj. Anak PNS	0	222,640
3.0	511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	1,384,530,000	0
3.1	511123	Pengembalian Belanja Tunj. Struktural PNS	0	40,355,000
3.0	511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	398,160,000	0
3.0	511125	Belanja Tunj. PPh PNS	70,861,910	0
3.1	511125	Pengembalian Belanja Tunj. PPh PNS	0	1,755
3.0	511126	Belanja Tunj. Beras PNS	1,103,825,640	0
3.0	511129	Belanja Uang Makan PNS	2,778,408,811	0
3.0	511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	681,865,000	0
3.1	511151	Pengembalian Belanja Tunjangan Umum PNS	0	22,326,112
3.0	512211	Belanja Uang Lembur	752,996,000	0
3.0	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	817,412,944	0
3.0	521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	596,792,100	0
3.0	521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	749,170,000	0
3.1	521115	Pengembalian Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	0	570,000
3.0	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	1,199,141,185	0
3.0	521211	Belanja Bahan	6,147,335,685	0
3.1	521211	Pengembalian Belanja Bahan	0	2,863,800
3.0	521213	Belanja Honor Output Kegiatan	3,759,260,000	0
3.1	521213	Pengembalian Belanja Honor Output Kegiatan	0	712,500
3.0	521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	351,663,696	0
3.0	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	2,343,905,237	0
3.0	522112	Belanja Langganan Telepon	96,590,152	0
3.0	522131	Belanja Jasa Konsultan	401,000,000	0
3.0	522141	Belanja Sewa	1,332,448,295	0

NERACA PERCOBAAN  
TINGKAT SATUAN KERJA  
PER DESEMBER 2017  
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN  
UNIT ORGANISASI : 06 DITJEN PERIMBANGAN KEUANGAN  
WILAYAH/PROVINSI : 0100 DKI JAKARTA  
SATUAN KERJA : 440941 DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN

Tgl. Cetak 20/04/2018 9:19 AM  
lap\_neraca\_percobaan\_kas\_satker

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	522151	Belanja Jasa Profesi	3,213,021,961	0
3.1	522151	Pengembalian Belanja Jasa Profesi	0	285,000
3.0	522191	Belanja Jasa Lainnya	1,472,120,024	0
3.0	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	7,292,265,140	0
3.0	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1,771,990,125	0
3.0	523129	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1,379,052,825	0
3.0	523199	Belanja Pemeliharaan Lainnya	252,714,000	0
3.0	524111	Belanja Perjalanan Biasa	11,052,384,995	0
3.1	524111	Pengembalian Belanja Perjalanan Biasa	0	226,932,926
3.0	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	492,370,000	0
3.0	524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	10,144,092,400	0
3.1	524114	Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	0	3,152,500
3.0	524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	7,236,969,931	0
3.1	524119	Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	0	213,424,054
3.0	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	12,831,909,121	0
3.0	536111	Belanja Modal Lainnya	135,601,243	0
3.0	536121	Belanja Penambahan Nilai Aset Tetap Lainnya dan/atau Aset Lainnya	6,583,774,681	0
<b>JUMLAH</b>			<b>131,263,492,378</b>	<b>131,263,492,378</b>

## NERACA

NERACA  
TINGKAT SATUAN KERJA  
PER DESEMBER 2017 DAN 2016  
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN  
UNIT ORGANISASI : 06 DITJEN PERIMBANGAN KEUANGAN  
KDUAPPAW : 015060199KP INSTANSI PUSAT  
KODE SATKER : 440941 DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN

Tgl. Cetak 20/04/2018 9:21 AM  
lap\_neraca\_satker\_komparatif --rekon17

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2017	2016	Jumlah	%
1	2	3	4	5
<b>ASET</b>				
<b>ASET LANCAR</b>				
Kas Lainnya dan Setara Kas	0	44,754	(44,754)	(100.00)
Piutang Bukan Pajak	50,733,906	52,552,088	(1,818,182)	(3.46)
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	(50,733,906)	(52,552,088)	1,818,182	(3.46)
Persediaan	2,258,890,806	2,122,858,309	136,032,497	6.41
<b>JUMLAH ASET LANCAR</b>	<b>2,258,890,806</b>	<b>2,122,903,063</b>	<b>135,987,743</b>	<b>6.41</b>
<b>ASET TETAP</b>				
Peralatan dan Mesin	93,840,931,062	60,263,306,055	33,577,625,007	55.72
Jalan, Irigasi dan Jaringan	990,851,337	0	990,851,337	0.00
Aset Tetap Lainnya	789,445,090	5,586,982,947	(4,797,537,857)	(85.87)
Konstruksi Dalam Pengerjaan	0	49,896,000	(49,896,000)	(100.00)
AKUMULASI PENYUSUTAN	(73,783,134,345)	(49,875,870,185)	(23,907,264,160)	47.93
<b>JUMLAH ASET TETAP</b>	<b>21,838,093,144</b>	<b>16,024,314,817</b>	<b>5,813,778,327</b>	<b>36.28</b>
<b>ASET LAINNYA</b>				
Aset Tak Berwujud	1,858,698,385	1,782,670,785	76,027,600	4.26
Aset Lain-lain	1,934,248,104	3,887,372,050	(1,953,123,946)	(50.24)
AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA	(3,577,485,904)	(5,443,968,410)	1,866,482,506	(34.29)
<b>JUMLAH ASET LAINNYA</b>	<b>215,460,585</b>	<b>226,074,425</b>	<b>(10,613,840)</b>	<b>(4.69)</b>
<b>JUMLAH ASET</b>	<b>24,312,444,535</b>	<b>18,373,292,305</b>	<b>5,939,152,230</b>	<b>32.32</b>
<b>KEWAJIBAN</b>				
<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>				
Utang kepada Pihak Ketiga	56,899,227	89,239,524	(32,340,297)	(36.24)
<b>JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>	<b>56,899,227</b>	<b>89,239,524</b>	<b>(32,340,297)</b>	<b>(36.24)</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>	<b>56,899,227</b>	<b>89,239,524</b>	<b>(32,340,297)</b>	<b>(36.24)</b>
<b>EKUITAS</b>				
<b>EKUITAS</b>				
Ekuitas	24,255,545,308	18,284,052,781	5,971,492,527	32.66
<b>JUMLAH EKUITAS</b>	<b>24,255,545,308</b>	<b>18,284,052,781</b>	<b>5,971,492,527</b>	<b>32.66</b>
<b>JUMLAH EKUITAS</b>	<b>24,255,545,308</b>	<b>18,284,052,781</b>	<b>5,971,492,527</b>	<b>32.66</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>	<b>24,312,444,535</b>	<b>18,373,292,305</b>	<b>5,939,152,230</b>	<b>32.32</b>

## LAPORAN REALISASI ANGGARAN

LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2017 DAN 2016  
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN 015  
ESELON I : DITJEN PERIMBANGAN KEUANGAN 06  
WILAYAH/PROVINSI : INSTANSI PUSAT 0199  
SATUAN KERJA : DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN 440941

Kode Lap : LRA.F.S  
Tanggal : 19/04/18 10:21 PM  
Halaman : 1  
Pig ID : lap\_ira\_face\_satker\_komparatif --

NO	URAIAN	2017				2016			
		ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH)	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH)	%
1	2	3	4	5	6	3	4	5	6
<b>A</b>	<b>PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH</b>				0				0
	PENERIMAAN PERPAJAKAN	0	0	0	0	0	0	0	0
	PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	1,727,983,827	(1,727,983,827)	0	0	594,159,891	(594,159,891)	0
	PENERIMAAN HIBAH	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH</b>	<b>0</b>	<b>1,727,983,827</b>	<b>(1,727,983,827)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>594,159,891</b>	<b>(594,159,891)</b>	<b>0</b>
<b>B</b>	<b>BELANJA</b>				0				0
	BELANJA PEGAWAI	34,632,363,000	28,676,039,218	5,956,323,782	83	30,303,861,000	28,618,679,974	1,685,181,026	94
	BELANJA BARANG	73,087,438,000	61,653,759,915	11,433,678,085	84	88,434,043,000	55,410,492,619	33,023,550,381	63
	BELANJA MODAL	21,295,295,000	19,551,285,045	1,744,009,955	92	7,340,536,000	6,622,520,406	718,015,594	90
	BELANJA PEMBAYARAN KEWAJIBAN UTANG	0	0	0	0	0	0	0	0
	BELANJA SUBSIDI	0	0	0	0	0	0	0	0
	BELANJA HIBAH	0	0	0	0	0	0	0	0
	BELANJA BANTUAN SOSIAL	0	0	0	0	0	0	0	0
	BELANJA LAIN-LAIN	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>JUMLAH BELANJA (B I + B II)</b>	<b>129,015,096,000</b>	<b>109,881,084,178</b>	<b>19,134,011,822</b>	<b>85</b>	<b>126,078,440,000</b>	<b>90,651,692,999</b>	<b>35,426,747,001</b>	<b>83</b>
<b>C</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>				0				0

## LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS  
TINGKAT SATKER  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2017 DAN 2016  
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN  
ESELON I : 06 DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN  
WILAYAH/PROVINSI : 0100 DKI JAKARTA  
JENIS SATUAN KERJA : KP  
SATUAN KERJA : 440941 DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN

Kode Lap : LPE\_SATKER  
Tanggal : 20/04/18 9:22 AM  
Halaman : 1  
Prg ID : lap\_lpe\_satker-rekon17

URAIAN	2017	2016	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	18,284,052,781	30,876,963,071	(12,592,910,290)	-
SURPLUS/DEFISIT-LO	(105,995,460,970)	(97,093,599,974)	(8,901,860,996)	-
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI	0	0	0	-
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	0	312,909,849	(312,909,849)	-
PENYESUAIAN NILAI ASET	0	0	0	-
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	0	0	0	-
SELISIH REVALUASI ASET	0	0	0	-
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	0	312,909,849	(312,909,849)	-
LAIN-LAIN	0	0	0	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	111,966,953,497	84,187,779,835	27,779,173,662	-
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	5,971,492,527	(12,592,910,290)	18,564,402,817	-
EKUITAS AKHIR	24,255,545,308	18,284,052,781	5,971,492,527	-

## LAPORAN OPERASIONAL

LAPORAN OPERASIONAL  
TINGKAT SATUAN KERJA  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2017 DAN 2016  
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015  
ESELON I : 06  
WILAYAH/PROVINSI : 0100  
SATUAN KERJA : 440941  
JENIS SATUAN KERJA : KP

KEMENTERIAN KEUANGAN  
DITJEN PERIMBANGAN KEUANGAN  
DKI JAKARTA  
DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN

Kode Lap : LO.SAT  
Tanggal : 20/04/18 9:23 AM  
Halaman : 1  
Prg ID : lap\_lo\_satker --  
Tgl Data : 20/04/18 9:00 AM

URAIAN	2017	2016	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Cukai	0	0	0	
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	
Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba	0	0	0	
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	88,401,206	5,417,734	82,983,472	1,531.701
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	88,401,206	5,417,734	82,983,472	1,531.701
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	
Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan	88,401,206	5,417,734	82,983,472	1,531.701
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	
Beban Pegawai	28,650,967,351	28,700,651,068	(49,683,717)	(0.173)
Beban Persediaan	2,153,428,740	1,609,495,401	543,933,339	33.795
Beban Barang dan Jasa	31,409,600,897	28,749,332,804	2,660,268,093	9.253
Beban Pemeliharaan	10,717,190,548	8,345,501,415	2,371,689,133	28.419
Beban Perjalanan Dinas	28,482,307,846	23,451,440,738	5,030,867,108	21.452
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	0	0	0	
Beban Bunga	0	0	0	
Beban Subsidi	0	0	0	
Beban Hibah	0	0	0	



LAPORAN OPERASIONAL  
TINGKAT SATUAN KERJA  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2017 DAN 2016  
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN  
ESELON I : 06 DITJEN PERIMBANGAN KEUANGAN Kode Lap : LO.SAT  
WILAYAH/PROVINSI : 0100 DKI JAKARTA Tanggal : 20/04/18 9:23 AM  
SATUAN KERJA : 440941 DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN Halaman : 2  
JENIS SATUAN KERJA : KP Prg ID : lap\_je\_satker --  
Tgl Data : 20/04/18 9:00 AM

URAIAN	2017	2016	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	6,217,885,641	6,842,807,728	(624,922,087)	(9.133)
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	(1,818,182)	0	(1,818,182)	0
Beban Lain-Lain	0	0	0	
<b>JUMLAH BEBAN</b>	<b>107,629,562,841</b>	<b>97,699,229,154</b>	<b>9,930,333,687</b>	<b>10.164</b>
<b>SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL</b>	<b>(107,541,161,635)</b>	<b>(97,693,811,420)</b>	<b>(9,847,350,215)</b>	<b>10.08</b>
<b>KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	1,486,352,263	402,848,965	1,083,503,298	268.96
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	1,486,828,263	436,651,000	1,050,177,263	240.507
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	476,000	33,802,035	(33,326,035)	(98.592)
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	59,348,402	197,362,481	(138,014,079)	(69.929)
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	143,654,182	205,147,226	(61,493,044)	(29.975)
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	84,305,780	7,784,745	76,521,035	982.961
<b>JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>	<b>1,545,700,665</b>	<b>600,211,446</b>	<b>945,489,219</b>	<b>157.526</b>
<b>SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA</b>	<b>(105,995,460,970)</b>	<b>(97,093,599,974)</b>	<b>(8,901,860,996)</b>	<b>9.168</b>
<b>POS LUAR BIASA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Beban Luar Biasa	0	0	0	
<b>POS LUAR BIASA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>SURPLUS/DEFISIT - LO</b>	<b>(105,995,460,970)</b>	<b>(97,093,599,974)</b>	<b>(8,901,860,996)</b>	<b>9.168</b>

## BERITA ACARA REKONSILIASI

### BERITA ACARA REKONSILIASI LAPORAN KEUANGAN DITJEN PERIMBANGAN KEUANGAN



#### BERITA ACARA REKONSILIASI

Nomor: BAR-165033/WPB.11/KP.019/2017

Pada hari ini Senin tanggal Delapan bulan Januari tahun Dua Ribu Delapan Belas telah diselenggarakan rekonsiliasi Laporan Realisasi Anggaran antara DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN (440941) yang selanjutnya disebut Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan, yang selanjutnya disebut Bendahara Umum Negara.

Kuasa Pengguna Anggaran menyampaikan Laporan Keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran Belanja, Laporan Realisasi Anggaran Pengembalian Belanja Negara, Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Laporan Realisasi Anggaran Pengembalian Pendapatan serta Neraca sebagai bahan rekonsiliasi periode Desember 2017.

Selanjutnya Kuasa Bendahara Umum Negara menyediakan data transaksi, Laporan Realisasi Anggaran, dan Neraca yang diproses berdasarkan Sistem Akuntansi Pusat (SiAP). Rekonsiliasi dilaksanakan secara bersama-sama, yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) ini dengan hasil sebagai berikut:

No.	Uraian	SiAP	SAI	Perbedaan
1	Pagu Belanja	129,015,096,000	129,015,096,000	0
2	Belanja	110,401,496,729	110,401,496,729	0
3	Pengembalian Belanja	-520,412,551	-520,412,551	0
4	Estimasi Pendapatan	0	0	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	1,727,983,827	1,727,983,827	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	0	0	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0

Hasil Rekonsiliasi secara rinci tertuang dalam Laporan Hasil Rekonsiliasi dan lampiran lainnya yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari BAR ini. Perbedaan yang masih ditemukan akan ditindaklanjuti kedua belah pihak.

Demikian berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

An. Kuasa Bendahara Umum Negara,  
Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi

Ade Subakti  
NIP.196403281985031001



An. Kuasa Pengguna Anggaran,  
Kepala Subbagian Akuntansi dan Pelaporan

Doddy Hardiana  
NIP.198008132001121001

Berita Acara Rekonsiliasi ini telah diotorisasi secara elektronik, tidak dibutuhkan tanda tangan basah

### Laporan Hasil Rekonsiliasi

UAKPA: DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN (440941)

Dari Hasil Rekonsiliasi Laporan SAI/SA-BUN dengan SiAP sampai dengan bulan Desember tahun anggaran 2017 dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pagu Anggaran

SiAP : 129,015,096,000

SAI/SA-BUN : 129,015,096,000

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

2. Estimasi Pendapatan

SiAP : 0

SAI/SA-BUN : 0

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

3. Laporan Realisasi Belanja

SiAP : 110,401,496,729

SAI/SA-BUN : 110,401,496,729

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

4. Pengembalian Belanja

SiAP : -520,412,551

SAI/SA-BUN : -520,412,551

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

5. Realisasi Pendapatan Bukan Pajak

SiAP : 1,727,983,827

SAI/SA-BUN : 1,727,983,827

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

6. Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak

SiAP : 0

SAI/SA-BUN : 0

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

7. Pengembalian Pajak

SiAP : 0

SAI/SA-BUN : 0

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

8. Mutasi Uang Persediaan

SiAP : 0

SAI/SA-BUN : 0

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

9. Kas di Bendahara Pengeluaran

SiAP : 0

SAI/SA-BUN : 0

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

10. Saldo Kas Lainnya dari Hibah Langsung

SiAP : 0

SAI/SA-BUN : 0

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

11. Saldo Kas Badan Layanan Umum

SiAP : 0

SAI/SA-BUN : 0

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

12. Langkah-langkah Perbaikan kesalahan/perbedaan

An. Bendahara Umum Negara,  
Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi

Ade Subakti  
NIP.196403281985031001



An. Kuasa Pengguna Anggaran,  
Kepala Subbagian Akuntansi dan Pelaporan

Doddy Hardiana  
NIP.198008132001121001

Berita Acara Rekonsiliasi ini telah diotorisasi secara elektronik, tidak dibutuhkan tanda tangan basah

CATATAN ATAS LAPORAN BARANG MILIK NEGARA

**I. PENDAHULUAN**

**1. DASAR HUKUM**

Dasar Hukum dalam penyusunan Laporan Barang Pembantu Pengguna Eselon I Tahunan tahun anggaran 2016 adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-undang Nomor Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- c. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- g. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- h. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;
- i. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara;
- j. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 120/PMK.06/2007 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
- k. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
- l. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-55/PB/2012 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.

**2. Entitas Pelaporan**

Entitas Pelaporan yang menyajikan Laporan Barang Pembantu Pengguna Eselon I Tahunan tahun anggaran 2017 ini adalah Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan sebagai Unit Penatausahaan Pengguna Barang Eselon I di bawah Kementerian Keuangan.

**3. Periode Laporan**

Periode Laporan untuk Laporan Barang Pembantu Pengguna Eselon I Tahunan tahun anggaran 2017 ini adalah dari tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2017.

**II. KEBIJAKAN PENATAUSAHAAN BARANG MILIK NEGARA**

Penyusunan dan penyajian Laporan Barang Pembantu Pengguna Eselon I Tahunan tahun anggaran 2017 ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dengan basis Akrua. Dalam tataran teknis penatausahaan BMN, telah diterapkan ketentuan-ketentuan penatausahaan BMN sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 120/PMK.06/2007 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara. Adapun pelaksanaan penggolongan dan kodefikasi barang dilakukan dengan mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara. Kebijakan-kebijakan penatausahaan yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Barang Pembantu Pengguna Eselon I Tahunan Tahun Anggaran 2017 adalah sebagai berikut:

(1) Kebijakan atas Lingkup Pengertian Barang Milik Negara

Barang Milik Negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah tersebut meliputi: (a) barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis; (b) barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak; (c) barang yang diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau (d) barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

(2) Kebijakan Penatausahaan/Akuntansi Atas Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan diakui pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah. Pada akhir periode akuntansi, persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik dan nilainya disajikan sebesar: (1) biaya perolehan terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian; (2) biaya standar, apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri; atau (3) nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.

(3) Kebijakan Penatausahaan/Akuntansi Atas Aset Tetap

Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum, serta tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal Kuasa Pengguna Barang.

Aset tetap digolongkan ke dalam golongan: Tanah; Peralatan dan Mesin; Gedung dan Bangunan; Jalan, Irigasi, dan Jaringan; Aset Tetap Lainnya; serta Konstruksi dalam Pengerjaan.

Aset tetap disajikan sebesar biaya perolehan yang menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai.

(4) Kebijakan Penatausahaan/Akuntansi atas Aset Lainnya

Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Tagihan Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain.

Aset Tak Berwujud adalah aset nonkeuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuannya lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Aset tak berwujud meliputi software komputer, lisensi dan franchise, hak cipta (*copyright*), paten, dan hak lainnya, dan hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang.

Aset tak berwujud dinilai sebesar pengeluaran yang terjadi dengan SPM belanja modal non fisik yang melekat pada aset tersebut setelah dikurangi dengan biaya-biaya lain yang tidak dapat dikapitalisir.

Aset lain-lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran, tuntutan perbendaharaan, tuntutan ganti rugi dan kemitraan dengan pihak ketiga. Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lain-lain.

Aset tetap diakui sebagai aset lain-lain pada saat dinilai kondisi aset tetap tersebut adalah rusak berat, tetapi belum ada Surat Keputusan Penghapusan. Sedangkan penyajian nilai aset lain-lain adalah sebesar biaya perolehannya atau nilai yang tercatat sebelumnya pada pos aset tetap.

(5) Kebijakan Kapitalisasi Aset Tetap

Pengeluaran yang dikapitalisasi dilakukan terhadap pengadaan tanah, pembelian peralatan dan mesin sampai siap pakai, pembuatan peralatan, mesin dan bangunan, pembangunan gedung dan bangunan, pembangunan jalan/irigasi/jaringan, pembelian Aset Tetap lainnya sampai siap pakai, dan pembangunan/pembuatan Aset Tetap lainnya.

Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap adalah pengeluaran pengadaan baru dan penambahan nilai aset tetap dari hasil pengembangan, reklasifikasi, renovasi, dan restorasi.

Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap : (1) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin, dan alat olah raga yang sama dengan atau lebih dari Rp 300.000,- (*tiga ratus ribu rupiah*), dan (2) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang sama dengan atau lebih dari Rp 10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*).

Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap tersebut dikecualikan terhadap pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

(6) Kebijakan Penyusutan Aset Tetap

Penerapan penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada seluruh entitas Pemerintah Pusat dilaksanakan mulai tahun 2013, sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 53/KMK.06/2012 tentang Penerapan Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.

Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No. 01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90/PMK.06/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 145/KM.6/2014 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 94/KM.6/2013 tentang Modul Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.

Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap: (a) Tanah (b) Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP) (c) Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan

Nilai yang disusutkan pertama kali adalah nilai yang tercatat dalam pembukuan per 31 Desember 2012 untuk aset tetap yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2012. Sedangkan Untuk Aset Tetap yang diperoleh setelah 31 Desember 2012, nilai yang disusutkan adalah berdasarkan nilai perolehan.

Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.

Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.

Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat tersebut tersaji pada Tabel berikut:

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 Tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 Tahun
Jaringan, Jalan, dan Irigasi	5 s.d. 40 Tahun
Alat Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 Tahun

### III. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN

Laporan Barang Pembantu Pengguna Eselon I Tahunan Tahun Anggaran 2016 merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek BMN yang ditatausahakan dan dikelola oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

Nilai BMN Gabungan (intrakomptabel, ekstrakomptabel, dan barang rusak berat yang telah diusulkan ke pengelola) yang disajikan pada Tahunan Tahun Anggaran 2017 ini adalah sebesar **Rp. 102.526.185.629,-** (*Seratus dua milyar lima ratus dua puluh enam juta seratus delapan puluh lima ribu enam ratus dua puluh sembilan rupiah*), yang merupakan nilai BMN berupa saldo awal laporan sebesar **Rp. 73.735.707.846,-** (*Tujuh puluh tiga milyar tujuh ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus tujuh ribu delapan ratus empat puluh enam Rupiah*) dan nilai mutasi yang terjadi selama Tahun Anggaran 2017 sebesar mutasi tambah **Rp. 58.861.647.887,-** (*Lima puluh delapan milyar delapan ratus enam puluh satu juta enam ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh tujuh Rupiah*) dan mutasi kurang **Rp. 30.071.170.104,-** (*Tiga puluh milyar tujuh puluh satu juta seratus tujuh puluh ribu seratus empat Rupiah*). Nilai mutasi BMN tersebut berasal dari transaksi keuangan dan transaksi non-keuangan. Mutasi BMN yang berasal dari transaksi keuangan merupakan penambahan nilai BMN yang berasal dari perolehan dan/atau penambahan nilai BMN yang berasal dari pembiayaan APBN selama periode tahun berjalan, sedangkan transaksi non-keuangan merupakan transaksi penambahan dan pengurangan atas BMN yang berasal dari pembiayaan selain APBN periode tahun berjalan.

Laporan BMN ini disusun menggunakan sistem aplikasi sebagai alat bantu guna mempermudah dalam melakukan Penatausahaan BMN. Laporan BMN ini terdiri atas:

1. Neraca;
2. Laporan Barang Persediaan;
3. Laporan Aset Tetap (intrakomptabel, Ekstrakomptabel, dan Gabungan);
4. Laporan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP);
5. Laporan Aset Tak Berwujud;
6. Laporan Kondisi Barang;
7. Laporan Penyusutan;
8. Catatan Atas Laporan Barang Milik Negara;
9. Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) internal SAK-SIMAK pada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan;
10. Laporan PNBPN yang terkait dengan Pengelolaan BMN; dan
11. Arsip Data Komputer (ADK).



**IV. RINGKASAN BARANG MILIK NEGARA PER TAHUN ANGGARAN 2016**

**1. Saldo Awal Tahunan tahun anggaran 2017**

Nilai BMN per 1 Januari 2017 menurut Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan adalah sebesar **Rp.73.735.707.846,-** (*Tujuh puluh tiga milyar tujuh ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus tujuh ribu delapan ratus empat puluh enam Rupiah*) yang terdiri dari nilai BMN intrakomptabel (nilai BMN yang disajikan dalam Neraca) sebesar **Rp. 73.693.086.146,-** (*Tujuh puluh tiga milyar enam ratus sembilan puluh tiga juta delapan puluh enam ribu seratus empat puluh enam Rupiah*), nilai BMN ekstrakomptabel sebesar **Rp. 42.621.700,-** (*Empat puluh dua juta enam ratus dua puluh satu ribu tujuh ratus Rupiah*) dan nilai BMN rusak berat yang sudah diusulkan ke pengelola sebesar **Rp.0,-** (*Nol Rupiah*).

**2. Ringkasan Mutasi Barang Milik Negara Tahun Anggaran 2017**

**a. Barang Persediaan**

Saldo Persediaan pada Laporan Barang Pembantu Pengguna Eselon I Tahunan per 31 Desember 2017 sebesar **2.258.890.806,-** (*Dua milyar dua ratus lima puluh delapan juta delapan ratus sembilan puluh ribu delapan ratus enam Rupiah*), jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar **Rp. 2.122.858.309,-** (*Dua milyar seratus dua puluh dua juta delapan ratus lima puluh delapan ribu tiga ratus sembilan Rupiah*), mutasi tambah persediaan selama periode laporan sebesar **Rp. 1.603.783.945,-** (*Satu milyar enam ratus tiga juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus empat puluh lima Rupiah*), dan mutasi kurang persediaan selama periode laporan sebesar **Rp. 1.467.751.448,-** (*Satu milyar empat ratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh satu ribu empat ratus empat puluh delapan Rupiah*).

Jumlah tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

Uraian	Saldo Awal (Rp.)	Mutasi Tambah (Rp)	Mutasi Kurang (Rp)	Saldo Akhir (Rp)
1.01.03 Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor	<b>2.122.858.309</b>	<b>1.603.783.945</b>	<b>1.467.751.448</b>	<b>2.258.890.806</b>
JUMLAH	<b>2.122.858.309</b>	<b>1.603.783.945</b>	<b>1.467.751.448</b>	<b>2.258.890.806</b>

Total nilai barang persediaan yang dalam kondisi rusak dan usang adalah sebesar **Rp.0,-** (*Nol Rupiah*) yang terdiri dari barang persediaan dengan kondisi rusak senilai **Rp.0,-** (*Nol Rupiah*) dan kondisi usang senilai **Rp.0,-** (*Nol Rupiah*).

**b. TANAH**

**Tanah (2.01)**

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan per 31 Desember 2017 tidak mempunyai aset berupa tanah.

**c. PERALATAN DAN MESIN**

Saldo Peralatan dan Mesin (gabungan Intrakomptabel dan Ekstrakomptabel) pada Laporan Barang Pembantu Pengguna Eselon I Tahunan per 31 Desember 2017 adalah sebesar **Rp. 93.837.631.062,-** (*Sembilan puluh tiga milyar delapan ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh satu ribu enam puluh dua Rupiah*), jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar **Rp. 60.263.306.055,-** (*Enam puluh milyar dua ratus enam puluh tiga juta tiga ratus enam ribu lima puluh lima Rupiah*), mutasi tambah sebesar **Rp.37.848.443.131,-** (*Tiga puluh tujuh juta milyar delapan ratus empat puluh delapan juta empat ratus empat puluh tiga ribu seratus tiga puluh satu Rupiah*), dan mutasi kurang sebesar **Rp.4.268.154.724,-** (*Empat milyar dua ratus enam puluh delapan juta seratus lima puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh empat Rupiah*).

Rincian mutasi Peralatan dan Mesin per bidang barang adalah sebagai berikut:

**1) Alat Besar (3.01)**

Saldo Alat Besar (gabungan Intrakomptabel dan Ekstrakomptabel) pada Laporan Barang Pembantu Pengguna Eselon I Tahunan per 31 Desember 2017 sebesar **Rp. 10.028.989.647,-** (*Sepuluh Milyar dua puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus empat puluh tujuh Rupiah*). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal total jumlah barang sebesar **0 unit** dengan nilai sebesar **Rp. 0,-** (*Nol Rupiah*), mutasi tambah jumlah barang **18 unit** dengan nilai sebesar **Rp. 10.028.989.647,-** (*Sepuluh Milyar dua puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus empat puluh tujuh Rupiah*), dan mutasi kurang jumlah barang **0 unit** dengan nilai sebesar **Rp. 0,-** (*Nol Rupiah*).

Mutasi Tambah Alat Besar tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
- Transfer masuk	<b>Rp. 10.028.989.647,-</b>	-

Mutasi Kurang Alat Besar tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
-	-	-

Transaksi Transfer masuk Alat Besar senilai **Rp. Rp. 10.028.989.647,-** (*Sepuluh Milyar dua puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus empat puluh tujuh Rupiah*) tersebut merupakan penyerahan **6 unit** Elevator/Lift, **9 unit** Transportable Water Pump, **1 unit** Stationary Water Pump, **1 unit** Pompa Lumpur, dan **1 unit** Mesin Diesel dari Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan kepada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan sesuai Berita Acara Serah Terima BMN Nomor **BA-8/SJ.8/2017** tanggal 28 Februari 2017.

Dari jumlah Alat Besar di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah 0 unit dengan nilai sebesar **Rp. 0,-** (*Nol Rupiah*).

Dari jumlah Alat Besar di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas (sesuai dengan satuan barang masing-masing)	Nilai (Rp)
Baik	18 buah	10.028.989.647
Rusak Ringan	0 buah	0
Rusak Berat	0 buah	0

Kelompok barang Alat Besar yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah **0 unit** dengan nilai sebesar **Rp.0,-** (*Nol Rupiah*).

**2) Alat Angkutan (3.02)**

Saldo Alat Angkutan (gabungan Intrakomptabel dan Ekstrakomptabel) pada Laporan Barang Pembantu Pengguna Eselon I Tahunan per 31 Desember 2017 sebesar **Rp.11.907.956.500,-** (*Sebelas milyar sembilan ratus tujuh juta sembilan ratus lima puluh enam ribu lima ratus Rupiah*). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal total jumlah barang sebesar **84 unit** dengan nilai sebesar **Rp.8.535.067.560,-** (*Delapan milyar lima ratus tiga puluh lima juta enam puluh tujuh ribu lima ratus enam puluh Rupiah*), mutasi tambah jumlah barang **27 unit** dengan nilai sebesar **Rp.6.733.479.000,-** (*Enam milyar tujuh ratus tiga puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu Rupiah*), dan mutasi kurang jumlah barang **26 unit** dengan nilai sebesar **Rp.3.360.590.060,-** (*Tiga milyar tiga ratus enam puluh juta lima ratus sembilan puluh ribu enam puluh Rupiah*).

Mutasi Tambah Alat Angkutan tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
- Pembelian	<b>Rp.6.728.439.000,-</b>	
- Pengembangan Nilai Aset	<b>Rp.5.040.000,-</b>	-

Terdapat pembelian **27 unit** alat angkutan yang terdiri dari **5 unit** Kendaraan Dinas Roda Empat Jabatan Eselon II, **17 unit** Kendaraan Dinas Roda Empat Operasional, dan **5 unit** Troli Dorong.

Mutasi Kurang Alat Angkutan tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
- Penghentian Aset Dari Penggunaan	<b>Rp.3.360.590.060</b>	-

Pada Mutasi kurang alat angkutan terdapat penghentian Aset dari penggunaan yang merupakan penghapusan 1 unit troli dorong dengan nilai **Rp.1.584.000,-** (Satu juta lima ratus delapan puluh empat ribu Rupiah) sesuai dengan Keputusan Sekretaris Ditjen Perimbangan Keuangan nomor: **KEP-19/PK.1/2017** tanggal 7 Agustus 2017 dan penghapusan **25 unit** kendaraan dinas roda empat operasional dengan nilai **Rp3.359.006.060,-** (Tiga milyar tiga ratus lima puluh sembilan juta enam ribu enam puluh rupiah) sesuai dengan Keputusan Sekretaris Ditjen Perimbangan Keuangan nomor: **KEP-24/PK.1/2017** tanggal 21 November 2017

Saldo Alat Angkutan pada Laporan Barang Pembantu Pengguna Eselon I Tahunan per 31 Desember 2017 tersebut di atas seluruhnya merupakan nilai barang intrakomptabel.

Dari jumlah Alat Angkutan di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah **0 unit** dengan nilai sebesar **Rp.0,- (Nol Rupiah)**.

Dari jumlah Alat Angkutan di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas (sesuai dengan satuan barang masing-masing)	Nilai (Rp)
Baik	85 unit	11.907.956.500
Rusak Ringan	0 unit	0
Rusak Berat	0 unit	0

### 3) Alat Bengkel dan Alat Ukur (3.03)

Saldo Alat Bengkel dan Alat Ukur (gabungan Intrakomptabel dan Ekstrakomptabel) pada Laporan Barang Pembantu Pengguna Eselon I Tahunan per 31 Desember 2017 sebesar **Rp.65.390.730,-** (Enam puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh ribu tujuh ratus tiga puluh Rupiah). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal total jumlah barang sebesar **13 buah** dengan nilai sebesar **Rp. 64.070.730,-** (Enam puluh empat juta tujuh puluh ribu tujuh ratus tiga puluh Rupiah), mutasi tambah jumlah barang **1 buah** dengan nilai sebesar **Rp.1.320.000,-** (Satu juta tiga ratus dua puluh ribu Rupiah), dan mutasi kurang jumlah barang **0 buah** dengan nilai sebesar **Rp. 0,- (Nol Rupiah)**.

Mutasi Tambah Alat Bengkel dan Alat Ukur tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
Pembelian	1.320.000	-

Mutasi Kurang Alat Bengkel dan Alat Ukur tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
-	-	-

Saldo Alat Bengkel dan Alat Ukur pada Laporan Barang Pembantu Pengguna Eselon I Tahunan per 31 Desember 2015 tersebut di atas seluruhnya merupakan nilai barang intrakomptabel.

Dari jumlah Alat Bengkel dan Alat Ukur di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah **0 buah** dengan nilai sebesar **Rp. 0,- (Nol Rupiah)**, sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah **0 buah** dengan nilai sebesar **Rp. 0,- (Nol Rupiah)**.

Dari jumlah Alat Bengkel dan Alat Ukur di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas (sesuai dengan satuan barang masing-masing)	Nilai (Rp)
Baik	14 buah	<b>Rp.65.390.730,-</b>
Rusak Ringan	0 buah	0
Rusak Berat	0 buah	0

Kelompok barang Alat Bengkel dan Alat Ukur yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah **0 buah** dengan nilai **Rp.0,- (Nol Rupiah)**. Dari jumlah tersebut, yang statusnya sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah **0 unit** dengan nilai sebesar **Rp.0,- (Nol Rupiah)**.

#### 4) Alat Kantor dan Rumah Tangga (3.05)

Saldo Alat Kantor dan Rumah Tangga (gabungan Intrakomptabel dan Ekstrakomptabel) pada Laporan Barang Pembantu Pengguna Eselon I Tahunan per 31 Desember 2017 sebesar **Rp.31.765.590.564,- (Tiga puluh satu milyar tujuh ratus enam puluh lima juta lima ratus sembilan puluh ribu lima ratus enam puluh empat Rupiah)**. Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal total jumlah barang sebesar **4.843 buah** dengan nilai sebesar **Rp.16.809.301.678,- (Enam belas milyar delapan ratus sembilan juta tiga ratus satu ribu enam ratus tujuh puluh delapan Rupiah)**, mutasi tambah jumlah barang **788 buah** dengan nilai sebesar **Rp. 15.856.322.950,- (lima belas milyar delapan ratus lima puluh enam juta tiga ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh rupiah)**, dan mutasi kurang jumlah barang **354 buah** dengan nilai sebesar **Rp900.034.064,- (Sembilan ratus tiga juta tiga ratus tiga puluh empat ribu enam puluh empat Rupiah)**.

Mutasi Tambah Alat Kantor dan Rumah Tangga tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
Pembelian	3.255.802.784	0
Transfer Masuk	12.558.448.163	0
Pengembangan Nilai Aset	42.072.003	0

Mutasi Kurang Alat Kantor dan Rumah Tangga tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
Penghentian Aset dari Penggunaan	900.034.064	-

Mutasi tambah alat kantor dan rumah tangga terdiri dari Transfer masuk dengan jumlah jumlah **52 unit** senilai **Rp.12.558.448.163,-** (Dua belas milyar lima ratus lima puluh delapan juta empat ratus empat puluh delapan ribu seratus enam puluh tiga Rupiah) dari Sekretariat Jenderal kepada Ditjen Perimbangan Keuangan sesuai dengan Berita Acara Serah Terima BMN Nomor **BA-8/SJ.8/2017** tanggal 28 Februari 2017.

Saldo Alat Kantor dan Rumah Tangga pada Laporan Barang Pembantu Pengguna Eselon I Tahunan per 31 Desember 2017 tersebut di atas terdiri dari nilai barang intrakomptabel dan barang ekstrakomptabel dengan rincian sebagai berikut:

Nilai Gabungan Intrakomptabel dan Ekstrakomptabel		Intrakomptabel		Ekstrakomptabel	
Unit	Nilai (Rp)	Unit	Nilai (Rp)	Unit	Nilai (Rp)
5.278	31.765.590.564	4.988	31.715.643.464	290	49.947.100

Dari jumlah Alat Kantor dan Rumah Tangga di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah **0 buah** dengan nilai sebesar **Rp.0,-** (*Nol Rupiah*).

Dari jumlah Alat Kantor dan Rumah Tangga di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas (sesuai dengan satuan barang masing-masing)	Nilai (Rp)
Baik	5.278	31.765.590.564
Rusak Ringan	0 buah	0
Rusak Berat	0 buah	0

Kelompok barang Alat Kantor dan Rumah Tangga yang statusnya dihentikan dari penggunaannya sebanyak **353 unit** dengan nilai **Rp900.034.064,-** (Sembilan ratus juta tiga puluh empat ribu enma puluh empat Rupiah) sesuai dengan Surat Keterangan Sekretaris Ditjen perimbangan Keuangan nomor **KET-4/PK.1/2017** tanggal 18 April 2017 dan **KET-5/PK.1/2017** tanggal 10 Oktober 2017

Kelompok barang Alat Kantor dan Rumah Tangga yang statusnya dihapuskan dari daftar BMN adalah sebanyak **222 unit** dengan nilai **Rp271.798.646,-** (Dua ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu enam ratus empat puluh enam Rupiah) sesuai dengan Keputusan Sekretaris Ditjen perimbangan Keuangan nomor **KEP-19/PK.1/2017** tanggal 7 Agustus 2017.

**5) Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar (3.06)**

Saldo Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar (gabungan Intrakomptabel dan Ekstrakomptabel) pada Laporan Barang Pembantu Pengguna Eselon I Tahunan per 31 Desember 2017 sebesar **Rp. 1.843.705.262,-** (Satu milyar delapan ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus lima ribu dua ratus enam puluh dua rupiah). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal total jumlah barang sebesar **420 buah** dengan nilai sebesar **Rp. 1.301.572.212,-** (Satu milyar tiga ratus satu juta lima ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus dua belas rupiah), mutasi tambah jumlah barang **61 buah** dengan nilai sebesar **Rp. 546.363.650,-** (Lima ratus empat puluh enam juta tiga ratus enam puluh tiga ribu enam ratus lima puluh rupiah), dan mutasi kurang jumlah barang **1 buah** dengan nilai sebesar **Rp. 4.230.600,-** (Empat juta dua ratus tiga puluh ribu enam ratus rupiah).

Mutasi Tambah Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
Pembelian	546.363.650	0

Mutasi Kurang Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
Penghentian Aset Dari Penggunaan	4.230.600	

Kelompok barang Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar yang statusnya dihentikan dari penggunaannya sebanyak **1 unit** dengan nilai **Rp 4.230.600,-** (Empat juta dua ratus tiga puluh ribu enam ratus Rupiah) sesuai dengan Surat Keterangan Sekretaris Ditjen perimbangan Keuangan nomor **KET-5/PK.1/2017** tanggal 10 Oktober 2017

Saldo Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar pada Laporan Barang Pembantu Pengguna Eselon I Tahunan per 31 Desember 2017 tersebut di atas terdiri dari nilai barang intrakomptabel dan barang ekstrakomptabel dengan rincian sebagai berikut:

Nilai Gabungan Intrakomptabel dan Ekstrakomptabel		Intrakomptabel		Ekstrakomptabel	
Unit	Nilai (Rp)	Unit	Nilai (Rp)	Unit	Nilai (Rp)
480	1.843.705.262	476	1.843.247.262	4	458.000

Dari jumlah Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah **0 buah** dengan nilai sebesar **Rp. 0,-** (Nol Rupiah).

Dari jumlah Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas (sesuai dengan satuan barang masing-masing)	Nilai (Rp)
Baik	480 buah	1.843.705.262
Rusak Ringan	0 buah	0
Rusak Berat	0 buah	0

Kelompok barang Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar yang statusnya dihapuskan dari daftar BMN adalah sebanyak **18 unit** dengan nilai **Rp.58.064.500,-**(Lima puluh delapan juta enam puluh empat ribu lima ratus rupiah) sesuai dengan Keputusan Sekretaris Ditjen perimbangan Keuangan nomor **KEP-19/PK.1/2017** tanggal 7 Agustus 2017.

#### 6) Alat Kedokteran dan Kesehatan (3.07)

Saldo Alat Kedokteran dan Kesehatan (gabungan Intrakomptabel dan Ekstrakomptabel) pada Laporan Barang Pembantu Pengguna Eselon I Tahunan per 31 Desember 2017 sebesar **Rp. 5.934.500,-** (*Lima juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu lima ratus Rupiah*). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal total jumlah barang sebesar **2 unit** dengan nilai sebesar **Rp. 5.934.500,-** (*Lima juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu lima ratus Rupiah*), mutasi tambah jumlah barang **0 unit** dengan nilai sebesar **Rp. 0,-** (*Nol Rupiah*), dan mutasi kurang jumlah barang **0 buah** dengan nilai sebesar **Rp. 0,-** (*Nol Rupiah*).

Mutasi Tambah Alat Studio, Alat Kedokteran dan Kesehatan tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
-	-	-

Mutasi Kurang Alat Kedokteran dan Kesehatan tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
-	-	-

Saldo Alat Kedokteran dan Kesehatan pada Laporan Barang Pembantu Pengguna Eselon I Tahunan per 31 Desember 2017 tersebut di atas terdiri dari nilai barang intrakomptabel dan barang ekstrakomptabel dengan rincian sebagai berikut:

Nilai Gabungan Intrakomptabel dan Ekstrakomptabel		Intrakomptabel		Ekstrakomptabel	
Unit	Nilai (Rp)	Unit	Nilai (Rp)	Unit	Nilai (Rp)
2	<b>5.934.500</b>	2	<b>5.934.500</b>		

Dari jumlah Alat Kedokteran dan Kesehatan di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah **0 buah** dengan nilai sebesar **Rp. 0,-** (*Nol Rupiah*).

Dari jumlah Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas (sesuai dengan satuan barang masing-masing)	Nilai (Rp)
Baik	2 buah	5.934.500
Rusak Ringan	0 buah	0
Rusak Berat	0 buah	0

#### 7) Komputer (3.10)

Saldo Komputer (gabungan Intrakomptabel dan Ekstrakomptabel) pada Laporan Barang Pembantu Pengguna Eselon I Tahunan per 31 Desember 2017 sebesar **Rp. 35.955.012.759,-** (Tiga puluh lima milyar sembilan ratus lima puluh empat juta dua belas ribu tujuh ratus lima puluh sembilan Rupiah). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal total jumlah barang sebesar **1.235 unit** dengan nilai sebesar **Rp.33.589.501.075,-** (Tiga puluh tiga milyar lima ratus delapan puluh sembilan juta lima ratus satu ribu tujuh puluh lima Rupiah), mutasi tambah jumlah barang **204 unit** dengan nilai sebesar **Rp. 2.365.511.684,-** (Dua milyar tiga ratus enam puluh lima juta lima ratus sebelas ribu enam ratus delapan puluh empat rupiah), dan mutasi kurang jumlah barang **0 unit** dengan nilai sebesar **Rp. 0,-** (Nol rupiah).

Mutasi Tambah Komputer tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
-Pembelian	1.723.100.884	
-Transfer Masuk	112.640.000	
-Pengembangan Nilai Aset	529.770.800	

Terdapat Transfer masuk **16 unit** komputer SPAN dengan nilai **Rp.112.640.000,-** (Seratus dua belas juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) dari Ditjen Perbendaharaan kepada Ditjen Perimbangan Keuangan sesuai dengan **BAST-24/PB.1/2017** tanggal 14 Februari 2017. Pengembangan Nilai Aset senilai **Rp.529.770.800,-**(Lima ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh ribu delapan ratus rupiah) terdiri dari pengembangan server SIKD Penambahan RAM Server, dan Honor Penerima Hasil Pekerjaan.

Mutasi Kurang Komputer tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
-	-	

Saldo Komputer pada Laporan Barang Pembantu Pengguna Eselon I Tahunan per 31 Desember 2017 tersebut di atas terdiri dari nilai barang intrakomptabel dan barang ekstrakomptabel dengan rincian sebagai berikut:



Nilai Gabungan Intrakomptabel dan Ekstrakomptabel		Intrakomptabel		Ekstrakomptabel	
Unit	Nilai (Rp)	Unit	Nilai (Rp)	Unit	Nilai (Rp)
1.439	35.955.012.759	1.435	35.954.012.759	4	1.000.000

Dari jumlah Komputer di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah **0 unit** dengan nilai sebesar **Rp.0,- (Nol Rupiah)**.

Dari jumlah Komputer di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas (sesuai dengan satuan barang masing-masing)	Nilai (Rp)
Baik	1.408 buah	35.908.423.764
Rusak Ringan	31 buah	46.588.995
Rusak Berat	0 buah	0

#### 8) Alat Keselamatan Kerja (3.15)

Saldo Alat Keselamatan Kerja (gabungan Intrakomptabel dan Ekstrakomptabel) pada Laporan Barang Pembantu Pengguna Eselon I Tahunan per 31 Desember 2017 sebesar **Rp.1.918.450.400,-** (Satu milyar sembilan ratus delapan belas juta empat ratus lima puluh ribu empat ratus Rupiah). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal total jumlah barang sebesar **0 unit** dengan nilai sebesar **Rp.0,- (Nol Rupiah)**, mutasi tambah jumlah barang 1 unit dengan nilai sebesar **Rp.1.918.450.400,-** (Satu milyar sembilan ratus delapan belas juta empat ratus lima puluh ribu empat ratus rupiah), dan mutasi kurang jumlah barang 0 unit dengan nilai sebesar **Rp. 0,- (Nol rupiah)**.

Mutasi Tambah Komputer tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
-Transfer Masuk	1.918.450.400	

Terdapat Transfer masuk **1 unit** Alat Keselamatan Kerja dengan nilai **Rp.1.918.450.400,-** (Satu milyar sembilan ratus delapan belas juta empat ratus lima puluh ribu empat ratus rupiah), dari Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan sesuai dengan **BA-8/SJ.8/2017** tanggal 28 Februari 2017.

Mutasi Kurang Alat Keselamatan Kerja tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
-	-	

Saldo Alat Keselamatan Kerja pada Laporan Barang Pembantu Pengguna Eselon I Tahunan per 31 Desember 2017 tersebut di atas terdiri dari nilai barang intrakomptabel dan barang ekstrakomptabel dengan rincian sebagai berikut:

Nilai Gabungan Intrakomptabel dan Ekstrakomptabel		Intrakomptabel		Ekstrakomptabel	
Unit	Nilai (Rp)	Unit	Nilai (Rp)	Unit	Nilai (Rp)
1	1.918.450.400	1	1.918.450.400	-	-

Dari jumlah Alat Keselamatan Kerja di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah **0 unit** dengan nilai sebesar **Rp.0,- (Nol Rupiah)**.

Dari jumlah Alat Keselamatan Kerja di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas (sesuai dengan satuan barang masing-masing)	Nilai (Rp)
Baik	1 buah	1.918.450.400
Rusak Ringan	0 buah	0
Rusak Berat	0 buah	0

#### 9) Peralatan Proses/Produksi (3.17)

Saldo Peralatan Proses/Produksi (gabungan Intrakomptabel dan Ekstrakomptabel) pada Laporan Barang Pembantu Pengguna Eselon I Tahunan per 31 Desember 2017 sebesar **Rp.377.535.800,-** (Tiga ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus Rupiah). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal total jumlah barang sebesar **0 unit** dengan nilai sebesar **Rp.0,-** (Nol Rupiah), mutasi tambah jumlah barang 3 unit dengan nilai sebesar **Rp.377.535.800,-** (Tiga ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus Rupiah), dan mutasi kurang jumlah barang 0 unit dengan nilai sebesar **Rp. 0,-** (Nol rupiah).

Mutasi Tambah Komputer tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
-Transfer Masuk	377.535.800	

Terdapat Transfer masuk **3 unit** Peralatan Proses/Produksi dengan nilai **Rp.377.535.800,-** (Tiga ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus rupiah), dari Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan sesuai dengan **BA-8/SJ.8/2017** tanggal 28 Februari 2017.

Mutasi Kurang Peralatan Proses/Produksi tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
-	-	

Saldo Peralatan Proses/Produksi pada Laporan Barang Pembantu Pengguna Eselon I Tahunan per 31 Desember 2017 tersebut di atas terdiri dari nilai barang intrakomptabel dan barang ekstrakomptabel dengan rincian sebagai berikut:

Nilai Gabungan Intrakomptabel dan Ekstrakomptabel		Intrakomptabel		Ekstrakomptabel	
Unit	Nilai (Rp)	Unit	Nilai (Rp)	Unit	Nilai (Rp)
3	377.535.800	3	377.535.800	-	-

Dari jumlah Peralatan Proses/Produksi di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah **0 unit** dengan nilai sebesar **Rp.0,- (Nol Rupiah)**.

Dari jumlah Peralatan Proses/Produksi di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas (sesuai dengan satuan barang masing-masing)	Nilai (Rp)
Baik	3 buah	377.535.800
Rusak Ringan	0 buah	0
Rusak Berat	0 buah	0

#### 10) Jaringan Instalasi (5.03)

Saldo Instalasi (gabungan Intrakomptabel dan Ekstrakomptabel) pada Laporan Barang Pembantu Pengguna Eselon I Tahunan per 31 Desember 2017 sebesar **Rp.990.851.337,-** (Sembilan ratus sembilan puluh juta delapan ratus lima puluh satu ribu tiga ratus tiga puluh tujuh Rupiah). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal total jumlah barang sebesar 0 unit dengan nilai sebesar **Rp.0,- (Nol Rupiah)**, mutasi tambah jumlah barang **5 unit** dengan nilai sebesar **Rp.990.851.337,-** (Dua ratus enam puluh delapan juta enam ratus sembilan belas ribu tujuh ratus dua puluh rupiah), dan mutasi kurang jumlah barang **0 unit** dengan nilai sebesar **Rp. 0,- (Nol rupiah)**.

Mutasi Tambah Instalasi tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
-Transfer Masuk	990.851.337	

Terdapat Transfer masuk **5 unit** Instalasi dengan nilai **Rp.990.851.337,-** (Sembilan ratus sembilan puluh juta delapan ratus lima puluh satu ribu tiga ratus tiga puluh tujuh Rupiah), dari Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan sesuai dengan **BA-8/SJ.8/2017** tanggal 28 Februari 2017.

Mutasi Kurang Instalasi tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
-	-	

Saldo Instalasi pada Laporan Barang Pembantu Pengguna Eselon I Tahunan per 31 Desember 2017 tersebut di atas terdiri dari nilai barang intrakomptabel dan barang ekstrakomptabel dengan rincian sebagai berikut:

Nilai Gabungan Intrakomptabel dan Ekstrakomptabel		Intrakomptabel		Ekstrakomptabel	
Unit	Nilai (Rp)	Unit	Nilai (Rp)	Unit	Nilai (Rp)
5	990.851.337	5	990.851.33	-	-

Dari jumlah Instalasi di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah **0 unit** dengan nilai sebesar **Rp.0,- (Nol Rupiah)**.

Dari jumlah Instalasi di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas (sesuai dengan satuan barang masing-masing)	Nilai (Rp)
Baik	5 buah	990.851.337
Rusak Ringan	0 buah	0
Rusak Berat	0 buah	0

#### 11) Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin Serta Jaringan

Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin serta Jaringan pada Laporan Barang Pembantu Pengguna Eselon I Tahunan per 31 Desember 2017 berdasarkan kelompok barang (gabungan intrakomptabel dan ekstrakomptabel) adalah sebagai berikut:

KODE	URAIAN	NILAI	PENYUSUTAN	NILAI BUKU
132111	PERALATAN DAN MESIN	93.889.036.162	73.488.407.229	20.400.628.933
3.01.03	ALAT BANTU	10.028.989.647	8.301.598.167	1.727.391.480
3.02.01	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	11.872.715.500	4.366.261.987	7.506.453.513
3.02.02	ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR	35.241.000	29.741.000	5.500.000
3.03.02	ALAT BENGKEL TAK BERMESIN	20.390.730	5.853.219	14.537.511
3.03.03	ALAT UKUR	45.000.000	27.000.000	18.000.000
3.05.01	ALAT KANTOR	11.216.483.801	9.508.120.031	1.708.363.770
3.05.02	ALAT RUMAH TANGGA	20.549.106.763	17.037.882.887	3.511.223.876
3.06.01	ALAT STUDIO	1.512.809.557	1.108.062.674	404.746.883
3.06.02	ALAT KOMUNIKASI	276.335.705	145.759.248	130.576.457
3.06.03	PERALATAN PEMANCAR	46.860.000	4.686.000	42.174.000
3.06.04	PERALATAN KOMUNIKASI NAVIGASI	7.700.000	769.998	6.930.002
3.07.01	ALAT KEDOKTERAN	5.934.500	1.780.350	4.154.150
3.08.01	UNIT ALAT LABORATORIUM	20.470.000	20.470.000	0
3.10.01	KOMPUTER UNIT	10.268.389.977	8.183.706.157	2.084.683.820
3.10.02	PERALATAN KOMPUTER	25.686.622.782	23.192.974.912	2.493.647.870
3.15.04	ALAT KERJA PENERBANGAN	1.918.450.400	1.246.992.760	671.457.640
3.17.01	UNIT PERALATAN PROSES/PRODUKSI	377.535.800	306.747.839	70.787.961
134113	JARINGAN	990.851.337	342.832.216	648.019.121

5.03.01	INSTALASI AIR BERSIH / AIR BAKU	94.835.000	39.514.585	55.320.415
5.03.02	INSTALASI AIR KOTOR	354.084.337	133.963.881	220.120.456
5.03.06	INSTALASI GARDU LISTRIK	541.932.000	169.353.750	372.578.250
Total		94.879.887.499	73.831.239.445	21.048.648.054

**d. GEDUNG DAN BANGUNAN**

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan per 31 Desember 2017 tidak mempunyai aset berupa gedung dan bangunan.

**e. ASET TETAP DALAM RENOVASI**

**Aset Tetap Dalam Renovasi (6.07)**

Saldo Aset Tetap Dalam Renovasi pada Laporan Barang Pembantu Pengguna Eselon I Tahunan per 31 Desember 2017 adalah sebesar **Rp.0 (Nol Rupiah)**. Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar **Rp.4.857.111.500,- (Empat milyar delapan ratus lima puluh tujuh juta seratus sebelas juta lima ratus Rupiah)**, mutasi tambah sebesar **Rp.6.633.670.681,- (Enam milyar enam ratus tiga puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh ribu enam ratus delapan puluh satu Rupiah)**, dan mutasi kurang sebesar **Rp.11.490.782.181,- (Sebelas milyar empat ratus sembilan puluh juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu seratus delapan puluh satu Rupiah)**.

Mutasi Tambah Aset Tetap Dalam Renovasi tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Nilai (Rp)
Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	6.633.670.681

Mutasi tambah Aset Tetap Dalam Renovasi sebesar **Rp.6.633.670.681,- (Enam milyar enam ratus tiga puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh ribu enam ratus delapan puluh satu Rupiah)** berupa Renovasi Gedung Radius Prawiro lantai 10 sesuai dengan BAST-17/PBJ.03-DJPK/2017 tanggal 20 November 2017 dan Renovasi Gedung Radius Prawiro lantai 11 dan 12 sesuai dengan BAST-19/PBJ.04-DJPK/2017 tanggal 14 Desember 2017

Mutasi Kurang Aset Tetap Dalam Renovasi tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Nilai (Rp)
-Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas	58.267.478
-Transfer Keluar	11.432.514.703

Dari jumlah Aset Tetap Dalam Renovasi di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah **0 unit** dengan nilai sebesar **Rp.0,- (Nol Rupiah)**, sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah **0 unit** dengan nilai sebesar **Rp. 0,- (Nol Rupiah)**.

Aset Tetap Dalam Renovasi timbul karena Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan renovasi atas gedung kantor milik pihak ke-3, yaitu Gedung Radius Prawiro yang merupakan milik Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Transaksi Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas Aset Tetap Renovasi senilai **Rp.58.267.478,- (Lima puluh delapan juta dua ratus enam puluh tujuh ribu empat ratus tujuh puluh delapan Rupiah)** tersebut merupakan penyesuaian nilai/kuantitas Aset Tetap Dalam Renovasi Gedung Radius Prawiro lantai 1,3,9, dan 10 atas tindak lanjut temuan Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan sesuai dengan Surat nomor S-5/PPK/133/2017 tanggal 29 September 2017.

Terdapat transfer keluar Aset Tetap Renovasi dari Ditjen Perimbangan Keuangan kepada Sekretariat Jenderal senilai Rp.11.432.514.703,- sesuai dengan BAST-3/PK.1/2017 tanggal 29 Desember 2017 yang terdiri dari rincian sebagai berikut:

No.	Kode Barang / NUP	Nama Barang	Tahun Perolehan	Total Nilai Perolehan (Rp)	Keterangan
1.	6070301001 / 9	Gedung dan Bangunan Dalam Renovasi	2010	170.150.000	Nilai renovasi pada Gedung Jusuf Wibisono dan Gedung Sutikno Slamet TA. 2007-2008 yang tidak diserahterimakan
2.	6070301001 / 17	Gedung dan Bangunan Dalam Renovasi	2016	4.628.694.022	Renovasi Ruang Gedung Radius Prawiro lantai 1,3,9, dan 10
3.	6070301001 / 18	Gedung dan Bangunan Dalam Renovasi	2017	1.733.997.681	Renovasi Ruang Gedung Radius Prawiro lantai 10 (Ruang Sekretaris Ditjen PK, Bagian SDM, dan Bagian OKI)
4.	6070301001 / 19	Gedung dan Bangunan Dalam Renovasi	2017	4.899.673.000	Renovasi Ruang Gedung Radius Prawiro lantai 11 dan 12
<b>TOTAL</b>				<b>11.432.514.703</b>	

**f. ASET TETAP LAINNYA**

Saldo Aset Tetap Lainnya pada Laporan Barang Pembantu Pengguna Eselon I Tahunan per 31 Desember 2017 sebesar **Rp.789.445.090,-** (*Tujuh ratus delapan puluh sembilan juta empat ratus empat puluh lima ribu sembilan puluh Rupiah*). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar **Rp. 729.871.447,-** (*Tujuh ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu empat ratus empat puluh tujuh Rupiah*), mutasi tambah sebesar **Rp.59.573.643,-** (*Lima puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus empat puluh tiga Rupiah*), dan mutasi kurang sebesar **Rp. 0,-** (*Nol Rupiah*).

Rincian mutasi Aset Tetap Lainnya per bidang barang adalah sebagai berikut:

**1) Bahan Perpustakaan (6.01)**

Saldo Bahan Perpustakaan pada Laporan Barang Pembantu Pengguna Eselon I Tahunan per 31 Desember 2017 adalah sebesar **Rp.789.445.090,-** (*Tujuh ratus delapan puluh sembilan juta empat ratus empat puluh lima ribu sembilan puluh Rupiah*). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sejumlah **7.388 buah** dengan nilai sebesar **729.871.447,-** (*Tujuh ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu empat ratus empat puluh tujuh Rupiah*), mutasi tambah sejumlah **55 buah** dengan nilai sebesar **Rp. 59.573.643,-** (*Lima puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus empat puluh tiga Rupiah*), dan mutasi kurang sejumlah **0 buah** dengan nilai sebesar **Rp. 0,-** (*Nol Rupiah*).

Mutasi Tambah Bahan Perpustakaan tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
Pembelian	<b>59.573.643</b>	0

Mutasi Kurang Bahan Perpustakaan tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
-	-	-

Saldo Bahan Perpustakaan pada Laporan Barang Pembantu Pengguna Eselon I Tahunan per 31 Desember 2017 tersebut di atas seluruhnya merupakan nilai barang intrakomptabel.

Dari jumlah Bahan Perpustakaan di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah **0 buah** dengan nilai sebesar **Rp. 0,- (Nol Rupiah)**.

Dari jumlah Bahan Perpustakaan di atas berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas (sesuai dengan satuan barang masing-masing)	Nilai (Rp)
Baik	7.443 buah	789.445.090
Rusak Ringan	0 buah	0
Rusak Berat	0 buah	0

Kelompok barang bahan perpustakaan yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah **0 buah** dengan nilai sebesar **Rp.0,- (Nol Rupiah)**.

## 2) Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya pada Laporan Barang Pembantu Pengguna Eselon I Tahunan per 31 Desember 2017 berdasarkan kelompok barang adalah sebagai berikut:

Kelompok Barang	Nilai (Rp)	Akumulasi Penyusutan (Rp)	Nilai Buku (Rp)
6.01.01 Bahan Perpustakaan Tercetak	627.683.090	0	627.683.090
6.01.02 Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro	161.762.000	0	161.762.000
Jumlah	789.445.090	0	789.762.000

### g. KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan

#### Konstruksi Dalam Pengerjaan (7.01)

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) pada Laporan Barang Pembantu Pengguna Eselon I Tahunan per 31 Desember 2017 adalah sebesar **Rp. 0,- (Nol Rupiah)**. Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar **Rp. 49.896.000,- (Empat puluh sembilan juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu Rupiah)**, mutasi tambah sebesar **Rp.6.583.774.681,- (Enam milyar lima ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu enam ratus delapan puluh satu Rupiah)**, dan

mutasi kurang karena menjadi aset definitif sebesar **Rp.6.633.670.681,-** (*Enam milyar enam ratus tiga puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh ribu enam ratus delapan puluh satu Rupiah*).

Mutasi Tambah Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Nilai (Rp)
Konstruksi Dalam Pengerjaan	<b>6.583.774.681</b>

Mutasi Kurang Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Nilai (Rp)
Aset Tetap Lainnya Dalam Pengerjaan yang Menjadi Aset Definitif	<b>6.633.670.681</b>

Rincian Saldo (KDP) berdasarkan sub-sub kelompok barang adalah sebagai berikut:

Uraian Rincian KDP	Nilai (Rp)
-	-

Dari jumlah KDP di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah **0 unit** dengan nilai sebesar **Rp. 0,-** (*Nol Rupiah*), sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah **0 unit** dengan nilai sebesar **Rp. 0,-** (*Nol Rupiah*).

#### **h. ASET LAINNYA**

Saldo Aset lainnya (gabungan Intrakomptabel dan Ekstrakomptabel) pada Laporan Barang Pembantu Pengguna Eselon I Tahunan per 31 Desember 2017 adalah sebesar **Rp.8.742.271.597,-** (*Delapan milyar tujuh ratus empat puluh dua juta dua ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus sembilan puluh tujuh rupiah*). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar **Rp.6.002.998.825,-** (*Enam milyar dua juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu delapan ratus dua puluh lima Rupiah*), mutasi tambah sebesar **Rp.3.851.380.007,-** (*Tiga milyar delapan ratus lima puluh satu juta tiga ratus delapan puluh ribu tujuh Rupiah*), dan mutasi kurang sebesar **Rp.1.112.107.235,-** (*Satu milyar seratus dua belas juta seratus tujuh ribu dua ratus tiga puluh lima Rupiah*).

##### **1) Aset Tak Berwujud (8.01.01)**

Saldo Aset Tak Berwujud pada Laporan Barang Pembantu Pengguna Eselon I per 31 Desember 2017 adalah sebesar **Rp.1.856.698.385,-** (*Satu milyar delapan ratus lima puluh enam juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu tiga ratus delapan puluh lima Rupiah*). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar **10 buah** dengan nilai sebesar **Rp.1.782.670.785,-** (*Satu milyar tujuh ratus delapan puluh dua juta enam ratus tujuh puluh ribu tujuh ratus delapan puluh lima Rupiah*), mutasi tambah sejumlah **2 buah** dengan nilai sebesar **Rp.76.027.600,-** (*Tujuh puluh enam juta dua puluh tujuh ribu enam ratus Rupiah*), dan mutasi kurang sejumlah **0 buah** dengan nilai sebesar **Rp.0,-** (*Nol Rupiah*).

Mutasi Tambah Aset Tak Berwujud tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Nilai (Rp)
-Pembelian	76.027.600



Mutasi Kurang Aset Tak Berwujud tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Nilai (Rp)
-	0

Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2017 tersebut terdiri dari:

No.	Kode Barang/ NUP	Uraian ATB	Merk/ Identitas Barang	Tanggal Perolehan	Nilai Perolehan
1.	8010101001/ 16	Software Komputer	Aplikasi WBRS	2011	1.297.180.885
2.	8010101001/ 18	Software Komputer	Document Management System	2013	190.780.000
3.	8010101001/ 19	Software Komputer	Asset Management DJPK	2015	155.000.000
4.	8010101002/ 3	Lisensi	Microsoft Sharepoint 2013	2014	84.168.700
5.	8010101002/ 4	Lisensi	Jrebel	2014	5.800.000
6.	8010101002/ 5	Lisensi	Jrebel	2014	5.800.000
7.	8010101002/ 6	Lisensi	ZK Charts	2014	8.220.600
8.	8010101002/ 7	Lisensi	ZK Charts	2014	8.220.600
9.	8010101002/ 8	Lisensi	ZK Pivot Table	2014	13.750.000
10.	8010101002/ 9	Lisensi	ZK Pivot Table	2014	13.750.000
11.	8010101001/ 20	Software Komputer	Stat Planet Desktop	2017	38.187.600
12.	8010101001/ 19	Software Komputer	SQLCAL 2016 OLP NL Gov UsrCAL	2017	37.840.000
Jumlah					1.856.698.385

Dari jumlah Aset Tak Berwujud di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah **0 buah** dengan nilai sebesar Rp. **0,-** (*Nol Rupiah*).

## 2) BMN Yang Dihentikan Penggunaannya dari Operasional Pemerintah

Saldo BMN Yang Dihentikan Penggunaannya dari Operasional Pemerintah (gabungan Intrakomptabel dan Ekstrakomptabel serta Aset Tak Berwujud) pada Laporan Barang Pembantu Pengguna Eselon I per 31 Desember 2017 adalah sebesar **Rp.1.913.829.004,-** (*Satu milyar sembilan ratus lima puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu enam ratus empat Rupiah*). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar **615 buah** dengan nilai sebesar **Rp. 3.887.852.050,-** (*Tiga milyar delapan ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh dua ribu lima puluh Rupiah*), mutasi tambah sejumlah **390 buah** dengan nilai sebesar **Rp.4.308.574.724,-** (*Empat milyar tiga ratus delapan juta lima ratus tujuh puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh empat Rupiah*), dan mutasi kurang sejumlah **766 buah** dengan nilai sebesar **Rp. 6.244.430.170,-** (*Enam milyar dua ratus empat puluh empat juta empat ratus tiga puluh ribu seratus tujuh puluh Rupiah*).

Mutasi Tambah BMN Yang Dihentikan Penggunaannya dari Operasional Pemerintah tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Nilai (Rp)
Reklasifikasi Dari Aset Lainnya ke Aset Lainnya (Peralatan dan Mesin)	<b>4.308.574.724</b>

Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya (Peralatan dan Mesin) tersebut meliputi:

1. Transaksi penghentian penggunaan peralatan dan mesin rusak berat sebanyak **70 unit** dengan nilai sebesar **Rp. 77.593.819,-** (*Tujuh puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu delapan ratus sembilan belas Rupiah*) sesuai Surat Keterangan Penghentian Penggunaan BMN nomor KET-4/PK.1/2017 tanggal 18 April 2017
2. Penghentian **25 unit** kendaraan operasional roda 4 dengan nilai **Rp.3.359.006.060,-** (*Tiga milyar tiga ratus lima puluh sembilan juta enam ribu enam puluh Rupiah*) sesuai dengan surat sekretaris Ditjen Perimbangan Keuangan nomor S-332/PK.1/2017 tanggal 2 Juni 2017 serta penghentian penggunaan peralatan dan mesin
3. Transaksi penghentian penggunaan peralatan dan mesin rusak berat sebanyak 285 unit dengan nilai sebesar **Rp828.254.845,-** (*Delapan ratus dua puluh delapan juta dua ratus lima puluh empat ribu delapan ratus empat puluh lima Rupiah*) sesuai Surat Keterangan Penghentian Penggunaan BMN nomor KET-5/PK.1/2017 tanggal 10 Oktober 2017

Mutasi Kurang BMN Yang Dihentikan Penggunaannya dari Operasional Pemerintah tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Nilai (Rp)
Penghapusan (BMN yang dihentikan)	2.054.436.865
Penghapusan (BMN yang dihentikan)	3.359.006.060
Usulan Barang Rusak Berat ke Pengelola (BMN yang dihentikan)	828.254.845

1. Transaksi Penghapusan (dari BMN yang dihentikan penggunaannya) sebesar **Rp2.054.436.865,-**(Dua milyar lima puluh empat juta empat ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus enam puluh lima rupiah) merupakan penghapusan **458 unit** peralatan dan mesin sesuai dengan Surat Keputusan Sekretaris Ditjen Perimbangan Keuangan nomor **KEP-19/PK.1/2017** tanggal 7 Agustus 2017.
2. Transaksi Penghapusan (dari BMN yang dihentikan penggunaannya) sebesar **Rp3.359.006.060,-**(Tiga milyar tiga ratus lima puluh sembilan juta enam ribu enam puluh rupiah) merupakan penghapusan **25 unit** Mini Bus sesuai dengan Surat Keputusan Sekretaris Ditjen Perimbangan Keuangan nomor **KEP-24/PK.1/2017** tanggal 21 November 2017.
3. Usulan Barang Rusak Berat ke Pengelola (BMN yang dihentikan) sebesar **Rp828.254.845,-** (,delapan ratus dua puluh delapan juta dua ratus lima puluh empat ribu delapan ratus empat puluh lima rupiah) sejumlah **283 unit** peralatan mesin berdasarkan Surat Kepala Biro Perlengkapan nomor **S-1965/SJ.7/2017** tanggal 21 November 2017

Rincian BMN yang telah dihentikan penggunaannya pada Laporan Barang Pembantu Pengguna Eselon I per 31 Desember 2017 per golongan barang adalah sebagai berikut:

Golongan Barang	Gabungan Intrakomptabel dan Ekstrakomptabel (Rp)	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
<b>Aset Tetap</b>	1.514.796.680	1.513.749.080	1.047.600
1. Tanah		0	0
2. Peralatan dan Mesin	1.514.796.680	1.513.749.080	1.047.600
3. Gedung dan Bangunan		0	0
4. Jalan, Jembatan, Irigasi dan Jaringan		0	0
5. Aset Tetap Lainnya		0	0
<b>Jumlah</b>	1.514.796.680	1.513.749.080	1.047.600

Akumulasi Penyusutan BMN Yang Dihentikan Penggunaannya dari Operasional Pemerintah (gabungan intrakomptabel dan ekstrakomptabel) per 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

KODE	URAIAN	NILAI	PENYUSUTAN	NILAI BUKU
3.05.01	ALAT KANTOR	332.536.774	332.536.774	0
3.05.02	ALAT RUMAH TANGGA	130.763.150	130.763.150	0
3.06.01	ALAT STUDIO	219.940.356	219.940.356	0
3.06.02	ALAT KOMUNIKASI	19.571.200	19.571.200	0
3.10.01	KOMPUTER UNIT	578.532.832	578.532.832	0
3.10.02	PERALATAN KOMPUTER	233.452.368	233.452.368	0
	<b>Total</b>	1514796680	1514796680	0

**i. ASET BERSEJARAH**

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan per 31 Desember 2017 tidak mempunyai aset berupa aset bersejarah.

**j. BARANG RUSAK BERAT YANG TELAH DIUSULKAN PENGHAPUSANNYA KE PENGELOLA BARANG**

disajikan dalam Neraca sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 90/PMK.06/2014.

Saldo BMN Rusak Berat Yang Telah Diusulkan Penghapusannya Ke Pengelola Barang pada Laporan Barang Pembantu Pengguna Eselon I per 31 Desember 2017 adalah sebesar **Rp.827.687.245** (*Delapan ratus dua puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus empat puluh lima Rupiah*). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sejumlah **0 buah** dengan nilai sebesar **Rp.0,-** (*Nol Rupiah*), mutasi tambah sejumlah **463 unit** dengan nilai **Rp.2.882.124.110,-** (*Dua milyar Delapan ratus delapan puluh dua juta seratus dua puluh empat ribu seratus sepuluh Rupiah*), dan

mutasi kurang sejumlah **463 unit** dengan nilai **Rp.2.054.436.865,-** (*Dua milyar lima puluh empat juta empat ratus tiga puluh enam juta delapan ratus enam puluh lima Rupiah*).

Mutasi Tambah Barang Rusak Berat Yang Telah Diusulkan Penghapusannya Ke Pengelola Barang tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Nilai (Rp)
Usulan Barang Rusak Berat ke Pengelola (BMN yang dihentikan)	2.882.124.110

Mutasi Kurang Barang Rusak Berat Yang Telah Diusulkan Penghapusannya Ke Pengelola Barang tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Nilai (Rp)
Penghapusan Barang Rusak Berat yang sudah diusulkan ke Pengelola	2.054.436.865

### 3. Barang Milik Negara pada Laporan Barang Pembantu Pengguna Eselon I Tahunan per 31 Desember 2015

#### a. BMN per akun neraca

Nilai BMN pada Laporan Barang Pembantu Pengguna Eselon I Tahunan per 31 Desember 2015 adalah sebesar **Rp.112.707.214.063,-** (*Seratus dua belas milyar tujuh ratus tujuh juta dua ratus empat belas ribu enam puluh tiga Rupiah*), nilai BMN dimaksud disajikan berdasarkan klasifikasi pos-pos perkiraan Neraca yaitu: Persediaan, Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi, dan Jaringan, Aset Tetap dalam Renovasi, Aset Tetap Lainnya, Konstruksi Dalam Pengerjaan, dan Aset Lainnya. Penyajian nilai BMN dalam pos perkiraan Neraca tersebut dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian Neraca	Intrakomptabel		Ekstrakomptabel		Gabungan	
		Rp	%	Rp	%	Rp	%
I	Aset Lancar						
1	Persediaan	2.258.890.806	100	-	0	2.258.890.806	100
	Sub Jumlah (I)	2.258.890.806	100	-	0	2.258.890.806	100
II	Aset Tetap						
1	Tanah	-	0	-	0	-	0
2	Peralatan dan Mesin	93.837.631.062	99.95	51.405.100	00.05	93.889.036.162	100
3	Gedung dan Bangunan	-	0	-	0	0	0
4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	990.851.337	0	-	0	990.851.337	0
5	Aset Tetap dalam Renovasi	0	100	-	0	0	100
6	Aset Tetap Lainnya	789.445.090	100	-	0	789.445.090	100
7	KDP	-	0	-	0	-	0
	Sub Jumlah (II)	95.617.927.489	200	51.405.100	0	95.669.332.589	100
III	Aset Lainnya						

1	Kemitraan dengan Pihak Ketiga						
2	Aset Tak Berwujud	1.858.698.385	100	-	0	1.858.698.385	100
3	Aset yang dihentikan penggunaannya dari Operasional Pemerintah	1.513.749.080	99,95	1.047.600	00,05	1.491.077.580	100
	Sub Jumlah (III)	3.372.447.465	99,98	1.047.600	00,02	3.349.775.965	100
	Total	101.249.265.760	99,96	52.452.700	00,04	101.277.999.360	100

Rincian nilai Akumulasi Penyusutan BMN pada Laporan Barang Pembantu Pengguna Eselon I Tahunan per 31 Desember 2017 per perkiraan Neraca adalah sebagai berikut:

No.	Uraian Neraca	Intrakomptabel		Ekstrakomptabel		Gabungan	
		Rp	%	Rp	%	Rp	%
I	Aset Tetap						
1	Peralatan dan Mesin	73.433.702.129	99,94	51.405.100	0,06	73.485.107.229	100
2	Gedung dan Bangunan	0	0	0	0	0	0
3	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	342.832.216	0	0	0	342.832.216	0
4	Aset Tetap Lainnya	0	0	0	0	0	0
	Sub Jumlah (I)	73.776.534.345	99,94	51.405.100	0,06	73.827.939.445	100
II	Aset Lainnya						
1	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0	0	0	0	0	0
2	Aset yang dihentikan penggunaannya dari Operasional Pemerintah	1.915.994.354	99,99	1.047.600	0,01	1.917.041.954	100
	Sub Jumlah (II)	1.915.994.354	99,99	1.047.600	0,01	1.917.041.954	100
	Total	75.692.528.699	99,95	52.452.700	0,05	75.744.981.399	100

**b. Perbandingan Nilai BMN pada Laporan Barang dan Laporan Keuangan**

Perbandingan antara nilai BMN yang disajikan dalam laporan barang dan laporan keuangan pada Laporan Barang Pembantu Pengguna Eselon I Tahunan per 31 Desember 2017 per akun neraca adalah sebagai berikut:

No.	Uraian Neraca	Laporan Barang	Laporan Keuangan	Selisih
1.	Persediaan	2.258.890.806	2.258.890.806	0
2.	Tanah	0	0	0
3.	Peralatan dan Mesin	93.837.631.062	93.837.631.062	0
4.	Gedung dan Bangunan	0	0	0
5.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	990.851.337	990.851.337	0
6.	Aset Tetap dalam Renovasi	0	0	0
7.	Aset Tetap Lainnya	789.445.090	789.445.090	0
8.	KDP	0	0	0
9.	Aset Tak Berwujud	1.858.698.385	1.858.698.385	0
10.	Aset Lain-lain*)	1.937.548.104	1.937.548.104	0
	<b>Total</b>	<b>101.673.064.784</b>	<b>101.673.064.784</b>	<b>0</b>

\*) Aset lain-lain pada laporan barang adalah nilai BMN yang dihentikan penggunaannya dari operasional pemerintah.

**V. INFORMASI TAMBAHAN**

**INFORMASI LAINNYA**

**1. Perkembangan Nilai BMN**

Perkembangan nilai BMN secara gabungan (intrakomptabel dan ekstrakomptabel) selama 6 (lima) periode laporan terakhir, dapat disajikan sebagai berikut:

No	Periode Laporan	Nilai BMN	Perkembangan	
			Rupiah	Persen
1	Tahun 2011	57.014.887.531		
2	Tahun 2012	61.608.912.379	4.594.024.848	8,06
3	Tahun 2013	71.616.930.057	10.008.017.678	16,24
4	Tahun 2014*)	74.052.090.147	2.435.160.090	3,40
5	Tahun 2015	88.001.146.303	13.949.056.156	18,84
6	Tahun 2016	73.735.712.796	(14.265.433.507)	(19,34)
7	Tahun 2017	102.526.185.629	28.790.472.833	39,04

\*) Termasuk nilai barang rusak berat yang telah diusulkan ke pengelola barang

**2. Informasi Pengelolaan BMN**

**a. Penetapan Status Penggunaan**

Nilai BMN yang sudah ditetapkan status penggunaannya pada Laporan Barang Pembantu Pengguna Eselon I per 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	Belum ditetapkan Status Penggunaan (Rp)	Sudah ditetapkan Status Penggunaan (Rp)	Total (Rp)
1	Tanah	0	0	0
2	Peralatan dan Mesin*)	43,713,744,809	50,127,186,253	93,840,831,062
3	Gedung dan Bangunan	-	-	-
4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	990,851,337	-	990,851,337
5	Aset Tetap Lainnya**)	11,492,088,346	729,871,447	12,221,959,793
<b>Total</b>		<b>56,196,684,492.00</b>	<b>50,857,057,700.00</b>	<b>107,053,642,192.00</b>

Keterangan:

\*) termasuk yang telah dihentikan penggunaannya;

\*\*\*) termasuk yang telah dihentikan penggunaannya, tidak termasuk nilai Aset Tetap Dalam Renovasi.

Daftar Surat Keputusan penetapan Status Penggunaan BMN pada DJPK adalah sebagai berikut:

No.	Nomor SK	Tanggal SK	Penerbit SK	Nilai Penetapan (Rp)
1.	10/KM.1/2015*)	13 Januari 2015	Sekjen a.n. Menkeu	23.606.061.118
2.	KEP-21/PK.1/2015	28 September 2015	Sesditjen PK	8.403.395.118
3.	KEP-124/KM.6/ WKN.07/KNL.02/2015	1 Desember 2015	Kepala KPKNL Jakarta II a.n. Menkeu	267.456.198
4.	35/KM.6/2016	10 Februari 2016	Dirjen KN a.n. Menkeu	28.675.798.335
5.	KEP-26/KM.6/ WKN.07/KNL.02/2016	22 Februari 2016	Kepala KPKNL Jakarta II a.n. Menkeu	194.000.000
6.	KEP-12/PK.1/2016	15 Juni 2016	Sesditjen PK	2.730.398.795
7.	KEP-12/PK.1/2017	5 Mei 2017	Sesditjen PK	1.658.453.172

Keterangan:

\*) sebagian telah dilakukan penghapusan

b. Pengelolaan BMN

No	Uraian	Penggunaan	Pemanfaatan	Pemindahan-tanganan	Penghapusan	Jumlah
1.	Dalam Proses Pengajuan Permohonan ke Pengguna Barang	0	0	0	0	0
2.	Dalam proses pengajuan permohonan ke Pengelola Barang	0	0	0	0	0
3.	Dalam proses Pengelola Barang	0	0	0	0	0
4.	Selesai di Pengelola Barang					
	a.Dikembalikan	0	0	0	0	0
	b.Ditolak	0	0	0	0	0
	c.Disetujui	0	0	0	0	0
5.	Dalam proses tindak lanjut Pengguna Barang/ Kuasa Pengguna Barang	0	0	0	0	0
6.	Telah diterbitkan Keputusan dari Pengguna Barang	0	0	0	0	0
7.	Tindak lanjut oleh Kuasa Pengguna Barang	0	0	0	0	0
8.	Selesai serah terima	0	0	0	0	3

Proses penghapusan yang statusnya telah selesai serah terima/ pemusnahan (3 paket) tersebut merupakan proses penghapusan atas:

1. kendaraan Bermotor Roda-4 sebanyak **25 unit** dengan nilai sebesar **Rp. 3.359.006.060,-** (*Tiga milyar tiga ratus lima puluh sembilan juta enam ribu enam puluh rupiah*) yang telah diterbitkan surat Keputusan Penghapusan BMN nomor **KEP-24/PK.1/2017** 21 November 2017 (Penghapusan melalui pemusnahan).
2. Peralatan dan mesin sebanyak **458 buah** dengan nilai **Rp.2.054.436.865,-** (*Dua milyar lima puluh empat juta empat ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus enam puluh lima rupiah*), yang telah diterbitkan Surat Keputusan Penghapusan BMN nomor **KEP-19/PK.1/2017** tanggal 7 Agustus 2017 (Penghapusan melalui penjualan); dan
3. Peralatan dan mesin sebanyak **70 buah** dengan nilai **Rp.77.593.819,-** (*Tujuh puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu delapan ratus sembilan belas rupiah*), yang telah diterbitkan Berita Acara Serah Terima Penghapusan nomor **BA-24/TPBMN.DJPK/2017** TANGGAL 28 November 2017

Pengelolaan BMN *Idle*

No	Uraian	Jumlah
1	Jumlah BMN yang teridentifikasi sebagai BMN <i>Idle</i>	0
2	Ditetapkan sebagai BMN <i>Idle</i> oleh Pengelola	0
3	Pemberitahuan bukan sebagai BMN <i>Idle</i> oleh Pengelola	0
4	Telah diterbitkan Keputusan Penghapusan dari Pengguna	0
5	Selesai serah terima kepada Pengelola	0



**3. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Dari Pengelolaan BMN**

Jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berasal dari pengelolaan BMN pada per 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp. 436.651.000,- (*Empat ratus tiga puluh enam juta enam ratus lima puluh satu ribu Rupiah*), dengan rincian sebagai berikut:

• PNBP dari pemanfaatan aset	Rp.	0,00
• PNBP dari penjualan/penghapusan (lelang)	Rp.	1.486.828.263,00
Jumlah PNBP	Rp.	1.486.828.263,00

PNBP dari penjualan/penghapusan (lelang) tersebut merupakan penerimaan dari lelang penjualan Peralatan dan Mesin (peralatan perkantoran) Rusak Berat sebesar Rp. 20.200.000,- (**Dua puluh juta dua ratus ribu Rupiah**) sesuai Surat Keputusan Penghapusan BMN nomor **KEP-19/PK.1/2017** tanggal 7 Agustus 2017 dan Kendaraan Bermotor sebanyak **25 unit** sebesar Rp. 1.446.428.264,- (**Satu milyar empat ratus empat puluh enam juta empat ratus dua puluh delapan ribu dua ratus enam puluh empat Rupiah**) sesuai dengan Surat Keputusan Penghapusan BMN nomor **KEP-24/PK.1/2017** 21 November 2017 serta penjualan Peralatan dan Mesin (peralatan perkantoran) Rusak Berat sebesar Rp. 20.199.999,- (**Dua puluh juta seratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan Rupiah**) sesuai Berita Acara Serah Terima Penghapusan nomor BA-24/TPBMN.DJPK/2017 TANGGAL 28 November 2017

**4. Informasi Rekonsiliasi Data BMN**

Data BMN Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Tahunan tahun anggaran 2017 pada tingkat satker/UAKPB telah dilakukan rekonsiliasi dengan KPKNL Jakarta II dengan Berita Acara nomor: BAR-403/THn.2017/WKN.07/KNL.02/2018 tanggal 15 Februari 2017.

Jakarta, Februari 2017

Sekretaris Direktorat Jenderal Perimbangan  
Keuangan selaku Penanggung Jawab UAPPB-  
E1



Rukijo

NIP 196702101993101001

